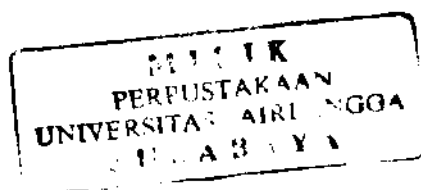


TESIS

**KELOMPOK TANI SEBAGAI SALURAN PARTISIPASI
PETANI DALAM PEMBANGUNAN DESA**

MADEKHAN



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

KELOMPOK TANI SEBAGAI SALURAN PARTISIPASI PETANI DALAM PEMBANGUNAN DESA

TESIS

**Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga**

**Oleh:
MADEKHAN
NIM. 099913358/M**

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

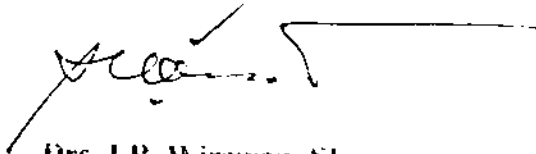
**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL: FEBRUARI 2002

Oleh
Pembimbing



Drs. I.B. Wirawan, ST.

Mengetahui

Wakil Ketua Program Studi

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Pascasarjana Universitas Airlangga



Dr. Supriyo, dr., MS., MSc.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur ke hadirat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan berbagi pihak. Oleh karena itu dengan selesainya tesis ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

Rektor Universitas Airlangga yang dijabat Prof. H. Soedarto, DTM & H, Ph.D., dr., yang telah memberi kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Magister.

Direktur Program Pascasarjana, Prof. Dr. Soedijono, dr., yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengikuti program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Bapak Prof. DR. Haryono Suyono, MA., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Bapak Dr. Sunaryo, dr., MS., MSc., selaku Wakil Ketua Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia, atas segala perhatian dan dukungan yang sangat berarti dalam penulisan tesis ini.

Kedua beliau, Bapak Drs. I.B. Wirawan, SU., dan Bapak Drs. Djarot Santoso, MA. selaku pembimbing tesis ini, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, dan saran, yang tidak ternilai besarnya dalam penulisan tesis ini. Atas semua itu, perkenankan saya mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga. Dan tak lupa permohonan maaf saya atas segala kekurangannya.

Bapak dan Ibu pengampu Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah mengantarkan saya untuk mendalami ilmu-ilmu pengembangan sumber daya manusia dan para staf Program Pascasarjana yang telah membantu saya dalam urusan administrasi.

Kepala Desa Wajik beserta perangkat yang telah memberikan ijin dan membantu dalam hal penyediaan data sekunder.

Warga masyarakat Wajik, khususnya para subyek penelitian, yang telah rela meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian tesis ini.

Terima kasih yang tiada terhingga kepada sang istri yang tiada lelah menyulut semangat dan harapan, serta pengorbanannya sejak awal studi hingga selesainya tesis ini.

Kepada saudara-saudaraku, terima kasih atas segala kesabarannya untuk selalu bersabar terhadap kenakalan adikmu ini.

Tidak lupa kepada teman-teman di Program studi Pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya angkatan 1999/2000.

Dan semua pihak yang tidak mungkin dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini.

Selanjutnya saya menyadari keterbatasan pengetahuan dan kedangkalan penalaran dalam penulisan tesis ini. Maka segala kritik dan saran demi kesempurnaannya, akan kami terima dengan senang hati.

Akhir kata semoga karya ini dapat berguna untuk pengembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan kita

Surabaya, Pebruari 2002

Penulis

KELOMPOK TANI SEBAGAI SALURAN PARTISIPASI PETANI DALAM PEMBANGUNAN DESA

RINGKASAN

Kata kunci: Pembangunan, Partisipasi, Petani, Kelompok Tani

Pembangunan adalah upaya perubahan yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai kondisi dan situasi masyarakat yang lebih baik. Keberhasilan pembangunan menuntut partisipasi dari semua warga negara, dan hasilnya harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara merata. Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat khususnya petani di pedesaan dapat berpartisipasi di dalam pembangunan. Hal ini salah satunya terkait dengan kurangnya kelembagaan petani yang representatif dan artikulator di dalam memperjuangkan kepentingan petani.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana organisasi petani di desa yang berwujud kelompok tani menjadi saluran partisipasi petani dalam pembangunan desa. Lebih jauh lagi, penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai aktifitas-aktifitas yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan kelompok tani. Mengetahui proses-proses sosial yang menandai adanya potensi sosial pada kelompok tani bagi pembangunan desa. Dan untuk mempelajari pola-pola aktifitas partisipasi kelompok tani dalam pembangunan desa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan subyek penelitiannya adalah para petani yang menjadi anggota kelompok tani bernama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Petani Wajik, Desa Wajik Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Umur subyek yang diamati berkisar 25 s/d 60 tahun. Subyek ditentukan dengan sengaja, dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam proses penyelenggaraan KSM Petani Wajik dan pembangunan desa. Data yang didapat dianalisa dengan mengadakan seleksi data kasar, kategorisasi, dan penafsiran data secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan KSM Petani Wajik ini didasari inisiatif sejumlah petani Wajik, bukan dari pemerintah desa. Selanjutnya aktifitas-aktifitas kelompok masih banyak diprakarsai pengurus berdasarkan program-program kerja yang bertujuan memenuhi kebutuhan anggota. Selain itu, kegiatan kelompok, khususnya usaha ekonomi, berpotensi sebagai pendukung upaya peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat desa.

Partisipasi kelompok dalam pembangunan desa dilakukan secara lengkap dari tahapan pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Partisipasi kelompok tani di dalam pembangunan desa juga dipengaruhi oleh pola hubungan kesetaraan yang dikembangkan kelompok tani dengan pemerintah desa.

PEASANT GROUP AS PARTICIPATION CHANNEL OF PEASANT IN RURAL DEVELOPMENT

ABSTRACT

Keywords: Development, Participation, Peasant, Peasant Group.

Development is purposive changing efforts in achieving better situation and condition of people. Success in development needs people participation, and the result of development must be able to be enjoyed equitably by all the people. In fact, not all the people especially peasant in rural area can participate in development. In this case, it is connected with the weakness of peasant's institution, which representative and articulative in advocating peasant's interest.

The objective of this research is to know how rural peasant organization in the form of peasant group to be the channel of peasant participation in rural development. Moreover, this research is meant to obtain description of activities in executing peasant group. Comprehending social process in the peasant group revealing the existence of social potentation for rural development. And examining the pattern of participation activities of peasant group in rural development.

The research's method used a qualitative research method. The research subjects are peasants which the members of a peasant group called *Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Petani Wajik*, *Desa Wajik*, *Kecamatan Lamongan*, *Kabupaten Lamongan*. The age of subjects observed ranged between 25 up to 60 years old. The subjects are purposely determined, considering their involvement in the executing process of *KSM Petani Wajik* and rural development. The data obtained are analyzed by performing data reduction, categorization, and interpretation of data descriptively.

The result of the research shown that the founding of *KSM Petani Wajik* is based on the initiative of some peasants in Wajik, not government's initiative. Furthermore, the group's activities are generally inspired by the board of the group based on the programs directed to accomplish members' need. Besides, the group's activities notably economic ventures, have potency in supporting the attempt of increasing rural prosperity level.

Group's participation in the rural development is done in a complete manner, from the step of decision making, executing, to controlling of development. Peasant group's participation in the rural development is also affected by egalitarian relationship pattern developed by the peasant group together with the village administration.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| Sampul depan | i |
| Sampul dalam | ii |
| Prasyarat Gelar | iii |
| Persetujuan..... | iv |
| Penetapan Panitia..... | v |
| Ucapan terima kasih..... | vi |
| Ringkasan..... | viii |
| Abstrak..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA..... | 8 |
| 2.1. Latar Sejarah Petani Di Bawah Imperialisme | 8 |
| 2.1.1 Sistem Pajak Tanah..... | 8 |
| 2.1.2 Sistem Tanam Paksa..... | 9 |
| 2.1.3 Politik Pintu Terbuka..... | 10 |
| 2.1.4 Akibat Imperialisme Bagi Petani | 11 |
| 2.2. Konsep Pembangunan Pedesaan | 16 |
| 2.3. Partisipasi Dalam Pembangunan..... | 23 |
| 2.4. Konsep Dasar Organisasi Sebagai Saluran Partisipasi..... | 28 |
| BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL | 32 |
| BAB 4 METODE PENELITIAN..... | 36 |
| 4.1 Lokasi dan Subyek Penelitian..... | 36 |

| | |
|---|-----------|
| 4.2. Teknik Pengumpulan Data | 38 |
| 4.3. Teknik Analisis Data..... | 42 |
| 4.4. Definisi Operasional..... | 43 |
| BAB 5 SETTING PENELITIAN..... | 45 |
| 5.1 Reformasi Paradigma Pembangunan Daerah..... | 46 |
| 5.1.1 Orientasi Kebijakan Pembangunan..... | 48 |
| 5.1.2 Peranan Pemerintah Kabupaten..... | 51 |
| 5.2 Implementasi Kebijakan Pembangunan Pertanian..... | 53 |
| 5.3 Profil Wilayah Dan Masyarakat Lamongan..... | 57 |
| 5.3.1 Gambaran Umum Kabupaten Lamongan..... | 57 |
| 5.3.2 Gambaran Umum Kecamatan Lamongan..... | 58 |
| 5.4 Desa Wajik..... | 59 |
| 5.4.1 Letak Geografis Dan Kondisi Fisik..... | 59 |
| 5.4.2 Tata Pemerintahan Wajik | 61 |
| 5.4.3 Kependudukan..... | 63 |
| 5.4.4 Lembaga Kemasyarakatan Dan Keagamaan..... | 65 |
| 5.4.4.1 Lembaga Kemasyarakatan..... | 65 |
| 5.4.4.2 Lembaga Keagamaan..... | 66 |
| 5.4.5 Kepemimpinan Dan Struktur Kekuasaan..... | 67 |
| 5.4.6 Latar Budaya Khas..... | 70 |
| 5.4.6.1 Gotong Royong..... | 70 |
| 5.4.6.2 Sedekah Bumi..... | 71 |
| BAB 6 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 73 |
| 6.1 Keadaan KSM Petani Wajik..... | 73 |
| 6.1.1 Sejarah Berdirinya Kelompok..... | 73 |
| 6.1.2 Struktur Organisasi..... | 77 |
| 6.1.3 Elit Dan Kepemimpinan Kelompok..... | 80 |
| 6.1.4 Keterlibatan Anggota Kelompok..... | 82 |
| 6.1.4.1 Struktur Kepatuhan Pamrih..... | 83 |
| 6.1.4.2 Partisipasi Kegiatan..... | 85 |
| 6.1.5 Pembagian Fungsi-Fungsi Di Dalam Kelompok..... | 88 |

| | |
|--|-----|
| 6.2 Hubungan Kelompok Tani Dengan Masyarakat Desa..... | 92 |
| 6.2.1 Kondisi Sosio-Ekonomi Petani Wajik..... | 92 |
| 6.2.2 Peran Kelompok Tani Di Tengah Masyarakat..... | 95 |
| 6.2.3 Petani Wajik Menghadapi Kekurangan Air..... | 98 |
| 6.2.4 Pengadaan Pinjaman Pupuk Bagi Petani..... | 101 |
| 6.2.5 Pengelolaan Lumbung Desa..... | 105 |
| 6.3 Hubungan Kelompok Tani Dengan Pemerintahan Desa..... | 107 |
| 6.3.1 Kondisi Pemerintahan Desa Wajik..... | 108 |
| 6.3.2 Peranan Kelompok Tani Dalam Pengambilan Keputusan Desa..... | 111 |
| 6.3.2.1 Pemanfaatan DPD/K Tahun 2001 | 114 |
| 6.3.2.2 Lelang Tanah Bengkok..... | 117 |
| 6.4 Hubungan Kelompok Tani Dengan Organisasi Lain..... | 120 |
| BAB 7 KESIMPULAN DAN IMPLIKASI..... | 126 |
| 7.1 Kesimpulan..... | 126 |
| 7.2 Implikasi..... | 130 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 132 |
| LAMPIRAN | |
| Lampiran 1 : Peta Kabupaten Lamongan | |
| Lampiran 2 : Peta Kecamatan Lamongan | |
| Lampiran 3 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Wajik | |
| Lampiran 4: Jadwal Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Jawa Timur | |
| Lampiran 5 : Kliping Reportase Media Massa tentang Kegiatan KSM Petani Wajik | |
| Lampiran 6 : Undangan Pemerintah Desa Kepada KSM Petani Wajik. | |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 4.1 Biodata subyek penelitian..... | 37 |
| Tabel 6.1 Gejala-gejala organisasi informasi dan organisasi formal..... | 91 |
| Tabel 6.2 Laporan keuangan Kegiatan peminjaman pupuk KSM Petani Wajik | 104 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|----------------|
| Gambar 3.1 Skema mekanisme kelompok tani sebagai saluran partisipasi..... | 35 |
| Gambar 6.1 Struktur Organisasi KSM Petani Wajik..... | 78 |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah agenda Pemerintah yang terus menjadi pusat perhatian hingga saat ini adalah pembangunan. Menurut konsepnya, pembangunan adalah suatu upaya perubahan yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai kondisi dan situasi yang lebih baik, dilaksanakan secara sistematis dan bertahap di semua bidang. Pembangunan dikatakan menjadi tanggung jawab dan menuntut partisipasi dari semua warga negara, dan hasilnya pun harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara merata (Purwanto.1997). Namun demikian, salah satu tantangan pembangunan paling serius yang harus disikapi secepatnya yakni upaya penanggulangan besarnya jumlah keluarga miskin.

Memasuki era tahun 2000-an, gejala kemiskinan massal di Indonesia nampaknya belum sepenuhnya bisa diatasi. Kemiskinan yang relatif parah sebagian besar masih terdapat di pedesaan. Menurut data yang dikeluarkan oleh BPS tahun 1993, dari total kemiskinan sebesar 25,9 juta orang, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan di pedesaan adalah 17,2 juta orang atau 13,8%, dan 8,7 juta orang atau 13,5% di perkotaan (Pranadji:1993).

Mendasarkan diri pada data Susenas 1996, Endang Suhendar (Suhendar:1998) memperkirakan bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1997 telah meningkatkan secara signifikan jumlah penduduk miskin, khususnya di pedesaan. Perkiraan ini dihitung oleh Suhendar dengan menggunakan asumsi sebagai berikut; Menurut Susenas 1996, seseorang dikategorikan sebagai penduduk miskin di pedesaan



apabila pengeluaran per kapita per bulan paling tidak atau di bawah Rp. 27.413,-. Angka ini diasumsikan dapat memenuhi kebutuhan 2100 kalori per hari ditambah kebutuhan dasar non-pangan lainnya selama selama sebulan. Pada waktu Susenas 1996 dilaksanakan harga beras berkisar Rp. 800,- per kilogram, dan dengan demikian jika disetarakan dengan harga beras maka garis kemiskinan di pedesaan setara dengan 34 kilogram beras. Sekarang jika diasumsikan harga beras mencapai Rp. 1.400,- per kilogram, maka untuk memenuhi kebutuhan setara dengan 34 kilogram, seorang penduduk pedesaan harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 47.978,- per kapita per bulan. Dengan adanya pergeseran pengeluaran minimal tersebut, maka sudah selayaknya garis kemiskinan pun berubah menjadi sebesar Rp. 47.978 per kapita per bulan. Dengan menggunakan garis kemiskinan yang sudah disesuaikan tersebut, maka berdasarkan Susenas 1996, jumlah penduduk miskin di pedesaan paling tidak akan mencapai 70.868.962 jiwa.

Pada situasi di mana peradaban pertanian masih dominan sebagaimana di Indonesia, kemiskinan di pedesaan hampir sepenuhnya melekat pada kegiatan pertanian rakyat yang sarat tenaga kerja. Ditinjau dari faktor penyebab, kemiskinan di pedesaan tidak semata-mata disebabkan kurangnya modal agregat di pedesaan, tetapi juga oleh tidak meratanya penguasaan aset (modal) produksi (Sarjadi:1994). Distribusi penguasaan aset atau modal produksi diperkirakan bahwa sebagian besar modal pertanian di pedesaan hanya dikuasai oleh sejumlah kecil pelaku ekonomi. Petani diperkirakan hanya mempunyai modal yang sangat terbatas, dan sebagian besar di antaranya lebih banyak mengandalkan tenaga kerja keluarga.

Sedemikian jauh, semasa rezim Orde Baru, persoalan kemiskinan petani hanya direduksi sebagai persoalan ekonomi semata. Padahal sebagai sebuah proses, kemiskinan mencerminkan kegagalan suatu sistem masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya dan dana secara adil kepada seluruh anggota masyarakat (Dillon:1999). Jumlah penduduk pedesaan yang terus bertambah tetapi tidak diimbangi dengan bertambahnya tanah telah menyebabkan semakin berkurangnya tanah yang dapat dimiliki petani kecil sehingga terjadi apa yang disebut Geertz sebagai *shared poverty* (kemiskinan terbagi) (Suyanto:1995).

Sementara itu, berbagai program utama pembangunan pedesaan yang tercakup dalam kategori revolusi hijau dan industrialisasi pertanian tidak menempatkan pemerataan akses atau sumber daya dan partisipasi kaum miskin pedesaan sebagai variabel utama pemberantasan kemiskinan. Bias utama dari pembangunan pedesaan adalah orientasi pada keamanan pangan terutama beras, dan produksi komoditi untuk memenuhi pasar dunia yang kesemuanya dijalankan dengan mekanisme *top down* dengan suatu prasyarat adanya stabilitas politik.

Akibatnya penyimpangan sering terjadi di dalam program bantuan pembangunan di wilayah-wilayah pedesaan. Para elit desa yang secara ekonomi mapan dan memiliki akses terhadap kekuasaan (pemerintah desa) dengan mudah dapat mengambil keuntungan dari paket-paket bantuan yang masuk. Sementara warga desa kebanyakan yang kurang berpendidikan dan miskin harus puas hanya sebagai penonton (Suyanto:1995). Kesemua ini membuktikan bahwa merata atau tidak meratanya distribusi akses dan sumber daya tidaklah semata-mata diakibatkan oleh keadaan tempat produksi, perbedaan luasnya lahan yang dimiliki, modal yang diinvestasikan, perbedaan kemampuan teknis, dan penyerapan

teknologi di antara petani, tetapi yang juga harus diperhitungkan adalah perbedaan dalam kemampuan mendapatkan fasilitas pemerintah (Husin:1979).

Dalam konteks permasalahan ini, yang dipandang mendesak dan strategis pada intinya adalah upaya menegakkan kembali hak-hak rakyat petani, tidak hanya atas sumber-sumber agraria yang telah hilang atau terampas selama ini, tetapi juga dalam keseluruhan tatanan kehidupan bernegara. Realitas kehidupan petani menunjukkan bahwa manusia petani di desa-desa Indonesia adalah golongan dalam masyarakat yang selalu menjadi sasaran ketidakberdayaan. Mereka adalah golongan yang paling menderita dalam struktur ekonomi imperialis maupun modern. Di satu pihak petani sebagai manusia dalam kancah pembangunan diakui hak-haknya, tetapi di lain pihak mereka begitu akrab dengan kemiskinan dan ketidakberdayaan.

Hal ini kiranya terkait erat dengan tidak adanya kelembagaan petani yang representatif dan artikulator di dalam memperjuangkan kepentingan petani. Di masa Pemerintah Orde baru, diundangkannya Undang-undang Pemerintahan Desa (UUPD) tahun 1979 telah membuat desa semakin kehilangan dinamika proses politik yang demokratis-partisipatif (Suwondo, 1991 dalam Fauzi, 1999). Rangkaian peraturan penjabaran dari UUPD 1979 semakin menunjukkan kontrol birokrasi yang nyata menghambat partisipasi rakyat petani di desa-desa. Contohnya antara lain, Lembaga Musyawarah Desa (LMD) sebagai representasi dari kekuatan legislatif rakyat, merupakan kepanjangan tangan birokrasi. Perhatikan klausul tentang keanggotaan LMD dimana "dimusyawarahkan/dimufatkan oleh kepala desa dengan pemuka-pemuka masyarakat desa yang bersangkutan" dan "ketua LMD dijabat oleh Kepala Desa karena jabatannya". Contoh lain adalah perubahan Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan

Masyarakat Desa (LKMD). LSD merupakan wadah partisipasi langsung pemuka desa dalam pembangunan desa, diubah secara seragam menjadi wadah kontrol LKMD yang diketuai oleh Kepala Desa.

Suatu penelitian oleh Nordholt di tahun 1988 (dalam Fauzi:1999) menyimpulkan suasana kepemimpinan lokal yang begitu khas di masa Orde Baru. Digambarkan Nordholt bahwa kekuatan-kekuatan yang menentang tidak boleh mengorganisir diri dan apa saja yang dapat merupakan organisasi di tingkat desa harus ada di bawah pengawasan LMD. Pengurus LMD sepenuhnya dikuasai oleh lurah, atau lurah dapat mengesampingkan dengan efektif LMD ini dengan menggunakan alasan bahaya "arena politik". Kebijakan mendepolitisasi pedesaan dapat berakibat pamong desa bertindak tanpa kekuatan-kekuatan pengawasan formal di tingkat lokal. Ketiadaan kekuatan lawan yang terorganisasi resmi di tingkat desa menyelubungi pertentangan kepentingan yang sesungguhnya. Suatu selubung yang sesuai dengan gambaran tentang desa yang dicitakan., tetapi pada hakekatnya merupakan rintangan bagi norma partisipasi penduduk dalam pengembangan diri.

Akibatnya, sampai sekarang masih sangat jarang ditemukan sebuah organisasi massa petani yang bisa dijadikan petani sebagai payung perlindungan terhadap berbagai ketidakberdayaan mereka. Pemenuhan hak-hak mereka untuk mengorganisir dan secara kolektif memperjuangkan kepentingan dan memperkuat posisi tawar menawar telah begitu lama hilang dari agenda pemerintah. Untuk itu di masa awal keterbukaan politik ini, seyogyanya petani harus segera menghimpun diri mereka dalam satu kekuatan politik maupun ekonomi baik dalam bentuk organisasi maupun koperasi-koperasi petani. Dengan mengorganisir diri, petani akan mampu mewujudkan alat perjuangan sosial,

ekonomi dan politik untuk mendapatkan tempat yang layak dalam wacana kekuasaan. Dimana tidak akan terulang lagi sistem pembangunan represif yang telah sedemikian tidak memberdayakan kekuatan petani.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini memusatkan pada pertanyaan dasar bagaimana organisasi sosial petani yang berwujud kelompok tani menjadi saluran partisipasi petani dalam pembangunan desa. Untuk itu lebih rinci perlu ditanyakan dalam sebuah kerangka permasalahan sebagai berikut:

1. Aktifitas-aktifitas apa saja yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan kelompok tani?
2. Bagaimana proses-proses sosial yang menandai adanya potensi sosial pada kelompok tani bagi pembangunan desa?
3. Bagaimana pola-pola aktifitas partisipasi kelompok tani dalam pembangunan desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini tidak lain adalah:

1. Memperoleh gambaran mengenai aktifitas-aktifitas yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan kelompok tani.
2. Mengetahui atau memahami proses-proses sosial yang menandai adanya potensi sosial pada kelompok tani bagi pembangunan desa.
3. Mempelajari atau mengkaji pola-pola aktifitas partisipasi kelompok tani dalam pembangunan desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya pelaksanaan penelitian ini, diharapkan mampu memperkaya wacana tentang pembangunan masyarakat desa, dalam ruang lingkup teoritis maupun praksis, khususnya petani melalui organisasi di tingkat lokal yaitu kelompok tani. Bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan, tentunya hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka memperjelas permasalahan pembangunan di pedesaan, untuk selanjutnya dijadikan masukan dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan masyarakat desa. Penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan bahan acuan untuk melakukan penelitian sejenis yang lebih mendalam.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Latar Sejarah Petani Di Bawah Imperialisme

Imperialisme Belanda di Indonesia dimulai sejak permulaan Abad ke-17 dengan adanya persekutuan dagang (kumpeni) atau biasa disebut VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*). Pada masa ini, Indonesia telah dijadikan tempat transaksi – transaksi dagang dan daerah yang dapat dikeruk keuntungannya (Dekker:1993). Semuanya demi kepentingan negeri induknya sendiri dan tidak ada niat untuk kepentingan pembangunan negara jajahan.

2.1.1 Sistem Pajak Tanah (*Landrente*)

Sesudah masa kekuasaan VOC, muncullah kemudian sistem pajak tanah (*landrente*) dari Gubernur Jenderal Raffles yang memerintah Indonesia sesudah kekuasaan Deandeleis sebagai kemenangan Inggris atas Belanda (Dekker:1993). Petani Indonesia yang menurut anggapan dan kebiasaan feodal adalah sebagai "pemaro tanah raja-raja", oleh Raffles dianggap sebagai penveva tanah kepunyaan Pemerintah yang menggantikan kekuasaan raja-raja. *Landrente* merupakan pajak rakyat tani yang paling berat, hingga tidak jarang terjadi petani menyewakan tanahnya dengan uang sewa yang hanya cukup untuk membayar pajak tanah Raffles tersebut. Seringkali di masa panen tidak baik, hasil panen petani hanya cukup untuk membayar pajak itu. Pemberlakuan sistem pajak tanah oleh Raffles ini di kemudian hari rupanya dipandang tidak efisien (Tauchid:1953).

2.1.2 Sistem Tanam Paksa (*Cultuur Stelsel*)

Selanjutnya untuk mengisi kekosongan kas negeri Belanda, suatu ide yang dipandang baik untuk mendapatkan keuangan dengan segera ialah sistem tanam paksa atau *Cultuur stelsel*. Dimulai sekitar tahun 1830, Gubernur Jenderal Van den Bosch beranggapan bahwa tanah yang dikerjakan rakyat adalah tanah raja yang sudah jatuh ke tangan pemerintah Hindia Belanda. Karena itu pemerintah berhak mengambil sebagian tanah itu yang baik untuk ditanami tanaman bagi kebutuhan Pemerintah Belanda seperti tebu, nila, kopi, teh, coklat dan sebagainya.

Untuk mengerjakan tanah itu rakyat dikenakan kewajiban dengan bekerja tanpa bayaran (*heerendienst*). Berkat kekerasan Van den Bosch yang dibantu oleh pegawai-pegawai baik Belanda maupun pegawai Bumiputera yang berlomba mencari hadiah (*cultureprocemen*) dan bintang-mas, *Culturstelsel* meluas di seluruh Jawa. Pelaksanaan sistem tanam paksa ini menyebabkan petani mengalami bencana yang sangat hebat (Mubyarto:1997).

Di dalam perjanjian atau peraturan *culturstelsel* seharusnya terdapat unsur sukarela, namun di dalam pelaksanaannya berlaku paksaan. Letak dan luasnya tanah ditentukan dengan sewenang-wenang oleh penguasa, tanpa ada artinya bagi istilah perjanjian itu. Demikian pula pada luas tanah bagi sistem tanam paksa, luas tanah menurut perjanjian adalah satu per lima tanah pertanian. Ternyata kemudian diambilnya sampai meliputi satu pertiga dan malahan sampai terjadi semua tanah desa diambilnya. Hal ini disebabkan pemerintah Belanda memerlukan kompleks tanah yang berdampingan dengan tanah lainnya dan dengan demikian akan mudah mengadakan pengawasan, dan

mudah mengadakan pengairan. Pajak tanah yang semestinya dihapuskan untuk lahan tanam paksa dalam prakteknya tetap dikenakan (Dekker:1993).

Akibat sistem tanam paksa dirasakan secara luas oleh petani-petani di desa-desa Jawa. Orang-orang desa berduyun-duyun keluar desanya untuk mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan oleh sistem itu. Lahan pertanian mereka menjadi terlantar dan beralih pengelolaan kepada orang-orang desa yang masih bisa bertahan. Kemelaratan disertai bahaya kelaparan dan wabah penyakit terjadi di sejumlah daerah. Kelaparan yang parah terjadi di Cirebon (1844), sedangkan di Demak (1848), Gerobogan (1849) akibat kelaparan dan wabah penyakit daerah-daerah tersebut kehilangan sebagian besar penduduknya, baik karena mati kelaparan maupun meninggalkan daerah itu (Tauchid:1953).

2.1.3 Politik Pintu Terbuka (*Domeinverklaring*)

Sejak kira-kira tahun 1870 sesudah *Cultuurstelsel*, penjajahan Belanda menempuh jalan baru, memakai cara liberal dalam mengeruk keuntungan dan kekayaan dari negeri jajahannya dengan apa yang disebut "politik pintu terbuka". Keluarlah *Domeinverklaring* 1870 sebagai pernyataan penguasaan atas tanah semua tanah di seluruh negeri yang direbut Belanda dari tangan raja-raja yang ditaklukkannya. Hal ini terutama merujuk pada Pasal 1 *Agrarische Besluit* 1870 yang mengatur *Domeinverklaring* yang mana semua tanah yang tidak dapat dibuktikan sebagai hak *eigendom* (hak milik mutlak) oleh orang lain, adalah *domein* (kepunyaan) negara (Mubyarto:1997).

Melalui peraturan *Domeinverklaring* ini pemerintah kolonial Belanda memiliki kekuasaan memberikan tanah-tanah di seluruh negeri yang dikuasainya kepada kaum

modal asing. Atas undangan pemerintah Belanda banyak pemodal asing dari Inggris, Amerika, Belgia maupun dari pengusaha Belanda sendiri menanamkan modalnya di sektor-sektor pertanian dan pertambangan, seperti karet, kopi, tembakau, tebu, timah dan minyak.

Kalau di masa Tanam Paksa rakyat petani bekerja kepada majikannya yang bernama pemerintah, di saat Politik Pintu Terbuka diterapkan maka rakyat petani hidupnya tergantung kepada majikan yang baru yakni kaum pemilik modal. Penderitaan rakyat selain dari upah yang diterima dari pengusaha sangat rendah, lebih parah lagi yakni hak atas tanah milik mereka dirampas oleh pemilik modal dengan bermacam-macam cara. Meskipun secara hukum hak sewa tanah harus didasarkan atas perjanjian sukarela, namun dalam prakteknya para pemilik modal memakai cara halus lewat pemerintah dan kepala-kepala desa untuk mencari sewa yang diinginkannya. Peraturan *Poenale sanctie* (1880) juga menyumbangkan penderitaan bagi rakyat Indonesia yang menjadi kuli di perkebunan-perkebunan besar. Isi pokok dari peraturan ini bahwa kuli-kuli yang belum selesai memenuhi kontraknya bila melakukan pembangkangan atau melarikan diri dapat dikenakan hukuman pidana.

2.1.4 Akibat Imperialisme Bagi Petani

Dilihat dari satu sisi, ketiga tonggak imperialisme di atas telah melahirkan sejumlah perubahan mendasar bagi tata kehidupan petani. Raffles, misalnya, telah memberikan landasan bagi adanya konsep kepemilikan tanah oleh rakyat dan sistem pajak tanah. Semasa pemerintahannya yang singkat Raffles telah meletakkan dasar-dasar penting bagi perubahan mendasar di Jawa. Antara lain, dia menerapkan pengambilalihan

seluruh tanah di Jawa menjadi milik negara (*domein*) karena menurutnya tidak ada pemilikan tanah pribadi pada masyarakat Bumiputera. Raffles menduga gejala penyerahan upeti kepada para penguasa bumiputera (raja-raja) sebagai bukti pemilikan tanah negara. Yang jelas kebijaksanaan Raffles sangat dipengaruhi oleh sistem sosial *Zamindar* (tuan-tuan) yang ada di India, jajahan Inggris.

Oleh Van den Bosch, kebijakan Raffles tentang pertanahan ini diadaptasi dan digunakan untuk berlangsungnya Tanam Paksa dengan sedikit modifikasi. Seperti, jika pada konsep Raffles, tanah yang diambil negara itu dalam rangka menarik uang petani karena petani menjadi penyewa, maka oleh Van den Bosch dibalik, tanah-tanah dikembalikan kepada rakyat bumiputera. Namun pengembalian tanah-tanah tersebut disertai beban yakni setiap petani yang mendapat atau menguasai tanah wajib menanam tanah-tanah tersebut dengan tanaman dagang konsumsi dunia.

Dari sini petani mulai mengenal tanaman komoditas perdagangan dunia seperti teh, nila, kopi, cengkeh dan tebu. Di samping itu, untuk mendapatkan tanah petani juga diwajibkan menyediakan diri untuk bekerja selama 66 hari pada *onderneming-onderneming* pemerintah. Pewajiban kerja yang diajukan Bosch ini dianggap lebih ringan jika dibanding dengan kewajiban membayar pajak (*landrente*) (Kartodirjo, dalam Cahyono:1991).

Apalagi ketika muncul kesadaran untuk diterapkannya Politik Etis pada tahun 1900-1942. Politik balas budi negeri Belanda terhadap negara jajahannya ini terkenal dengan *triade*-nya yaitu emigrasi, irigasi dan edukasi (Penders, 1984). Ini dimaksud untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan infrastruktur Agro-industri. Dalam rangka program ini pula, didirikan lumbung desa, bank kredit rakyat, dan rumah-rumah



gadai pemerintah serta juga diadakan pengawasan penjualan candu pada rakyat. Dengan melembagakan pelayanan-pelayanan itu, maka beberapa sumber penderitaan petani dapat ditanggulangi, antara lain lintah darat, paceklik, kekurangan modal dan lain sebagainya. Di zaman politik Etis ini pula dilakukan pengaturan khusus mengenai tanah-tanah partikelir, yakni mulai diakuinya hak-hak penduduk atas tanah dan hasil kerjanya (Tauchid:1952) (dalam Fauzi:1999).

Namun di sisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa perluasan usaha-usaha perkebunan modal asing dan tekanan pajak yang besar dan kerja wajib merupakan catatan sejarah buruk dari politik pemerintah Kolonial. Tanam paksa dan politik pintu terbuka merupakan dua macam metode untuk mengeruk keuntungan dari tanah Indonesia. Akibatnya bagi penghidupan rakyat petani Indonesia sangat besar, terutama dengan semakin sempitnya lahan pertanian sebagai alat produksi yang utama bagi petani. Dengan tanah pertanian yang sangat kecil dan masih juga diganggu oleh persewaan tanah oleh *onderneming* (perkebunan), pertanian rakyat di Jawa hanya pada penanaman bahan makanan (padi, jagung, ketela pohon, kedelai, kacang tanah, ubi jalar). Hal ini selain dengan adanya kewajiban pajak yang berat, faktor yang lain terutama tidak adanya modal dan ketakutan akan resiko kerugian akibat gagal panen. Rendahnya produksi pertanian rakyat (bahan makanan dan bahan perdagangan) demikian ini menyebabkan banyak petani terpaksa mencari penghidupan di lapangan lain (kuli perkebunan).

Fenomena ekonomi akibat dijalankannya sistem tanam paksa ini melahirkan apa yang disebut Clifford Geertz sebagai dualisme ekonomi (*dual economy*). Dia menyimpulkan bahwa selama periode Sistem Tanam Paksa (1830-1870) terjadi dua pola produksi pertanian. Di sektor pertama, adalah perekonomian modern yang merupakan

sektor padat modal dimana menghasilkan produksi pertanian untuk ekspor dan pasaran dunia. Sektor kedua sebagai sektor pribumi atau tradisional merupakan sektor padat karya yang mengusahakan tanaman pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kedua sektor ini berdiri terpisah satu sama lain, dan keduanya sama-sama hidup selama masa pemerintahan kolonial Belanda. Dualisme sektor ekonomi modern-tradisional dalam masyarakat petani demikian berperan dalam pembentukan involusi pertanian. Salah satu perwujudan gejala involusi ini adalah semakin parahnya kemiskinan terbagi (*shared poverty*) (Kano dalam Fawzi dan Juliantoro:2000).

Gejala terakhir ini mencapai puncaknya pada saat diterapkan politik pintu terbuka oleh kolonial Belanda. Kehadiran perkebunan digambarkan telah memiliki peranan penting dalam proses eksploitasi dan ekstraksi kolonial. Eksploitasi sumber daya tanah dan tenaga kerja yang melimpah di sektor tradisional untuk penyelenggaraan produksi pasaran dunia menjadi kebijaksanaan politik kolonial. Apalagi pendirian perkebunan juga sering diikuti kecenderungan pengambilalihan tanah-tanah milik penduduk pribumi, dan perubahan basis ekologi pertanian subsisten yang ada sebelumnya (Kartodirdjo:1991).

Di dalam struktur ekonomi yang timpang demikian, dua macam sektor ekonomi yang sangat berbeda sekali wataknya berhadapan satu sama lain. Sektor yang pertama berupa struktur ekonomi yang modern yang secara komersial lebih bersifat canggih (*sophisticated*), banyak bersentuhan dengan lalu lintas perdagangan internasional, dibimbing oleh motif-motif memperoleh keuntungan yang maksimal, dan di dalam konteks masyarakat kolonial hampir sepenuhnya dikuasai oleh pemilik modal asing yang terutama berasal dari daerah-daerah metropolitan dimana pusat kekuasaan pemerintahan dan ekonomi berada (van der Kroef dalam Nasikun:1995). Berhadapan dan terpisah dari

sektor yang pertama, kita jumpai sektor yang kedua berupa struktur ekonomi pedesaan yang bersifat tradisional.

Menurut teori ekonomi modern, sektor tradisional merupakan struktur ekonomi yang berorientasi kepada sikap-sikap konservatif, diimbangi oleh motif-motif untuk memelihara keamanan dan kelanggengan sistem yang sudah ada. Pelaku ekonomi tipe ini tidak berminat pada usaha-usaha untuk memperoleh keuntungan dan penggunaan sumber-sumber secara maksimal, lebih berorientasi pada motif-motif untuk memenuhi kepuasan dan kepentingan-kepentingan sosial daripada menanggapi rangsangan-rangsangan dari kekuatan internasional, serta kurang mampu mengusahakan pertumbuhan perdagangan secara dinamis.

Kecuali sebagian kecil orang-orang yang telah memperoleh pengaruh kehidupan Barat yang modern, maka sebagian (sangat) besar rakyat Indonesia hidup di dalam sektor yang kedua ini. Sekalipun apa yang dilukiskan oleh Boeke (dalam Nasikun:1997) merupakan gambaran masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan Hindia Belanda, namun oleh karena daya pertumbuhan sektor ekonomi modern jauh mengatasi daya pertumbuhan sektor ekonomi tradisional, maka sisa-sisa pertumbuhannya masih dapat kita saksikan dengan jelas pada masa kini. Ingat saja kenyataan bahwa lebih dari 80 persen penduduk Indonesia masih tinggal di daerah pedesaan.

Perbedaan antara kedua sektor tersebut secara integratif berakar di dalam keseluruhan struktur masyarakat Indonesia yang mengandung perbedaan yang tajam antara struktur masyarakat kota yang bersifat modern, dengan struktur masyarakat pedesaan yang bersifat tradisional. Jika sektor ekonomi modern terutama kita jumpai di dalam masyarakat kota, maka sektor ekonomi tradisional terutama kita jumpai di dalam

masyarakat desa. Struktur kemasyarakatan yang demikian ditandai oleh adanya kesenjangan di dalam hampir semua aspek kehidupan.

Edward Shills (dalam Nasikun:1997) menggambarkan bahwa masyarakat yang demikian ditandai oleh adanya jurang pemisah antara sejumlah kecil orang-orang yang kaya raya dengan sejumlah besar warga masyarakat yang melarat. Antara sejumlah kecil orang-orang yang berpendidikan dengan sejumlah besar anggota masyarakat yang kurang berpendidikan. Antara sejumlah kecil orang-orang kota dengan amat banyak warga masyarakat desa. Antara sejumlah kecil orang-orang modern dengan sejumlah besar warga masyarakat yang berpandangan tradisional. Antara sejumlah kecil orang-orang yang berkuasa dengan sejumlah amat besar orang-orang yang dikuasai. Pendek kata, jurang perbedaan tersebut terjadi antara sekelompok orang-orang yang bergairah, penuh aspirasi, relatif kaya, berpendidikan serta berpengaruh dengan orang-orang desa yang kurang bergairah, melarat, kurang berpendidikan serta tidak berdaya.

2.2 Konsep Pembangunan Pedesaan

Arti kata pembangunan sebagaimana sering dipergunakan dewasa ini, mengacu pada suatu upaya peningkatan kemampuan mencapai percepatan pertumbuhan ekonomi, perbaikan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat dan untuk mencapai tujuan politik sebuah bangsa. Berlandaskan asumsi tersebut, maka pembangunan pedesaan (*rural development*) dipandang sebagai sebuah proses yang didesain untuk meningkatkan kondisi perekonomian, sosial dan politik masyarakat miskin pedesaan (Lawas:78 dalam Rola:1979).

Di masa lalu, bahkan mungkin berlaku sampai sekarang, banyak perencana dan pembuat kebijakan berpikiran bahwa proses modernisasi kota akan secara otomatis membawa keuntungan penyebaran modernisasi dari perkotaan ke pedesaan. Dengan pemusatan investasi industri dan dukungan infrastruktur di kota-kota besar, harapan besar yang muncul adalah bahwa ketimpangan antar wilayah mampu diperkecil sehingga pada akhirnya tidak terjadi kesenjangan antara wilayah pusat perkotaan dan wilayah pinggiran pedesaan. Pada tataran teori, hal ini mengacu pada suatu model berimbang (*equilibrium model*) dimana diyakini bahwa keseluruhan proses atau aktifitas ekonomi secara otomatis mampu menghasilkan suatu tingkat pertumbuhan optimal sepanjang garis pemerataan pembangunan. Pemikiran yang mengarahkan upaya pembangunan demikian pada dasarnya bertumpu pada paradigma optimalisasi pendapatan perkapita (GNP). Diyakini bahwa tingginya GNP akan mendorong penyebaran (*spread*) atau tetesan ke bawah (*trickle down*) daripada hasil-hasil pembangunan dari pusat-pusat urban menuju sektor-sektor pedesaan.

Namun demikian, persoalan yang muncul ketika kota-kota besar telah berkembang pesat adalah lahirnya gejala efek balik (*backwash effects*). Gunnar Myrdal menunjukkan adanya efek balik ini saat perkembangan di sektor yang satu menghisap sumber daya dari sektor yang lain dan dengan demikian membuatnya semakin miskin (Goldthorpe: 1992). Bersama masifnya investasi pada sektor industri dan fasilitas infrastruktur di wilayah perkotaan, kesemuanya mengintensifkan akumulasi kekuatan politik dan pemerintahan sekaligus perluasan sumber daya ekonomi.

Meminjam argumen Bias Urban (*urban bias*) dari Michael Lipton, akumulasi kekuatan politik, dan ekonomi demikian memberikan peluang dominasi elit urban atas

lembaga-lembaga pemerintahan, partai politik, hukum, pelayanan masyarakat, perdagangan, pendidikan, organisasi bisnis, dan sebagainya. Ditambahkan Lipton, kekuatan elit urban bukan hanya bersumber dari peran ekonomi semata, namun juga karena kemampuan mereka dalam mengorganisir, memusatkan dan mengawasi sumber daya yang tersedia. Konsekuensinya, wilayah perkotaan menjadi magnet yang menarik tenaga kerja, modal, material dan kaum pengusaha dari wilayah pinggiran ke wilayah pusat atau perkotaan.

Akhirnya, tendensi umum yang sering nampak adalah semakin berkurangnya sumber daya pembangunan di wilayah pedesaan. Masyarakat pedesaan, yang jumlahnya jauh lebih besar daripada masyarakat perkotaan, berada dalam kemiskinan, dan tidak terorganisir. Kesemua itu menyebabkan di antara mereka pada tingkatan lokal terlibat konflik-konflik antar kelompok. Pada tingkatan nasional, mereka berupaya keras memasuki dan turut menikmati sumber daya sekaligus hasil pembangunan di perkotaan, tanpa ada maksud memanfaatkannya demi pemberdayaan sektor pedesaan (Lipton: 1982).

Seiring berlangsungnya kecenderungan *urban bias* di atas, sebuah fenomena dualisme pembangunan terjadi di sektor pedesaan. Adopsi teknologi modern pada usaha pertanian cenderung hanya menguntungkan para petani menengah dan petani kaya. Akibatnya, petani kecil (*gurem*) tertinggal di belakang dengan bidang usaha terbatas pada pertanian subsisten (*subsistence foodcrop agriculture*). Sedangkan mereka yang tidak mampu lagi bertahan dengan kondisi pertaniannya bermigrasi ke wilayah perkotaan.

Ketika pola pembangunan demikian semakin mengakar, fenomena dikotomi antara kaum kaya dan kaum miskin baik di desa maupun di kota semakin menggejala. Di pedesaan, muncul kelompok kecil masyarakat yang menikmati berbagai fasilitas

pertanian berteknologi tinggi. Di perkotaan, lahirlah segelintir masyarakat yang menikmati buah hasil aktifitas industri modern. Keadaan dua kelompok masyarakat kaya ini, sangat kontras dengan kondisi sekelompok besar masyarakat di pedesaan maupun perkotaan yang hidup dalam cengkeraman kemiskinan. Singkatnya, proses dualisme pembangunan semakin menampakkan secara jelas meningkatnya kesenjangan pendapatan, pengangguran, kemiskinan dan terutama ketidakmampuan sebagian besar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Menyikapi sejumlah kekurangan paradigma pembangunan pedesaan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi, muncullah sebuah paradigma pembangunan pedesaan integratif (*Integrated Rural Development, IRD*). Pendekatan pembangunan ini dilandasi pemikiran bahwa peningkatan kondisi hidup masyarakat miskin di desa hendaknya melibatkan suatu pengetahuan akan berbagai dimensi masyarakat setempat. Dengan kata lain, strategi pembangunan pedesaan yang dimaksudkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan, seyogyanya mengikutsertakan segenap pendekatan sistem dalam upaya peningkatan produktifitas, lapangan kerja dan berbagai fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar manusia (Lawas:1978). Pada intinya, strategi IRD mensyaratkan sebuah proses pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dimana melibatkan bukan hanya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan sosial, tetapi juga senantiasa mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi untuk menggerakkan seluruh potensi mereka. Dengan cara demikian, akan terwujud kemandirian (*self-reliance*) pada penduduk desa.

Cara pandang pembangunan demikian sejalan dengan ungkapan Myrdal bahwa suatu analisis ekonomi yang memisahkan faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor non

ekonomi tidak berguna dan harus diganti dengan pembedaan antara faktor yang relevan dengan faktor yang tidak relevan atau antara faktor yang lebih relevan dengan faktor yang kurang relevan. Untuk menganalisis kondisi kemiskinan atau kekayaan suatu negara atau suatu wilayah dalam negara, variabel yang digunakan adalah variabel ekonomi dan non ekonomi yang relevan dengan kemiskinan atau kekayaan (Panjaitan:2000). Myrdal secara konsisten menekankan pengaruh sikap, lembaga, dan kebijakan atau politik atas jalannya pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tidak harus dipahami sebagai hasil kekuatan impersonal yang buta, akan tetapi sebagian ditentukan oleh pilihan dan kebijakan secara sadar, khususnya dari pihak pemerintah (Goldthorpe:1992).

Layaknya Myrdal, Kaum Institusionalis lain seperti Paul Streeten juga memandang pemisahan antar aspek-aspek pembangunan yang dalam kenyataannya saling berkaitan sebagai "isolasi tidak sah". Menurutya, adalah menyesatkan untuk memisahkan investasi dalam perbaikan pertanian dari pengeluaran untuk kesenatan dan bahkan perbaikan kelembagaan. Banyak keuntungan potensial dari irigasi menjadi mubazir karena adanya sistem kepemilikan tanah yang meniadakan insentif maupun kesempatan bagi petani untuk memanfaatkan air (Goldthorpe:1992).

Sementara itu, paradigma pembangunan pedesaan integratif (IRD) juga dikembangkan oleh *Asian Center for Development Administration* (ACDA). Mereka memandang keseluruhan upaya pembangunan pedesaan sebagai sebuah proses yang mengarah pada peningkatan terus menerus kapasitas masyarakat desa untuk mengendalikan lingkungan mereka, disertai perluasan distribusi keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan pengendalian tersebut. Pertama, hal ini menyiratkan bahwa pembangunan pedesaan harus dipandang sebagai sebuah proses peningkatan kapasitas

masyarakat desa untuk mengendalikan lingkungan mereka, dimana ini lebih dari sekedar pembangunan ekonomi maupun pertanian di desa. Konsepsi semacam ini mendorong pembangunan simultan atau serempak di semua aspek kehidupan desa: sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Kedua, proses pembangunan pedesaan haruslah terus menerus mengupayakan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mampu mempengaruhi seluruh lingkungan sekitar. Mendorong mereka menjadi inisiator dan pengawas perubahan lingkungan, ketimbang sebagai obyek pasif atas berbagai manipulasi dan pengendalian eksternal. Ketiga, konsep ini mencerminkan semakin besarnya penekanan pada pemerataan pembagian keuntungan hasil kemajuan teknologi, dan semakin pentingnya mendorong partisipasi kelompok miskin dan lemah dalam proses pembangunan desa.

Pada tataran tujuan operasional, kiranya pendapat Fredericks berikut ini bisa menjadi salah satu acuan paradigma pembangunan di atas;

1. *Tujuan produktifitas (productivity goals)*: meningkatkan produktifitas melalui penerapan teknologi pembangunan yang sesuai dengan kondisi pedesaan.
2. *Tujuan keadilan (equity goals)*: memperbesar pengawasan atas keuntungan dari meningkatnya produktifitas demi mewujudkan pembagian hasil pembangunan yang lebih adil.
3. *Tujuan penciptaan lapangan kerja (employment generation goals)*: pembangunan atau pemasyarakatan teknologi yang bersifat padat karya, termasuk pemberdayaan industri kecil yang terutama diarahkan untuk memaksimalkan pendayagunaan berbagai sumber daya desa.

4. *Tujuan akses (access goals)*: demokratisasi pelayanan sosial dasar yang mampu menjangkau kalangan miskin, sekaligus pengembangan sistem yang efektif dalam pemberian berbagai pelayanan sosial tersebut.
5. *Tujuan kontrol (control goals)*: peningkatan kapasitas penduduk desa agar secara kreatif mampu mengawasi lingkungan sekitar, dan menempatkan mereka sebagai pelaku utama proses pembangunan.

Lebih jauh Samonte juga memberikan suatu konsepsi tentang IRD yang lebih memusatkan pada suatu aktifitas pembebasan. Menurutnya, pembangunan pedesaan integratif merupakan upaya membebaskan energi masyarakat desa, khususnya kaum miskin, sehingga mereka mampu meningkatkan kapasitas dan komitmen untuk mengembangkan, mengorganisir, dan menata diri mewujudkan suatu kualitas hidup yang lebih tinggi. Secara lebih spesifik Samonte menjabarkan sasaran IRD sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktifitas ekonomi dengan titik berat pada peningkatan produktifitas pertanian.
2. Menyediakan lapangan kerja yang lebih besar.
3. Mendorong terwujudnya distribusi pendapatan yang lebih adil.
4. Menyediakan sistem yang lebih efektif dalam pemberian pelayanan sosial termasuk pendidikan, kesehatan, perumahan dan perangkat lain mewujudkan kesejahteraan sosial.
5. Memperbesar tingkat partisipasi masyarakat desa dalam pembuatan keputusan, khususnya berkenaan dengan pembangunan di tingkat lokal.

Apabila ditelusuri, baik konsep pembangunan pedesaan dari Fredericks maupun Samonte pada intinya memiliki banyak kesamaan. Dalam pandangan keduanya IRD

merupakan konsep dasar pembangunan yang memusatkan pada pemberantasan kemiskinan. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, terutama masyarakat miskin. Konsep ini membutuhkan komitmen dan kerja keras dari pemerintah, masyarakat maupun kalangan lembaga swadaya masyarakat untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

2.3 Partisipasi Dalam Pembangunan

Berlandaskan konsep pembangunan pedesaan intergratif (IRD) di atas, dimensi yang penting dipertimbangkan adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Setidaknya ada dua titik tolak pemikiran dikemukakan Fernandes dan Tandon berkenaan dengan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pertama, paradigma pembangunan jangan sampai menempatkan masyarakat cenderung sebagai obyek saja dan kurang terlibat dalam perumusan masalah dan penyusunan kebijakan pembangunan. Masalah pembangunan seringkali dirumuskan oleh para pakar pembangunan. Akibatnya, perumusan kebijakan pembangunan sering tidak sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi masyarakat. Sehingga tidak mustahil kebijakan yang disusun kemudian kurang dapat memecahkan masalah pembangunan yang dihadapi masyarakat pedesaan.

Kedua, dalam penerapan kebijakan, masyarakat hanya sebagai orang yang menerima bukan sebagai pelaku dan pelaksana, sehingga acapkali kebijakan kurang dipahami dan kurang dapat diterima oleh masyarakat. Masyarakat pedesaan pada umumnya tidak mengetahui apa tujuan dan apa yang ingin dicapai dari program yang dilaksanakan. Masyarakat seringkali kurang respon, masa bodoh atau menolak secara tidak langsung kebijakan itu. Maka masyarakat pedesaan tidak mengalami perubahan

yang berarti setelah ada program pembangunan atau penerapan kebijakan (Chambers:1992).

Dalam pandangan James C. Scott, sikap kurang respon dan masa bodoh demikian disebutnya sebagai “bentuk perlawanan sehari-hari petani” terhadap suatu kebijakan pemerintah. Sebuah pertarungan jangka panjang yang prosaik, antara petani dan pihak penguasa maupun pihak lain yang merugikan mereka. Kebanyakan bentuk perlawanan ini hampir saja menimbulkan tantangan kolektif langsung. Di sini senjata mereka sebagai kelas yang tak berdaya dan selalu kalah, seperti misalnya memperlambat pekerjaan, bersikap pura-pura, pelarian diri, pura-pura memenuhi permohonan, pencurian, pura-pura tidak tahu, menjatuhkan nama baik orang, pembakaran, penyabotan dan sebagainya. Mereka hampir tidak membutuhkan koordinasi atau perencanaan: menggunakan pemahaman inplisit serta jaringan informal; sering mengambil bentuk mengurus diri sendiri, dan mereka secara khas menghindari konfrontasi simbolis yang langsung dengan kekuasaan. Ditandakan Scott, dengan memahami bentuk-bentuk biasa dari perlawanan ini berarti memahami banyak dari apa yang secara historis dilakukan oleh kelas petani, untuk membela kepentingan mereka terhadap orde-orde penguasa yang progresif maupun yang konservatif (Scott:2000).

Belajar dari pengalaman demikian, persoalan dasar yang harus dipahami adalah kenyataan bahwa ada satu kebutuhan untuk melibatkan masyarakat, mendorong inisiatif dan kapasitas mereka untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan. Dalam hal ini, meski telah muncul kesadaran akan pentingnya pendekatan partisipatif, menurut Hollnsteiner, dalam prakteknya terjadi sejumlah penafsiran dalam pemaknaannya; (1) Para perencana pembangunan bertindak demi kepentingan masyarakat; (2) para

pemimpin lokal dalam birokrasi bertindak sebagai perwakilan rakyat; (3) penyelenggaraan konsultasi oleh para pekerja pembangunan bersama masyarakat dari tahap konseptualisasi perencanaan sampai tahapan implementasi; dan (4) masyarakat memilih perwakilannya yang bekerja di dalam sebuah dewan pengambilan keputusan (Rola:1979).

Selanjutnya Dionisia A. Rola mengungkapkan bahwa dari keempat penafsiran tersebut, penafsiran pertama seringkali mendominasi proses pembangunan. Di sini, para perencana pembangunan bertindak atas nama kepentingan masyarakat dari tahap perumusan kebutuhan sampai tahap identifikasi program dan proyek untuk memecahkan masalah masyarakat tersebut. Sedangkan masyarakat hanya dilibatkan pada saat pelaksanaan atau implemetasi program pembangunan. Dengan demikian, pertanyaan yang mengemuka adalah: *Apakah partisipasi berarti masyarakat menjadi penerima paket pembangunan sebagai usaha memenuhi kebutuhan mereka, dimana kebutuhan tersebut diidentifikasi dan dirumuskan oleh perencana pembangunan untuk kepentingan mereka?*

Bagi Rola, partisipasi harus diletakkan dalam segala sendi dan tahapan pembangunan. Pada prinsipnya, dalam sebuah masyarakat, partisipasi masyarakat bawah (*grass root*) melibatkan suatu ekspresi atau kehendak kolektif martabat manusia, penegakkan hak asasi manusia, dimana masyarakat melalui suatu proses demokratis, menentukan arah dan prangkat untuk mewujudkan tatanan hidup yang lebih baik. Kesemua ini bisa dijabarkan dalam satu kerangka pendekatan partisipatif dalam pembangunan politik, ekonomi dan sistem pelayanan kesejahteraan sosial.

Sedangkan bila mengacu pada rumusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), partisipasi dimaknai sebagai pelibatan secara penuh dan aktif berbagai lapisan masyarakat di dalam: (1) proses pengambilan keputusan dalam kerangka penetapan tujuan pembangunan, dan pengalokasian sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tersebut. Dan (2) pelaksanaan secara sukarela proyek atau program pembangunan (PBB:1975). Berkaitan dengan aspek kesukarelaan (*Voluntary*), Deepa Narayan mengungkapkan bahwa partisipasi merupakan suatu proses sukarela dimana masyarakat termasuk yang kurang beruntung (pendapatan, gender, suku, pendidikan) mempengaruhi atau mengendalikan pengambilan keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka (Parwoto:2000).

Pencermatan terhadap aspek-aspek dalam partisipasi demikian membawa Sherry Arntein pada suatu penjenjangan partisipasi dalam delapan tingkatan. Jenjang atau tingkat terendah adalah "manipulasi" atau "rekayasa sosial" dan yang tertinggi adalah bila terjadi "kontrol sosial" atau "pengendalian oleh masyarakat" (Parwoto:2000).

Kemudian delapan jenjang tersebut dikelompokkan menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

Kelompok yang paling rendah adalah kelompok non partisipasi, termasuk di dalamnya secara berjenjang mulai dari yang terendah adalah:

- a) Manipulasi/rekayasa sosial, yaitu pendekatan yang mendudukkan masyarakat sebagai obyek pembangunan dan dimanipulasi agar sesuai dengan harapan atau program yang telah dirumuskan oleh pengambil keputusan (pemerintah).

- b) Terapi, yaitu pendekatan yang mendudukan masyarakat sebagai pihak yang tidak tahu apa-apa (orang sakit) dan harus percaya terhadap apa yang diputuskan oleh pemerintah (dokter).

Kelompok menengah adalah yang memiliki Kadar Hadiah (Tokenism), termasuk di dalamnya secara berjenjang mulai dari yang terendah adalah:

- c) Informasi, yaitu pendekatan pembangunan dengan pemberian informasi akan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah seperti pemasyarakatan program.
- d) Konsultasi, yaitu pendekatan pembangunan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkonsultasi mengenai apa yang akan dilakukan oleh pemerintah di lokasi yang bersangkutan.
- e) Penentruman, yaitu pendekatan pembangunan dengan misalnya merekrut tokoh-tokoh masyarakat untuk duduk dalam panitia pembangunan sebagai upaya menentramkan masyarakat tetapi keputusan tetap di tangan pemerintah.

Ketiga pendekatan ini tetap mendudukan masyarakat sebagai obyek dimana kewenangan pengambilan keputusan tetap berada di tangan pemerintah

Kelompok tertinggi adalah yang memiliki Kadar Kedaulatan Rakyat, termasuk di dalamnya secara berjenjang mulai dari yang terendah adalah:

- f) Kerjasama, yaitu pendekatan pembangunan yang mendudukan masyarakat sebagai mitra pembangunan yang setara sehingga keputusan dimusyawarahkan dan diputuskan bersama.
- g) Pendelegasian, yaitu pendekatan pembangunan yang memberikan kewenangan penuh kepada masyarakat untuk mengambil keputusan yang langsung menyangkut kehidupan mereka.

- h) Kontrol sosial, yaitu pendekatan pembangunan dimana keputusan tertinggi dan pengendalian ada di tangan masyarakat.

Menurut Arnstein, partisipasi baru benar-benar terjadi bila memiliki kadar kedaulatan rakyat yang cukup dan kadar kedaulatan rakyat tertinggi adalah terjadinya kontrol sosial (*social control and citizen control*) dimana keputusan penting dan pengendalian pembangunan ada di tangan rakyat. Di dalam pola pembangunan partisipatif ini peran pelaku eksternal (ahli, pemerintah, pekerja sosial), adalah sebagai fasilitator atau katalis dalam suatu proses yang sepenuhnya dikendalikan masyarakat. Keberadaan mereka bukan untuk mengambil alih pengambilan keputusan, melainkan untuk menunjukkan konsekuensi dari tiap keputusan yang diambil masyarakat. Dengan kata lain, menjadi fasilitator dalam proses pengambilan keputusan sehingga keputusan yang diambil akan rasional dan efektif.

2.4 Konsep Dasar Organisasi Sebagai Saluran Partisipasi

Cari Gersham berpendapat bahwa apabila demokrasi hendak berhasil di negara-negara sedang berkembang, maka harus ditemukan cara untuk membawa mereka yang tersingkir dan yang tercerabut hak-haknya ke dalam proses ekonomi dan politik. Untuk itu, organisasi-organisasi menengah dan kemasyarakatan dapat dimanfaatkan. Walaupun bukan organisasi politik, organisasi masyarakat seperti organisasi petani, organisasi buruh dan organisasi nelayan dapat berperan aktif dalam mengikutsertakan kaum miskin dan kaum yang tersingkirkan lainnya dalam proses penciptaan opini publik. Berbagai kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan dapat diperjuangkan dengan memanfaatkan berbagai organisasi

kemasyarakatan. Menurut Gersham, Mereka yang selama ini disebut sebagai “mayoritas diam (*silent majority*)” harus ikut berbicara dalam wacana publik tentang apa yang perlu dilaksanakan negara, tentang apa kebijakan pemerintah yang terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari.

Kesenjangan pengaruh antara “minoritas vokal” dan “mayoritas diam” harus dikurangi, sehingga gerak langkah negara disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Pemikiran ini sesuai dengan pendapat Maria Rosa S. de Martini. Ia menyatakan bahwa dalam masyarakat demokratis, organisasi-organisasi menengah memainkan peranan yang sangat menentukan dalam pembentukan kehidupan politik (Panjaitan:2000).

Berlandaskan konsep masyarakat demokratis, dalam konteks paradigma pembangunan partisipatif, pengembangan organisasi masyarakat merupakan sebuah strategi membangun partisipasi masyarakat. Dalam hal ini masyarakat bawah harus diorganisir, sehingga mereka mampu berpartisipasi secara berarti dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Hal ini juga mempertimbangkan agar masyarakat bawah mampu berpartisipasi pada tingkatan partisipasi yang lebih tinggi, yakni ketika organisasi menjadi sebuah lembaga perwakilan yang menyuarakan kepentingan masyarakat bawah (anggota) (Rola:1979).

Dennis Murphy lebih jauh memandang organisasi masyarakat sebagai wadah artikulasi kepentingan rakyat dan saluran yang efektif untuk kontrol sosial (Murphy:1989). Melalui organisasi masyarakat dimungkinkan terjadinya penguatan (*empowerment*) masyarakat yakni ketika organisasi tersebut berakar dari struktur

masyarakat yang ada, berlaku sebagai kelompok kepentingan (*interest group*) yang mempunyai visi bersama sebagai landasan ikatan pemersatu.

Sejalan dengan pandangan Murphy yang menekankan pada perwujudan kelompok kepentingan, Parwoto (2000) mengemukakan bahwa organisasi masyarakat adalah organisasi dimana kepentingan bersama menjadi utama dan hanya karena itulah organisasi masyarakat menjadi penting dan mencapai esensinya. Oleh karena itu organisasi ini harus mewakili berbagai kepentingan dan unsur-unsur masyarakat dan merupakan rekonsiliasi berbagai kepentingan yang berbeda. Jadi pada dasarnya pengorganisasian harus mencakup seluruh unsur masyarakat dari berbagai strata ekonomi dan sosial, lintas kemajemukan. Bila hal ini tidak dilakukan maka yang terjadi hanyalah suatu organisasi masyarakat yang eksklusif yang hanya menimbulkan purba wasangka.

Aspek pentingnya organisasi masyarakat juga terkait dengan pandangan bahwa kemiskinan masyarakat bawah tidak semata-mata persoalan ekonomi. Bagi Robert Chambers, kemiskinan bukan sekadar persoalan kurangnya atau akses yang rendah terhadap lalu lintas uang dan barang. Tetapi kemiskinan sesungguhnya terkait dengan empat dimensi yang lain, yaitu kerentanan, kelemahan jasmani, tingkat isolasi dan ketidakberdayaan atau yang diistilahkan Chambers dengan *integrated poverty* (Suyanto:1995).

Untuk karakter kemiskinan demikian, Mary Lou Alcid (dalam Rola:1979) mengusulkan konsep belajar berdasar pengalaman (*experiential learning*). Metode belajar ini menurutnya sangat kondusif dilaksanakan di dalam organisasi masyarakat sebagai suatu mekanisme menggugah partisipasi masyarakat bawah. Metode belajar berdasar pengalaman ini melandaskan diri pada pemikiran bahwa ketika masyarakat mengalami

dan menyadari nilai-nilai partisipasi tertentu, mereka dengan mudah menginternalisasi dan mencoba mempraktekannya.

Dengan metode ini, menurut Alcid, organisasi masyarakat menjadi forum dimana masyarakat bermusyawarah secara demokratis, dan bersama-sama memutuskan perencanaan maupun pelaksanaan kerja tertentu. Ketika masyarakat mengalami proses pendidikan di dalam organisasi sedemikian rupa, mereka mampu mengembangkan wawasan kritis, nilai kebersamaan dan suasana kerja demokratis. Berkembangnya komitmen di antara anggota juga dipandang penting, terutama untuk mempertahankan tingkat partisipasi. Aspek terakhir ini bisa juga melalui pelibatan masyarakat dalam aktifitas-aktifitas nyata untuk memecahkan berbagai kebutuhan dan masalah mereka. Paling tidak, melalui organisasi, masyarakat mulai menyadari bahwa kerja bersama (*collective action*) berarti kekuatan (*power*).

BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL

Secara garis besar, penelitian ini berupaya memperoleh gambaran mengenai organisasi masyarakat desa yang berwujud kelompok tani sebagai saluran partisipasi petani dalam pembangunan desa. Untuk tujuan penelitian tersebut maka dilaksanakan sebuah penelitian yang bersifat kualitatif dengan metode eksploratif deskriptif berkenaan dengan aktifitas penyelenggaraan kelompok tani, potensi sosial kelompok tani bagi pembangunan desa, dan pola-pola partisipasi kelompok tani pada proses pembangunan di desa.

Petani dalam kerangka konsep penelitian ini mengacu pada definisi petani yang dijelaskan oleh Barrington More Jr. dan Eric R. Wolf (dalam Tjondronegoro dan Wiradi:1984). Keduanya memandang petani sebagai satuan komunitas yang memiliki kekhususan kultural yang pekerjaannya bercocok tanam untuk menghasilkan pangan dalam rangka memenuhi kebutuhan kalori minimum rumah tangganya. Wolf membedakan antara petani (*peasant*) dan pengusaha pertanian (*farmer*). Pengusaha pertanian merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di sektor pertanian, memperoleh *input* produksi dan menjual hasil produksi di pasar. Sedangkan petani tidak melakukan usaha dalam artian ekonomi klasik demikian, tetapi hanya mengelola sebuah rumah tangga, bukan sebuah perusahaan bisnis.

Sedangkan kelompok tani di sini dipandang sebagai organisasi masyarakat yang secara sosiologis merupakan unit sosial yang terdiri dari sejumlah individu yang mempunyai hubungan saling bergantung sesuai dengan status dan peranannya. Secara

tertulis maupun tidak terdapat suatu norma yang mengarahkan tingkah laku para anggotanya. Kelompok bukan sekedar sekumpulan orang-orang. Anggota kelompok mengadakan interaksi satu sama lain di dalam kelompok, mempunyai tujuan yang memberi arah gerak kelompok maupun anggota kelompok untuk tercapainya tujuan tersebut, membentuk norma yang mengatur ikatan dan kegiatan anggota kelompok serta mengembangkan peranan dan jaringan ikatan perorangan di dalam kelompok.

Selanjutnya suatu kelompok kecil dapat dicirikan sebagai berikut; Para anggotanya selalu mengadakan hubungan tatap muka secara berkala, adanya tujuan atau perasaan dan sikap bersama, adanya serangkaian norma-norma, adanya peranan dan status dan rasa ketergantungan satu sama lain. Kelompok dalam hal ini dapat juga diartikan sebagai sekumpulan orang-orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.

Sebagai suatu kesatuan masyarakat kecil yang berdaya hidup, kelompok tani ini dapat disebut sebagai *solidarity* (dari Bahasa Latin: *Sodalis*) yang mencerminkan suatu kesatuan masyarakat kecil tanpa adanya hubungan kekeluargaan sebagai ciri khas, tetapi hubungan kepentingan, tanpa menghapus hubungan primer (Harry: 1990 dalam Sojogvo et al: 1994).

Selanjutnya, sebagaimana tergambar pada Gambar. 1 pada halaman terakhir Bab ini, kelompok tani merupakan perwujudan agregasi kepentingan petani menghadapi berbagai realitas lingkungan, sosial, ekonomi dan politik yang melingkupi mereka. Kelompok tani memiliki sejumlah fungsi yang merupakan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan bersama-sama pemerintah desa. Fungsi-fungsi tersebut adalah;

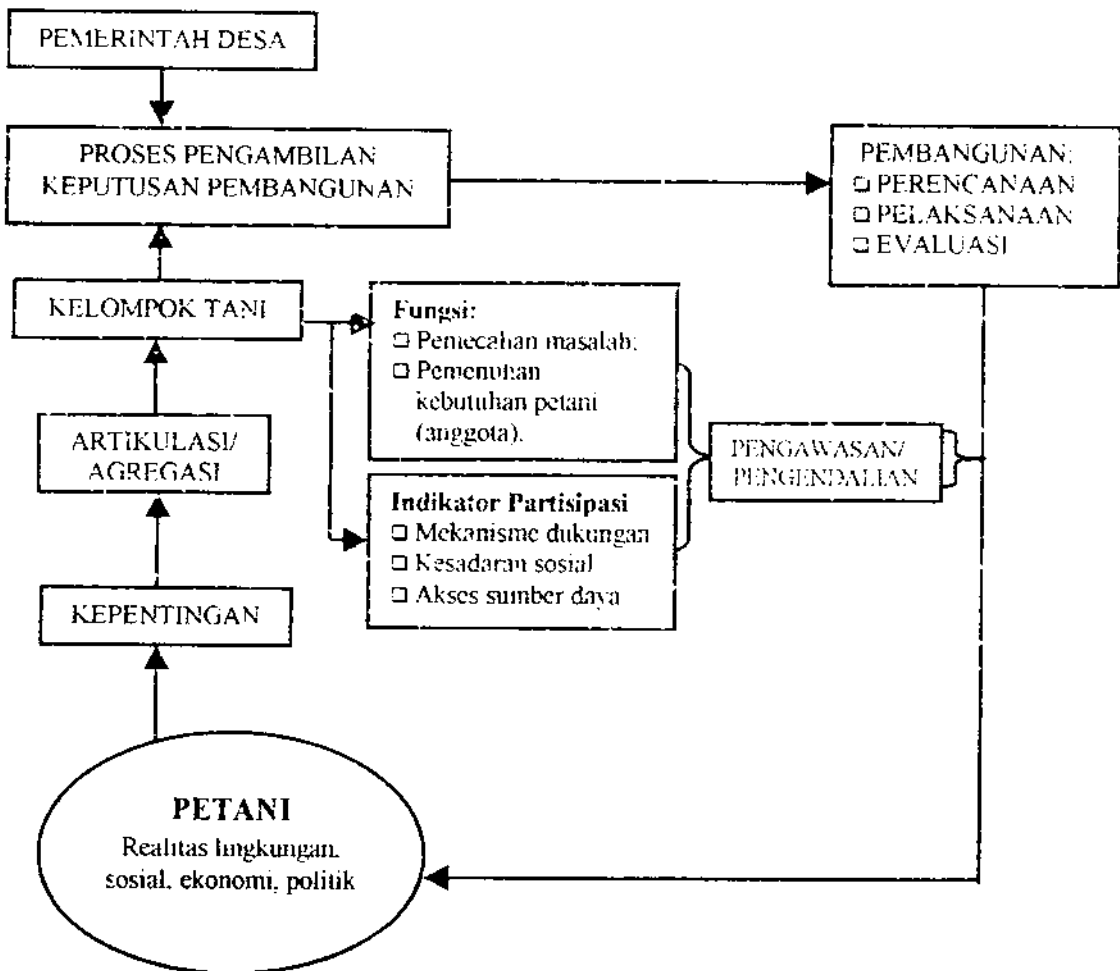
1. Secara politik menjadi media (saluran) bagi petani untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pembangunan yang menyangkut hidup mereka, dan mempertahankan diri dari segala bentuk intervensi eksternal yang merugikan;
2. Secara sosial, menjadi wahana bagi petani untuk mengembangkan kehidupan sosial dan kebudayaannya. Dengan organisasi ini pula, konflik sosial diselesaikan secara demokratik sehingga tidak mengandalkan intervensi yang berlebihan dari pihak luar;
3. Secara ekonomi organisasi ini bertugas mengembangkan suatu model produksi yang menempatkan kesejahteraan petani sebagai tujuan utama.

Fungsi-fungsi kelompok tani demikian dipandang merupakan sebuah bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses pemecahan masalah (*problem-solving*) dan pemenuhan kebutuhan (*needs-meeting*) mereka. Untuk itu melalui organisasi masyarakat harus ditekankan pendekatan belajar berdasar pengalaman (*experiential learning*) dan pembentukan kesadaran petani terhadap posisi dan kapasitas mereka untuk memecahkan berbagai persoalan di tengah masyarakat.

Pada titik ini, organisasi petani menjadi wahana penyadaran bahwa masyarakat memiliki posisi di dalam proses pembangunan, semenjak perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahapan evaluasi, termasuk di dalamnya pengawasan atau pengendalian. Hal ini sejalan dengan keyakinan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk bertindak dan memutuskan kehidupan diri sendiri bila mereka diberi kesempatan.

Untuk lebih jelasnya, dalam konsep pembangunan partisipatif di dalam rancangan penelitian ini juga dirumuskan tiga indikator partisipasi masyarakat petani dalam pembangunan;

1. Terlibatnya petani di dalam perumusan mekanisme atau tata cara partisipasi, mungkin bisa berbentuk mekanisme perwakilan, dukungan tidak langsung maupun keterlibatan langsung dalam suatu aktifitas.
2. Meningkatnya kesadaran sosial petani, hal ini mengacu pada perkembangan suatu wawasan analitis dan kritis, nilai kebersamaan dan suasana kerja demokratis.
3. Terbukanya akses atas sumberdaya yang ada di masyarakat, ini mengacu pada akses petani pada alat-alat produksi, barang dan jasa serta berbagai fasilitas yang ada di masyarakat.



Gambar 3.1 Skema Mekanisme Kelompok Tani Sebagai Saluran Partisipasi

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1 Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di wilayah Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tepatnya di Desa Wajik. Lokasi penelitian ini dipilih secara sengaja dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan daerah pertanian, dimana infrastruktur kelembagaan desanya sudah cukup lengkap. Pertimbangan lain yang dipandang penting yaitu bahwa warga desa Wajik terbagi ke dalam dua jenis petani yakni petani tambak dan petani sawah. Namun, keduanya disatukan dalam satu wadah organisasi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Petani Wajik yang berdiri sejak 23 Juli 2000. Tidak seperti umumnya kelompok tani, proses kelahiran atau pertumbuhan KSM Petani Wajik ini dipelopori oleh warga desa Wajik sendiri, bukan atas prakarsa aparat desa atau pihak pemerintah. Sebagai sebuah *extreme case*, proses pertumbuhan kelompok tani ini merupakan pertimbangan utama peneliti dalam memilih daerah lokasi penelitian.

Pemilihan subyek penelitian dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam proses penyelenggaraan kelompok tani dan pembangunan desa. Pertimbangan keterlibatan subyek dalam organisasi kemasyarakatan maupun keagamaan juga dimasukkan dalam penentuan subyek penelitian. Mereka adalah ketua kelompok tani, pengurus kelompok tani, pengurus organisasi kemasyarakatan desa dan anggota kelompok tani.

Di samping menggali data dari subyek, penelitian juga menelusuri data dari *informan* atau *keyperson*, yang diharapkan dapat memberikan data masukan yang berarti.

Informan atau *keyperson* di antaranya terdiri dari warga masyarakat yang mengetahui sistem sosial desa dan terlibat dalam lembaga kemasyarakatan lain seperti Himpunan Petani Pengguna Air (HIPPA), Badan Perwakilan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta pihak atau aparat pemerintah dari tingkat desa (Kepala Desa), kecamatan (Camat), dan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Jumlah subyek dan informan penelitian tidak ditentukan secara baku. Dalam metode penelitian kualitatif, jumlah subyek dan informan bukan merupakan syarat utama, tetapi yang lebih penting adalah kualitas dari sumber data dan informasi yang dikumpulkan. Dengan kata lain subyek dan informan akan terus bergulir dan dicari hingga data yang terkumpul dinilai telah mencukupi atau tidak ada lagi informasi yang baru.

Jumlah seluruh subyek penelitian yang berhasil ditemui dalam penelitian ini sebanyak 26 orang. Biodata subyek penelitian yang digali dari wawancara langsung dengan subyek penelitian, disajikan dalam tabel 4.1 berikut ini.

| No | Nama/ initial | Umur (Th) | Pendidikan | Lahan (ru) | Status sumber pendapatan utama | Status perkawinan | Status dalam KSM |
|----|------------------|--------------|------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | Rw | 30 | Sarjana | 1000 | Pemilik/penyewa | Kawin/ 1 anak | Pengurus |
| 2 | Kj | 60 | SD | 250 | Pemilik/dagang | Kawin/ 4 anak | Anggota |
| 3 | Nw | 40 | SD | 750 | Pemilik | Kawin/ 3 anak | Pengurus |
| 4 | Ku | 26 | MAN | - | Buruh Tani | Belum Kawin | Pengurus |
| 5 | As | 27 | Mahasiswa | - | - | Belum Kawin | Pendamping |
| 6 | Sa | 43 | SD | 750 | Pemilik | Kawin/ 3 anak | Anggota |
| 7 | Ka | 59 | SD | 500 | Pemilik | Kawin/ 6 anak | Anggota |
| 8 | Ak | 44 | Tsanawiyah | 450 | Pemilik/tukang | Kawin/ 2 anak | Anggota |
| 9 | No | 42 | SD | 400 | Pemilik/tukang | Kawin/ 2 anak | Anggota |
| 10 | Sb | 35 | SD | 250 | Pemilik/buruh | Kawin/ 2 anak | Anggota |
| 11 | Ud | 46 | SMP | 250 | Pemilik/buruh | Kawin/ 1 anak | Anggota |
| 12 | Sd | 40 | SD | 1000 | Pemilik | Kawin/ 2 anak | Anggota |
| 13 | Jn | 47 | SD | 300 | Penyewa/buruh | Kawin/ 2 anak | Anggota |
| 14 | Sm | 37 | SD | 150 | Pemilik/buruh | Kawin/ 2 anak | Anggota |
| 15 | Nk | 45 | Tsanawiyah | 550 | Pemilik/penyewa | Kawin/ 1 anak | Pengurus |
| 16 | Nr | 35 | SMA | 350 | Pemilik | Kawin/ 1 anak | Anggota |

| No | Nama/ initial | Umur (Th) | Pendidikan | Lahan (ru) | Status sumber pendapatan utama | Status perkawinan | Status dalam KSM |
|----|------------------|--------------|------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 17 | Ko | 47 | Sarjana | 2.250 | Pemilik/penyewa | Kawin/ 3 anak | Pengurus |
| 18 | Sl | 36 | MAN | 1500 | Pemilik | Kawin/ 4 anak | Anggota |
| 19 | Pi | 60 | SD | 150 | pemilik | Kawin/ 3 anak | Pengurus |
| 20 | Yk | 45 | Diploma | 300 | Pemilik/PNS | Kawin/ 2 anak | Pengurus |
| 21 | Wr | 37 | SD | 450 | Pemilik | Kawin/ 1 anak | Pengurus |
| 22 | Mi | 38 | SMP | 150 | Pemilik | Kawin/ 2 anak | Anggota |
| 23 | Sr | 42 | SD | 1500 | Pemilik/Bengkok | Kawin/ 2 anak | Pengurus |
| 24 | Sv | 30 | Sarjana | 500 | Penyewa/PNS | Kawin/ 1 anak | Pengurus |
| 25 | Ir | 44 | SMP | 400 | Pemilik | Kawin/ 3 anak | Anggota |
| 26 | Sh | 25 | Mahasiswa | - | Buruh tani | Belum kawin | Pengurus |

Tabel 4.1 Biodata Subyek Penelitian

4.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kedalaman data dan informasi, dilakukan beberapa teknik pengumpulan data. Data primer dikumpulkan melalui interview atau wawancara mendalam dan pengamatan terlibat (*participatory observation*) terhadap berbagai peristiwa pembangunan selama sekitar empat bulan. Untuk menghindari kekakuan wawancara dan kedangkalan data yang diperoleh, maka wawancara ini dilakukan secara bebas dan leluasa, yang biasanya disebut dengan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*). Walaupun wawancara dilakukan secara tidak terstruktur, peneliti menyusun pedoman pertanyaan yang akan ditanyakan kepada subyek, sebagai pedoman peneliti, agar pertanyaan yang diajukan dapat lebih terfokus pada permasalahan penelitian. Pedoman pertanyaan tersebut hanya berfungsi sebagai acuan yang memungkinkan berubah sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga dalam melakukan wawancara tidak harus sama persis seperti pertanyaan yang telah disusun, misalnya tentang urutannya, rumusan pertanyaannya dan sebagainya. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan supaya peneliti mendapat informasi lebih banyak dan penilaian terhadap fenomena akan lebih banyak ditentukan oleh subyek yang diteliti bukannya oleh peneliti.

Informasi yang diharapkan dari interview ini adalah berupa data kualitatif dengan metode deskriptif dengan banyak menampilkan data kualitatif. Data Kualitatif digunakan hanya untuk mendukung pertanyaan kualitatif, tidak untuk diuji secara statistik.

Dalam pengumpulan data melalui interview ini, peneliti menggunakan alat bantu berupa *tape recorder* disamping catatan tertulis. Dengan menggunakan *tape recorder* tersebut peneliti dapat merekam seluruh hasil wawancara dengan subyek penelitian maupun informan. Ekspresi jawaban mereka disamping dapat terlihat melalui mimik wajah, juga terungkap melalui nada bicara atau intonasi serta volume suara yang terekam. Sebelum melakukan perekaman, peneliti meminta izin terlebih dahulu kepada subyek penelitian atau informan yang hendak diwawancarai. Peneliti akan merekam berlangsungnya wawancara seijin subyek penelitian atau informan, akan tetapi apabila mereka tidak mengizinkan atau menolak untuk direkam, maka peneliti akan mencatat hasil wawancara secara tertulis. Hasil wawancara tersebut dideskripsikan dan diinterpretasikan dari telusuran kategori jawaban kemudian ditranskripsikan ke dalam catatan tertulis yang memuat pokok-pokok wawancara dan selanjutnya dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan penelitian.

Sejumlah pertanyaan sebagai pedoman pengumpulan data lewat wawancara adalah sebagai berikut:

Pertanyaan untuk subyek penelitian

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi anggota kelompok tani?
2. Bagaimana Bapak/Ibu bisa menjadi anggota kelompok tani, kemauan sendiri atau atas ajakan orang lain (kerabat, tetangga atau aparat desa)?

3. Apakah yang mendorong Bapak/Ibu untuk menjadi anggota kelompok tani?
4. Bagaimana Bapak/Ibu menilai atau memandang keberadaan kelompok tani?
5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui atau mengenal pengurus kelompok tani?
6. Kegiatan apa sajakah yang Bapak/ibu ikuti dalam kelompok tani?
7. Sudah berapa lama Bapak/Ibu mengikuti kegiatan tersebut?
8. Manfaat apa saja yang Bapak/Ibu rasakan dengan mengikuti kegiatan kelompok tani?
9. Bagaimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi tentang kegiatan di kelompok tani?
10. Bagaimana menurut Bapak/Ibu kelompok tani selama ini dalam menyusun dan memutuskan program atau kegiatannya?
11. Apakah ada kewajiban membayar iuran anggota, bila ada apakah Bapak/Ibu membayar iuran secara rutin?
12. Apakah Bapak/Ibu mengetahui sumber dana dan mekanisme penggunaan dana dalam kelompok tani?
13. Apakah Bapak/Ibu mengetahui aturan-aturan organisasi kelompok tani?
14. Bagaimana pengurus kelompok tani mengelola dana organisasi?
15. Bagaimana pengurus kelompok tani mengkaji dan menanggapi usulan kegiatan, kebutuhan maupun keluhan (masalah) anggota?
16. Bagaimana kelompok tani melibatkan kaum perempuan dan pemuda dalam kegiatannya?
17. Bagaimana pengurus selama ini dalam memberikan pelayanan informasi kegiatan dan laporan hasil kegiatan?
18. Bagaimana pengurus berhubungan dengan organisasi sosial lain atau dengan aparat pemerintah baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten?

19. Apa sajakah bentuk hubungan antara kelompok tani dengan organisasi sosial lainnya dan pemerintah tersebut?
20. Apakah ada bantuan (dana, penyuluhan, pelatihan, peralatan) program pembangunan dari pemerintah untuk kelompok tani?
21. Apakah bantuan dari pemerintah itu bermanfaat bagi kelompok tani?
22. Apakah kelompok tani diikutsertakan dalam pengambilan keputusan pembangunan di desa?

Pertanyaan untuk aparat pemerintah dan/atau penelusuran data sekunder

1. Bagaimana pandangan anda tentang kebijakan pembangunan desa?
2. Upaya apa saja yang dilakukan dalam program pembangunan desa?
3. Bagaimana mekanisme dan pelaksanaan program pembangunan desa?
4. Bagaimana koordinasi pemerintah desa dan instansi terkait dalam pembangunan desa?
5. Bagaimana masyarakat yang dikehendaki pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan desa?
6. Bagaimana hubungan kerja antara pemerintah desa dengan kelompok tani?
7. Bagaimana pemerintah memanfaatkan kelompok tani dalam pelaksanaan pembangunan desa?
8. Apa saja yang dilakukan pemerintah di dalam mendukung penyelenggaraan kelompok tani?

Di samping wawancara mendalam, peneliti juga menggunakan teknik observasi terhadap segala hal yang berkaitan dengan masalah penelitian baik yang berbentuk fisik

maupun non fisik. Hasil temuan tersebut akan dicatat dalam catatan tersendiri untuk kemudian dianalisa. Hasil temuan observasi ini diharapkan dapat menggambarkan potensi sosial ekonomi desa, aktifitas produksi (*mode of production*), organisasi sosial (hubungan-hubungan sosial dari produksi), dinamika kelompok tani, peristiwa-peristiwa pembangunan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Untuk melengkapi data yang diperoleh di lapangan atau data primer, dalam penelitian ini juga dilakukan penelusuran data sekunder. Data sekunder tersebut berupa studi kepustakaan, dokumen-dokumen, data monografi desa maupun kecamatan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4.3 Teknik Analisa Data

Analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Data yang banyak sekali tersebut setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, maka langkah berikutnya adalah mengadakan seleksi data kasar, yang dikenal dengan *data reduction*. Reduksi data ini dilakukan dengan jalan membuat abstraksi.

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori ini dilakukan bersamaan dengan pembuatan coding (Moleong:1990).

Kategori yang digunakan antara lain berdasar pada; 1) perkembangan kesadaran kolektif subyek penelitian; 2) keikutsertaan subyek dalam organisasi kemasyarakatan atau keagamaan; 3) tingkat pendidikan dan sosial ekonomi subyek penelitian. Berdasar dari kategori ini akan disusun klasifikasi subyek penelitian berdasar tingkat keterlibatan dan partisipasi subyek dalam 1) penyelenggaraan kelompok tani; 2) kegiatan-kegiatan pembangunan desa.

Untuk mendapatkan gambaran secara jelas tentang peranan kelompok tani dalam pembangunan desa, maka setelah langkah-langkah di atas, analisa dilanjutkan dengan menguraikan dan menafsirkan data secara deskriptif. Dalam penafsiran data tersebut akan dihubungkan dengan teori yang relevan, yang akan mengantarkan pada kesimpulan-kesimpulan sementara, dan pada akhirnya akan sampai pada suatu penarikan kesimpulan akhir.

4.4 Definisi Operasional

Untuk tujuan penelitian ini maka dirumuskan sejumlah definisi operasional sebagai berikut;

- Kelompok tani adalah unit organisasi sosial yang terdiri dari sejumlah individu petani yang mempunyai hubungan saling bergantung sesuai dengan status dan peranannya.
- Saluran partisipasi adalah suatu sarana dimana masyarakat atau khususnya petani melibatkan diri dalam pengambilan keputusan pembangunan.
- Pembangunan desa adalah sebuah proses yang mengarah pada peningkatan terus menerus kapasitas masyarakat desa untuk mengendalikan lingkungan, disertai

perluasan distribusi kesejahteraan yang dihasilkan dari kegiatan pengendalian tersebut.

- Aktifitas-aktifitas penyelenggaraan kelompok tani dimaksudkan sebagai segala kegiatan anggota maupun pengurus yang mengarah pada pencapaian tujuan-tujuan organisasi kelompok tani.
- Proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan bersama di dalam kelompok tani.
- Potensi sosial merupakan kekuatan baik material maupun immaterial pada kelompok tani yang bisa didayagunakan demi keberhasilan pembangunan desa.
- Pola-pola aktifitas partisipasi dimaksudkan sebagai bentuk-bentuk kegiatan kelompok tani yang ditujukan untuk mempengaruhi pembangunan desa demi kepentingan anggota.

BAB 5**SETTING PENELITIAN**

Sebelum era reformasi digulirkan pada tahun 1998, sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia, pembangunan Kabupaten Lamongan menggunakan paradigma pembangunan Orde Baru yang mengutamakan pertumbuhan dan stabilitas politik. Akibatnya, kepentingan pemerataan hasil-hasil pembangunan seringkali dikorbankan. Hal tersebut terjadi karena untuk mengejar pertumbuhan ekonomi diperlukan akumulasi tabungan yang besar sebagai sumber *capital investment*. Konsep yang mendasarinya adalah bahwa dengan kemauan politik yang kuat dari pemerintah, pemerataan akan secara otomatis tercipta melalui proses *trickle down effect*.

Namun sampai penghujung tahun 1997 konsep ini rupanya sulit diterima karena lemahnya kemauan politik Orde Baru untuk melaksanakan pemerataan pembangunan. Apalagi pembangunan Orde Baru lebih berorientasi pada sektor industri dengan memberi berbagai fasilitas proteksi yang berlebihan untuk terjadinya pertumbuhan ekonomi setinggi mungkin. Di sini sesuai dengan apa yang dikatakan Liddle, bahwa legitimasi Pemerintah Orde Baru lebih banyak didasarkan pada prestasi pembangunan ekonomi. Dan kemerosotan pertumbuhan ekonomi yang berlarut-larut akan mengancam berkurangnya dukungan pada pemerintah dan bahkan bisa mendorong munculnya tuntutan akan pergantian pemerintahan (Mas'oed:1994). Demikianlah, ketika kondisi perekonomian terutama sektor industri di Indonesia tidak mampu bertahan menghadapi guncangan krisis sejak tahun 1997, Presiden Soeharto kemudian harus memenuhi tuntutan rakyat untuk melepaskan kekuasaannya pada tahun 1998.

5.1 Reformasi Paradigma Pembangunan Daerah

Inti dari tuntutan reformasi pembangunan di masa depan adalah meningkatnya peran masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Tuntutan ini tidak terlepas dari keinginan masyarakat untuk mendapatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Dalam arti kehidupan yang lebih merata dan berkeadilan, otonom dan terbuka serta berkembangnya kelembagaan masyarakat yang berkelanjutan. Pemerintah diharapkan berperan sebagai fasilitator untuk tumbuhnya partisipasi masyarakat (Marjono:1999)

Secara faktual, situasi Kabupaten Lamongan bukan merupakan sebuah situasi yang tertutup dari segala yang terjadi di tingkatan nasional. Menyikapi tuntutan reformasi baik di dalam tatanan pemerintahan maupun pembangunan, Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tahun 1999 telah berhasil merumuskan Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah (PRPD).

Pembangunan Kabupaten Lamongan sebagaimana dijelaskan dalam Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah (PRPD) Kabupaten Lamongan tahun 1999 berpijak pada visi, misi dan tujuan pembangunan daerah. Visi pembangunan Lamongan yaitu mewujudkan kualitas hidup dan kehidupan seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan menuju terciptanya tatanan masyarakat madani yang berakhlak mulia, berkeadilan, sejahtera, maju dan mandiri. Penjabaran visi demikian di dalam misi pembangunan daerah yaitu memberdayakan dan mengembangkan seluruh potensi daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk secara optimal meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat Lamongan., sehingga terwujud tatanan masyarakat Lamongan yang agamis, madani, berakhlak mulia, maju dan mandiri serta terdepan dalam industri pengolahan

hasil pertanian dan sumber daya lokal lainnya termasuk pemberdayaan sumber daya alam yang berupa potensi ekonomi rakyat untuk mengembangkan kekuatan ekonomi nyata.

Sedangkan pada aspek tujuan pembangunan, terkandung maksud untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Lamongan yang agamis dan madani yakni masyarakat yang beriman, berbudi pekerti yang luhur, berkeadilan, demokratis, menguasai ilmu dan pengetahuan serta keterampilan yang sepadan dengan tuntutan teknologi, berkompetensi tinggi serta mandiri dan produktif, berkecukupan materiil-spirituil, serta aman dan tenteram (PRPD Lamongan:1999).

Dengan demikian dari PRPD Lamongan ini terungkap bahwa pembangunan Lamongan nantinya diharapkan akan dapat menjadikan Kabupaten Lamongan sebagai daerah yang terdepan dalam industri pertanian dan industri berbasis sumber daya lokal lainnya. Atau Lamongan nantinya sekurang-kurangnya menjadi daerah industri pertanian dan industri berbasis sumber daya lokal yang maju yang didukung oleh tatanan masyarakat yang agamis, madani dan demokratis serta sumber daya manusia yang berkualitas

Semangat dan upaya masyarakat Lamongan mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan tersebut tercermin dari slogan "Memayu Raharjaning Praja". Sesanti ini mengandung pengertian "berusaha dengan bersungguh-sungguh mencapai kesejahteraan negara". Kata *memayu* sama dengan *hanggayuh* yang berarti berusaha sungguh-sungguh dengan bekerja keras untuk mencapai sesuatu yang tinggi, mulia atau besar. Kata *raharja* berarti sejahtera, serba berkecukupan, senang dan tenteram lahir batin, juga jaya. Kata *ning* atau *ing* berarti berada di atau -nya. Kata *praja*, berarti negara atau bagian dari wilayah negara. Arti selengkapnya sesanti Kabupaten Lamongan yang berbunyi

“Memayu Raharjaning Praja” adalah berusaha sungguh-sungguh dengan bekerja keras untuk mencapai tingkat kesejahteraan hidup seluruh rakyat di Kabupaten Lamongan.

5.1.1 Orientasi Kebijakan Pembangunan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan dalam upayanya mencapai tingkat kesejahteraan hidup masyarakat melaksanakan serangkaian kebijakan pembangunan. Menyadari kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat Lamongan hidup di sektor pertanian atau pedesaan serta sebagaimana ruang lingkup kajian penelitian ini, dijabarkan aspek-aspek orientasi kebijakan pembangunan Lamongan sebagai berikut (PRPD Lamongan:1999).

- a. Pembangunan lebih diperkuat dengan lebih memihak kepada rakyat kecil. Dalam hal ini terutama masyarakat pedesaan yang termarginalisasi, teralienasi, dan memiliki kekuatan yang terbatas dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya. Pembangunan yang bersifat *top-down* diidentifikasi tidak memungkinkan terjadinya penyebaran kegiatan ekonomi dan hanya akan menghasilkan kegiatan ekonomi yang sentralistik.
- b. Industrialisasi diarahkan pada industri yang berorientasi pengolahan bahan baku yang tersedia di daerah karena memungkinkan keterkaitan antar sektor pembangunan (*backward-forward linkage*). Termasuk dalam industri berbasis sumber daya lokal ini adalah industri pengolahan hasil pertanian yang sangat potensial bersumber dari bumi Lamongan.
- c. Pembangunan diarahkan pada pengembangan ekonomi pedesaan (termasuk pertanian rakyat). Hal ini mengingat sebagian besar pelaku ekonomi di Lamongan dilaksanakan oleh mereka yang termasuk dalam skala ekonomi menengah dan lemah sekaligus

berdomisili di pedesaan. Di samping diyakini mempunyai daya tahan yang cukup tangguh terhadap guncangan krisis, ekonomi pedesaan juga mempunyai daya serap yang cukup besar terhadap tenaga kerja.

- d. Pembangunan pertanian ditingkatkan untuk memelihara kemandirian swasembada pangan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembinaan usaha tani, kelembagaan pertanian termasuk lembaga keuangan, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi pembibitan.

Lebih jauh secara lebih operasional orientasi kebijakan pembangunan pedesaan tersebut terinci dalam sejumlah program pembangunan pertanian sebagai berikut.

- a. Peningkatan kompetensi dan motivasi petani khususnya dalam penguasaan keterampilan dan teknologi pertanian.
- b. Penyediaan berbagai produk input pertanian secara memadai dan dalam harga yang wajar dan terkendali.
- c. Peningkatan kemampuan permodalan petani melalui bantuan permodalan dengan persyaratan dan biaya ringan.
- d. Pengendalian dan perlindungan harga hasil pertanian sesuai dengan standar harga yang telah ditetapkan.
- e. Pengembangan, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pertanian, khususnya saluran irigasi.
- f. Pemberdayaan penangkar benih/bibit pertanian melalui penguatan modal, pelatihan teknis dan manajemen usaha dan pembinaan administrasi.
- g. Peningkatan kompetensi dan penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan dan teknologi tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL).

Sementara itu, menelusuri kondisi geografis dan potensi Lamongan, prioritas untuk kembali pada pertanian dan agroindustri dipandang lebih realistis. Selain lebih realistis, paradigma pembangunan demikian dipandang paling mengakar pada kemampuan masyarakat banyak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Sebagaimana dikatakan Bapak Faturahman, ketua BAPPEDA Lamongan sebagai berikut.

“Pengembangan pertanian dan agroindustri di Lamongan akan memberi nilai tambah pemerataan pembangunan antar wilayah. Artinya, jangan sampai Lamongan mengidealkan pengembangan industri perkotaan. Karena selain kenyataan bahwa penghuni terbesar Lamongan adalah *wong ndeso* (orang desa:pen), industri perkotaan hanya akan melahirkan urbanisasi berlebihan, kemelaratan dan kesenjangan desa-kota yang semakin tajam.”

Lebih lanjut dikatakannya,

“Ekosistem yang beragam di Lamongan memungkinkan pengembangan komoditas tanaman pangan, perikanan darat, perikanan laut dan hortikultura. Investasi di bidang pertanian menjadi menarik apabila dikaitkan dengan upaya penganeekaragaman sumber pangan apalagi bahan baku industri. Lebih dari itu, Sektor pertanian di Lamongan pun akan mampu menyerap tenaga kerja dan pelestarian lingkungan hidup.”

Sedemikian besar potensi pembangunan Lamongan, kesemuanya harus dipahami dalam kerangka proses transformasi masyarakat. Dalam hal ini, pengembangan wilayah ini menuntut upaya nyata peningkatan partisipasi masyarakat, kemandirian ekonomi, dan kemampuan melaksanakan otonomi. Kerjasama segitiga antara pemerintah, masyarakat (yang sering dipercayakan begitu saja pada LSM) dan dunia usaha merupakan kunci bagi transformasi Lamongan secara adil dan berkelanjutan.

Sejauh ini, terlihat bahwa bagaimanapun pembangunan di Lamongan memerlukan kemauan politik dari pemegang kebijakan untuk berpihak kepada rakyat kecil dalam hal ini petani. Mencermati kondisi Lamongan, kiranya tepat apa yang diungkapkan

Soedarsono Hadisapoetro (dalam Mardikanto:1994) yang dengan tegas menyatakan bahwa:

“Pelaksana utama pembangunan pertanian di Indonesia adalah justru petani-petani kecil, yang merupakan bagian terbesar, baik dipandang dari sudut jumlah luas lahan usaha tani yang diusahakan, ataupun dipandang dari sudut jumlah dan nilai produksi yang dihasilkan.”

5.1.2 Peranan Pemerintah Kabupaten

Menyikapi besarnya tuntutan akan kondisi politik yang demokratis, Pemerintah Kabupaten Lamongan merumuskan suatu prinsip bahwa mereka adalah abdi negara dan abdi masyarakat, sekaligus agen pembangunan. Untuk itu dibutuhkan komitmen kuat mewujudkan profesionalitas pemerintahan, dengan benar-benar memposisikan peran diri sebagai “pelayan” dan bukan sebagai “pemerintah”.

Di dalam pembangunan daerah, secara garis besar peran Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai penentu kebijakan adalah membantu atau melayani masyarakat untuk berlangsungnya perubahan-perubahan yang menyangkut: pengambilan keputusan tentang realokasi sumber daya, nilai tukar antar sektor pertanian (pedesaan) dan sektor non pertanian (perkotaan), investasi di pedesaan bagi terciptanya kesempatan-kesempatan ekonomi bagi mayoritas masyarakat, dan kebijakan industri yang menunjang kegiatan sektor pertanian dan kegiatan lain yang menyerap tenaga kerja.

Dalam kerangka pelayanan masyarakat dalam pembangunan itu pula, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan menempatkan diri sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan dengan mengarahkan partisipasi masyarakat untuk menjadi lebih terbuka dan dialogis. Peningkatan pembangunan pedesaan, misalnya, dilaksanakan melalui penguatan institusi lokal di tingkat desa untuk mampu berpartisipasi di dalam

perencanaan pembangunan. Pemerintah juga berupaya menumbuhkan iklim yang mendorong prakarsa dan peningkatan keswadayaan masyarakat pedesaan, pengembangan kemampuan sumber daya manusia, dan pemanfaatan sumber daya alam.

Terkait dengan pengembangan iklim yang kondusif bagi partisipasi masyarakat, pemerintah berupaya menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung atau mempermudah akses baik ke sumber modal, bahan baku maupun pasar. Hal ini terutama dilakukan dengan menghapus berbagai perilaku birokrasi yang menyebabkan terjadinya ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*), distorsi harga, monopoli dan bentuk-bentuk penyebab inefisiensi, seiring upaya mendorong masyarakat bersemangat wirausaha tinggi.

Sedemikian jelas paradigma pembangunan Lamongan di dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang tersedia, namun kesemuanya akan sangat bergantung kepada kesiapan Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan dunia usaha. Ketiga komponen pembangunan daerah ini nantinya diharapkan mampu mewujudkan dirinya menjadi kekuatan pembangunan yang nyata (Marjono:1999). Di lain pihak, untuk melaksanakan strategi pembangunan demikian, kabupaten ini menghadapi dua permasalahan mendasar. Kedua permasalahan tersebut terwujud dalam kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan masih lemahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 6 miliar, dipandang kecil terutama bila dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai 137 Miliar Rupiah. Untuk mengatasi permasalahan dana pembangunan ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan menempuh berbagai cara yang berujung pada

peningkatan pendapatan daerah. Seperti diungkapkan H. Masfuk SH, Bupati Lamongan berikut ini (Jawa Pos, 14 Juli 2000);

“Kita berupaya menggodok semua unsur di Pemkab utamanya yang berpenghasilan untuk menjadi enterpreneur. Mampu berwiraswasta yang nantinya menghasilkan pendapatan ...mendorong serta menumbuhkan ide mengubah pola kerja para kepala bagian atau kepala dinas/instansi utamanya bagian atau dinas yang berpenghasilan menjadi lebih berpikir menciptakan dan meningkatkan pendapatan.”

Sedangkan persoalan SDM, seiring upaya menghadapi era otonomi daerah, Pemkab Lamongan telah mulai menata jenjang pendidikan para pejabatnya. Para kepala bagian maupun kepala dinas Lamongan sejak tahun 2000 telah dituntut untuk menempuh jenjang pendidikan pasca sarjana. Upaya lain peningkatan kualitas SDM ini adalah dengan melakukan serangkaian *cross program*. Program ini dilaksanakan dengan cara mendatangkan para pakar pembangunan khususnya bidang ekonomi. Pasca program, pesertanya diterjunkan ke lapangan untuk dilihat keberhasilan kerjanya.

5.2 Implementasi Kebijakan Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian menurut Hadisapoetro (1970, dalam Mardikanto:1994) diartikan sebagai proses yang ditujukan untuk selalu menambah produksi pertanian bagi tiap-tiap konsumen yang sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktifitas kerja usaha setiap petani dengan jalan menambah modal dan skill untuk memperbesar turutannya campur tangan manusia di dalam perkembangan tumbuh-tumbuhan dan hewan.

Ditinjau dari potensi sumber daya alam, Lamongan memiliki kekayaan alam di darat maupun laut yang belum sepenuhnya dimanfaatkan dan dikembangkan. Oleh karena itu upaya pembangunan Lamongan senantiasa dipacu terutama pada sektor

pertanian. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat Lamongan hidup di pedesaan sebagai petani, maka di tengah semangat reformasi sekarang ini Pemkab. Lamongan menyadari pentingnya peran pertanian dalam membangun Kabupaten Lamongan.

Baik pada periode pemerintahan Bupati Moh. Faried (1989-1994 dan 1994-1999) maupun pemerintahan Bupati Masfuk SH (1999-2004), perhatian Pembangunan Kabupaten Lamongan diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan masyarakat desa. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa di dalam struktur perekonomian Kabupaten Lamongan, sektor pertanian masih merupakan sektor dominan. Baik dalam kaitannya dengan penyediaan pangan daerah, terlebih lagi sebagai pemasok utama stok pangan nasional. Sektor pertanian di Lamongan menurut Laporan Tahunan 2000 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Lamongan mampu menyumbang PDRB sekitar 46,04%.

Bersumber dari Pola Dasar Pembangunan Pertanian Lamongan Tahun 2001 diungkapkan bahwa program pembangunan pertanian di Kabupaten Lamongan dibedakan atas dua macam program yaitu program utama dan program penunjang. Program utama terdiri atas:

- a. Program ketahanan pangan agribisnis
- b. Program pembangunan pertanian rakyat terpadu
- c. Program pembangunan usaha pertanian
- d. Program pembangunan diversifikasi pangan dan gizi
- e. Program pembangunan pengembangan sumberdaya sarana dan prasarana

Sedangkan program-program penunjang antara lain:

- a. Penyempurnaan efisiensi aparatur pemerintah dan pengawasan pembangunan

- b. Pembinaan statistik
- c. Rehabilitasi lahan kritis

Salah satu sasaran pembangunan pertanian adalah mewujudkan peningkatan pendapatan petani, sehingga taraf hidup petani beserta keluarganya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di samping itu pembangunan pertanian mempunyai empat fungsi yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan pembangunan Lamongan. Empat fungsi tersebut adalah, (1) mencukupi pangan daerah, (2) penyedia lapangan kerja dan berusaha, (3) penyedia bahan baku untuk industri, dan (4) sebagai sumber pemasukan bagi PAD Kabupaten Lamongan

Untuk itu secara kelembagaan, Dinas Pertanian Kabupaten Lamongan adalah unsur pelaksana pemerintahan kabupaten di bidang pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lamongan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pertanian tanaman pangan Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi-fungsi:

- a. Menyiapkan bahan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh gubernur Propinsi Jawa Timur.
- b. Menyiapkan bahan bimbingan teknis bidang pertanian tanaman pangan.
- c. Menyiapkan bahan pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya.
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan di bidang pertanian tanaman pangan.
- e. Menyiapkan bahan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani.
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Pertanian tanaman pangan

- h. Menyiapkan bahan pengelolaan unit pelaksana teknis Dinas Pertanian tanaman pangan.

Di dalam menjalankan berbagai program pembangunan pertanian di Kabupaten Lamongan, maka Dinas Pertanian tanaman pangan Lamongan didukung dengan keberadaan proyek-proyek pembangunan pertanian baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Dalam tahun anggaran 2000, Dinas pertanian tanaman pangan Kabupaten Lamongan selain mendapatkan dukungan dana dari APBN dan APBD, juga mendapatkan dana dari bantuan luar negeri melalui program SPL OECF.

5.3 Profil Wilayah Dan Masyarakat Lamongan

5.3.1 Gambaran Umum Kabupaten Lamongan

Secara geografis Kabupaten Lamongan berada antara 6 derajat 51' 54" dan 7 derajat 23' 6" garis lintang selatan dan antara 112 derajat 4' 4" dan 112 derajat 33' 12" garis bujur timur. Wilayah kabupaten Lamongan ini berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Gresik di sebelah timur, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang di sebelah selatan, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

Luas wilayah Kabupaten Lamongan 1.812,8 kilometer persegi atau 181.280,300 Ha, atau sama dengan 3,78% wilayah Propinsi Jawa Timur. Terdiri dari 6 wilayah Pembantu Bupati (Lamongan, Sukodadi, Babat, Ngimbang, Karangbinangun dan Paciran), 25 kecamatan dan 475 desa dan kelurahan.

Secara topografis, sebagian wilayah terdiri dari dataran rendah dan *bonorowo* (rawa) serta sebagian lagi dataran tinggi sekitar 100 meter dari permukaan laut. Secara garis besar daratan Kabupaten Lamongan dapat dibedakan menjadi tiga karakteristik. (1) Bagian tengah belahan selatan terdiri dari dataran rendah yang relatif subur, meliputi wilayah Kecamatan Lamongan, Babat, Pucuk, Sukodadi, Kedungpring, Sugio, Kembangbahu, dan Tikung. (2) Bagian tengah belahan utara, terdiri dari daerah *bonorowo* yang rawan banjir, meliputi wilayah Kecamatan Turi, Sekaran, Karanggeneng, Laren, Kalitengah, Karangbinangun, Glagah dan Deket. (3) Bagian selatan dan utara dimana masing-masing terdiri dari pegunungan kapur dan dataran rendah. Wilayah pegunungan kapur meliputi Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang,

Bluluk, Modo dan Sukorame. Sedangkan wilayah dataran rendah yakni Kecamatan Brondong, Paciran dan Solokuro.

Kabupaten Lamongan seperti halnya daerah-daerah lain di Jawa Timur terletak di bawah garis katulistiwa, beriklim tropis. Terbagi dalam dua musim yakni musim penghujan dan kemarau dengan dua masa peralihan yaitu musim *mareng* (peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau), dan musim *labuh* (peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan). Wilayah Lamongan termasuk bercurah hujan rendah, rata-rata hanya 1.605 mm/tahun. Wilayah kecamatan yang bercurah hujan di atas rata-rata adalah kecamatan Ngimbang, Modo, Babat, Kedungpring, Bluluk, dan Sambeng.

Dari segi demografis, penduduk Kabupaten Lamongan pada Oktober 1996 berjumlah 1.179.507. Jumlah penduduk sebesar itu terdiri dari 574.786 jiwa laki-laki dan 604.721 jiwa wanita. Mereka di antaranya sebagai petani sebanyak 362.524 jiwa, buruh tani 42.768 jiwa, nelayan 28.526 jiwa dan lain-lainnya yang hidup di desa.

5.3.2 Gambaran Umum Kecamatan Lamongan

Kecamatan Lamongan menempati wilayah seluas 39,65 Km persegi atau 3.965,25 Ha. Dari luas wilayah tersebut 2.626,64 Ha untuk sawah dan 1.338,61 Ha untuk pekarangan, selebihnya untuk tegalan dan lain-lain. Secara administratif kecamatan ini terbagi dalam 8 kelurahan dan 12 desa, 13 lingkungan, 30 dusun, 75 RW dan 226 RT. Delapan wilayah yang berbentuk kelurahan adalah Sukomulyo, Sukorejo, Banjarmendalan, Sidoharjo, Sidokumpul, Tumenggungan, Jetis, dan Tlogoanyar. Sedangkan wilayah yang berbentuk desa adalah Sidomukti, Rancangkencono, Sumberjo,

Wajik, Sendangrejo, Kramat, Kebet, Pangkatrejo, Karanglangit, Plosowahyu, Made, Dan Tanjung.

Berdasarkan data profil kecamatan periode tahun 1999, tercatat jumlah kepala keluarga adalah sebanyak 12.722 kepala keluarga. Jumlah penduduk pada tahun 1999 adalah 57.756 jiwa yang terdiri dari 27.889 orang laki-laki dan 29.867 orang perempuan. Mengacu pada laporan kecamatan tentang perkembangan jumlah penduduk tahun 2001 diperoleh data penduduk kecamatan Lamongan sebesar 58.817 orang, yang terdiri dari 28.133 orang laki-laki dan 30.684 perempuan

Jarak antara lokasi kantor kecamatan Lamongan dengan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yaitu sekitar 2 kilometer. Wilayah kecamatan Lamongan ini berbatasan dengan Kecamatan Tikung dan Kembangbahu di sebelah selatan, Kecamatan Turi di sebelah utara, Kecamatan Deket di sebelah timur, dan wilayah kecamatan Sukodadi di sebelah barat.

5.4 Desa Wajik

5.4.1 Letak Geografis dan Kondisi Fisik

Desa Wajik merupakan bagian Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Desa ini terdiri dari dua dusun yaitu Dusun Wajik dan Dusun Klitih dengan wilayah seluas 274 hektar. Dibanding dengan kelurahan atau desa-desa lain di Kecamatan Lamongan, letak Wajik tidak terlalu menguntungkan. Selain berada jauh dari jalan utama ataupun pusat kecamatan, jarak 6 kilometer antara Wajik dan pusat kota kecamatan hanya dihubungkan oleh sebuah jalan batu-kapur. Jalan ini cukup lebar untuk dilewati kendaraan roda empat, namun karena rute yang sulit dan kondisi jalan yang masih tidak

memadai jarang ditemui kendaraan melewatinya. Wajik termasuk wilayah barat kecamatan Lamongan dimana berada di tengah areal pertanian yang memisahkannya dari desa dan kelurahan sekitar.

Seperti kebanyakan wilayah di Kabupaten Lamongan, Wajik merupakan dataran yang berada pada ketinggian 100 m di atas permukaan laut, sehingga suhu udara relatif panas yaitu rata-rata 36-37 derajat celsius. Namun demikian pada musim penghujan tahun 2001 ini, pada saat penelitian ini sedang dilaksanakan, suhu di daerah ini relatif sejuk (33-34 derajat celcius). Tidak menutup kemungkinan, hal ini disebabkan oleh intensitas angin dari areal persawahan dan tambak yang mengelilingi pemukiman penduduk Wajik.

Secara fisik desa Wajik terlihat tidak jauh berbeda dengan kondisi desa-desa di Lamongan. Bila orang memasuki wilayah Wajik, maka akan dijumpai jalan-jalan desa yang hampir seluruhnya berbatu, licin dan berkerikil. Sebuah jalan desa terbentang dari timur ke barat cukup lebar membelah wilayah pemukiman penduduk sekaligus menghubungkan dua dusun yakni Wajik dan Klitih. Di sepanjang ruas kiri jalan desa ini, sejak tahun 1993 berdiri tiang-tiang listrik PLN tanpa lampu penerangan jalan. Dua kilometer ke arah timur jalan ini menghubungkan Wajik dengan desa Sidomukti. Sedangkan 1 kilometer ke arah barat, jalan desa ini menghubungkan Dusun Klitih dengan desa Sumberjo.

Batas wilayah Wajik dengan desa-desa sekitar dipisahkan oleh areal persawahan dan sebagian berupa tambak-tambak ikan bandeng. Sebelah utara dibatasi oleh wilayah kelurahan Sidoharjo, di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah desa Kramat, sebelah

barat berbatasan dengan desa Sumberjo, dan sebelah timur terletak wilayah desa Sidomukti.

Bangunan rumah penduduk sebagian terbuat dari tembok, sebagian lagi rumah penduduk yang terbuat dari kayu. Ada juga bangunan rumah penduduk yang semi permanen dimana pondasi dan dinding depan rumah terbuat dari tembok, namun keseluruhan bagian rumah lainnya dari kayu. Rumah-rumah tembok dan semi permanen kebanyakan berlantai keramik, traso, ataupun semen (*plester*). Sementara bangunan rumah penduduk yang terbuat dari kayu kebanyakan berlantai tanah, dimana seringkali ditutup anyaman kulit bambu (*sesek*)

Bentuk rumah-rumah di Wajik kebanyakan berarsitektur rumah adat Jawa (*joglo*). Halaman rumah penduduk yang bergaya *joglo* ini kebanyakan relatif lebih luas bila dibanding rumah penduduk yang telah dibangun dari tembok dan berarsitektur modern. Selain sebagai tempat menjemur hasil panen (gabah, jagung, kedelai), sejumlah penduduk memanfaatkan halaman rumah mereka yang berada di tepi jalan desa untuk membuka toko dan warung. Di halaman rumah penduduk ini juga hampir selalu dijumpai beberapa macam tanaman seperti mangga, jambu air, dan sebagainya. Secara fisik bagaimanapun Wajik masih merupakan sebuah desa dengan ciri-ciri kehidupan desa: (Sobary:1995) Masih banyaknya binatang, rumah-rumah kuno, dan berbagai pohon buah-buahan, serta kolam ikan.

5.4.2 Tata Pemerintahan Wajik

Wilayah Wajik berbentuk Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Mekanisme kerja pemerintahan sebagaimana Pemerintahan Desa dimana diatur dalam

Undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa. Kepala Desa Wajik dipilih melalui pemilihan kepala desa (pilkades). Kepala Desa di dalam menjalankan roda pemerintahan, pada saat penelitian dilaksanakan, dibantu oleh seorang Sekretaris Desa, tiga orang perangkat dan dua orang Kepala Dusun.

Sekretaris Desa dijabat oleh Bapak Sali, sedangkan Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan, Bapak Wardji. Kaur. Kesejahteraan Rakyat, Bapak Hardi dan Kaur. Umum dijabat Bapak Rawi. Sementara itu, Kaur. Keuangan dan Kaur. Pembangunan, pada saat penelitian ini dilaksanakan, sedang dilaksanakan proses pemilihan karena pejabat lama telah mengundurkan diri karena usia lanjut. Kepala Dusun Wajik dijabat oleh Bapak Sikun, dan Kepala Dusun Klitih dijabat Bapak Sarip.

Pemerintahan Desa ini di dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat dan pembangunan desa dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Sedangkan semenjak diberlakukannya Undang-undang No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah telah dibentuk Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai badan legislatif di tingkat desa. Anggota BPD dipilih dari dan oleh warga desa dalam suatu pemilihan umum (pemilu) desa untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Sebagaimana telah diungkap di atas, secara pembagian kewilayahan, Desa wajik terdiri dari dua dusun yaitu Dusun Wajik dan Klitih. Dua rukun warga (RW) yang membawahi tujuh rukun tetangga (RT). Masing-masing tingkat administrasi kewilayahan tersebut dipimpin oleh seorang kepala dusun, ketua RW dan ketua RT. Kelembagaan RW dan RT ini bertanggung jawab dalam membantu pemerintah desa menjalankan pembangunan. Tugas pengurus RW dan RT ini cukup berat karena bisa dikatakan semua informasi atau data keadaan masyarakat bersumber dari data yang ada di

RW dan RT. Pengurus RTW dan RT ini dipilih dari masyarakat setempat, tanpa mendapat imbalan/gaji dalam menjalankan tugasnya. Karena jabatan di RW dan RT yang bersifat sukarela demikian, seringkali terjadi kesulitan dalam pemilihan ketua RW/RT. Hal ini terutama karena jarang sekali warga desa yang bersedia menjabat sebagai ketua RW maupun RT tersebut.

5.4.3 Kependudukan

Data jumlah penduduk Wajik diperoleh dari laporan bulanan desa dan berdasarkan papan monografi desa. Berlandaskan laporan bulanan desa dari kepala urusan Kesra kepada pihak Kecamatan, pada bulan september penduduk Wajik berjumlah 1.704 orang, yang terdiri dari 837 orang laki-laki dan 867 orang perempuan. Sementara data penduduk dalam monografi desa diperoleh data penduduk bulan Maret 2000 yang berjumlah 415 kepala keluarga.

Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut, semuanya beragama Islam. Layaknya suasana desa-desa lain di Lamongan, kehidupan masyarakat Wajik sangat diwarnai oleh kegiatan-kegiatan ritual keagamaan. Laki-laki dewasa maupun anak-anak semenjak petang menjelang (sehabis waktu sholat Ashar) mereka selalu mengenakan sarung dan songkok. Semangat beragama penduduk juga bisa dilihat dari keberhasilan warga membangun dua masjid di masing-masing dusun dengan dana swadaya mereka sendiri.

Dari segi mata pencaharian, hampir semua penduduk desa menggantungkan hidupnya pada bertani. Data statistik dari kantor desa menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk yaitu 1.524 orang bermata pencaharian sebagai petani. Penduduk yang bermata

pencanharian sebagai Pegawai Negeri atau Guru berjumlah 36, sebagai pedagang/wiraswasta berjumlah 8 orang pemilik warung dan 5 orang pracangan, sebagai buruh tani berjumlah 127, sebagai pensiunan sebanyak 4 orang. Namun perlu dicatat bahwa pengkategorian penduduk Wajik menurut mata pencaharian ini tidak bisa ditarik garis tegas begitu saja. Hanya sebagian kecil penduduk yang benar-benar bekerja di luar sektor pertanian. Karena banyak warga yang memiliki pekerjaan di luar pertanian (buruh pabrik, tukang batu, pengrajin, pedagang, peternak) tetapi mereka juga menggarap lahan pertanian.

Struktur mata pencaharian penduduk ini juga terkait dengan struktur penguasaan tanah. Dari 415 Kepala Keluarga (KK), terdapat 16 KK yang hanya menguasai tanah kurang dari 0,1 Ha. 133 KK memiliki tanah 0,1 ha – 0,5 ha. Dan 286 KK menguasai tanah lebih dari 0,5 ha. Tetapi perlu dicatat di sini bahwa data penguasaan tanah dari monografi desa ini tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan yang ada. Dari luas areal pertanian 247 ha, telah banyak lahan pertanian yang telah disewakan kepada orang dari luar desa terutama untuk lahan tambak. Kecenderungan dari gejala semakin sempitnya lahan pertanian yang dikuasai penduduk dikaitkan dengan struktur mata pencaharian mereka, berkesesuaian dengan apa yang dikatakan oleh James C. Scott sebagai proses pembentukan semi proletar petani (Scott:2000). Sebuah proses yang mengkaitkan banyak penduduk desa bukan dengan produksi pertanian, melainkan dengan perekonomian perkotaan di luar desa.

Dalam segi pendidikan, penduduk Wajik mempunyai tingkat pendidikan yang tidak begitu tinggi. Masih terdapat banyak penduduk yang hanya berpendidikan setingkat SD. Berdasarkan data monografi ketika penelitian ini dilaksanakan

memperlihatkan bahwa penduduk yang buta aksara dan angka latin berjumlah 320 orang, berpendidikan tamat SD berjumlah 1029 orang, tamat SLTP berjumlah 151 orang, lulusan SMU berjumlah 178 orang, dan tamat perguruan tinggi berjumlah 26 orang.

5.4.4 Lembaga Kemasyarakatan dan Keagamaan

5.4.4.1 Lembaga Kemasyarakatan

Ditinjau dari keterkaitan struktural lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah, sejumlah lembaga kemasyarakatan sebagaimana telah disebut terdahulu, seperti RT, RW, PKK, LMD/LKMD, dan BPD memiliki keterkaitan erat dengan pemerintah. Lembaga-lembaga tersebut memiliki tanggung jawab mendukung proses pelaksanaan pembangunan di desa. Kecuali Badan Perwakilan Desa (BPD) yang relatif keberadaannya masih baru di desa Wajik, sejauh ini bisa dikatakan kesemua lembaga di atas telah menjadi lembaga kontrol bagi pemerintah terhadap berbagai kondisi yang berkembang di masyarakat. Hal ini terutama terjadi pada LMD dan LKMD yang lebih merupakan "boneka" birokrasi (Fauzi:1999). Mengacu pada Undang-undang Pemerintahan Desa 1979, kedua lembaga ini harus diketuai oleh kepala desa sendiri. Dampak yang seringkali nampak adalah kuatnya aparat birokrasi dalam menghambat dan mengontrol aspirasi dan partisipasi masyarakat desa.

Di samping lembaga-lembaga di atas, terdapat Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Petani Wajik yang beranggotakan masyarakat petani Desa Wajik. KSM Petani Wajik ini, sebagai sebuah kelompok tani adalah pusat kajian penelitian ini, dimana merupakan sosok lembaga kemasyarakatan yang lahir atas inisiatif warga masyarakat dan bersifat otonom dengan pemerintahan desa. Meski demikian, di dalam melaksanakan

berbagai program kerjanya, khususnya yang bersinggungan dengan pembangunan desa, seringkali harus berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa.

5.4.4.2 Lembaga Keagamaan

Lembaga keagamaan juga berperan besar di dalam mendukung proses pembangunan Desa Wajik. Hal ini terutama dari segi keanggotaan⁴ lembaga atau kelompok keagamaan yang begitu mengakar di kalangan warga Wajik. Setidaknya terdapat empat jenis lembaga atau kelompok keagamaan di Desa Wajik yaitu Jam'iah Yasinan (1 kelompok), Jama'ah Tahlil (7 kelompok), Kelompok Pengajian Al Ihtihat (1 kelompok), dan Remaja Masjid (2 kelompok).

Satu kelompok Jam'iah Yasinan beranggotakan sekitar 50 wanita muslimah. Setiap malam kamis Jam'iah ini mengadakan kegiatan membaca Surat Yasin bersama di rumah salah seorang anggota secara bergiliran. Tujuh kelompok Jama'ah Tahlil yang ada di Wajik mengadakan kegiatannya setiap malam Jum'at. Masing-masing kelompok Jama'ah beranggotakan sekitar 55 orang laki-laki. Kegiatan mereka terutama adalah membaca Tahlil bersama dengan diakhiri ceramah dari tokoh-tokoh agama setempat, atau kadang juga mengundang mubaliq dari luar desa. Selain terhimpun dalam Jam'iah Yasinan, kaum wanita Wajik juga banyak yang menjadi anggota kelompok Pengajian Al Ihtihat. Kelompok pengajian ini merupakan kelompok keagamaan yang cukup menonjol, dimana di Wajik tercatat 87 muslimah yang rata-rata beraliran NU. Anggota pengajian ini tidak hanya dari Wajik, karena merupakan pengajian kaum muslimah se-kecamatan Lamongan. Sebagai ketua pengajian adalah Ibu Hj. Mahzumah, seorang mubaliq terkenal yang tinggal di kota Lamongan.

Dua kelompok lembaga keagamaan terakhir adalah Remaja Masjid (Remas); yaitu Remas Masjid Al Mubarak Wajik dan Remas Al Muttaqien Klitih. Saat penelitian ini dilaksanakan Remas Al Mubarroq diketuai Fauzan. Kegiatan rutin Remas ini adalah mengadakan Tahlilan setiap ma'iam Sabtu, mengajar anak-anak membaca (*ngaji*) Alqur'an dan mengadakan peringatan hari besar Islam. Sedangkan Remas Al Muttaqien Klitih, yang diketuai oleh Kasiyanto, kegiatannya tidak banyak berbeda dengan Remas Al Mubarroq. Namun Remas Al Muttaqien memiliki peran yang lebih besar dalam pengelolaan Masjid Al Muttaqien. Di samping Kasiyanto sendiri sering juga dipercaya menjadi imam sholat di masjid, beberapa keputusan penting yang dikeluarkan Ta'mir Masjid Al Muttaqien berkenaan dengan pembangunan masjid Al Mubarak selalu melibatkan komponen Remas.

5.4.5 Kepemimpinan dan Struktur Kekuasaan

Ada dua bentuk kepemimpinan yaitu kepemimpinan formal dan kepemimpinan informal di dalam kehidupan masyarakat Wajik. Kedua tipe kepemimpinan ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan bersifat saling melengkapi. Kepemimpinan formal didapat: dalam posisi Kepala Desa dan kepemimpinan informal terletak pada sosok para pemimpin agama (ulama) dan para elit informal desa. Dalam penelitian ini, tokoh agama yang cukup menonjol pengaruhnya tercatat diantaranya Nawan (Ketua Ranting NU Wajik), Modin desa Wajik; Ustad Muntaha, Ustad Asikin (Klitih), Bapak Nawan (Ketua Ranting NU Wajik), Bapak Sajim (Ketua Ta'mir Masjid Al Muttaqien Klitih). Sedangkan pemimpin informal di luar tokoh agama atau elit informal desa tercatat diantaranya

Bapak Ya'kop (Wajik), Bapak Kasno (Wajik), Bapak Sya'roni (Wajik), Bapak Nur Khumaidi (Klitih), Bapak Rawi (Klitih), dan Mbah Ipin (Klitih).

Terkait dengan penelitian ini, sosok kepala desa Wajik sebagai pemimpin formal berperan dalam kapasitas kepala aparat pemerintahan desa. Maka di dalam pelaksanaan pembangunan desa, kepala desa tentunya merupakan perpanjangan dari Pemerintah (yang lebih atas) dalam memprakarsai pembangunan pada tingkat desa. Biasanya, pembangunan yang diprakarsai oleh Pemerintah cenderung diprioritaskan pada bidang ekonomi dan pembangunan sarana dan prasarana fisik.

Karena jalinan wewenang dengan Pemerintah tersebut, Kepala Desa bersama para aparat pemerintahan desa menempati lapisan sosial yang tinggi di masyarakat Wajik. Di Balai Desa, kepala desa dan aparat-aparatnya merupakan saluran aliran semua program dan kebijakan pembangunan serta wewenang Pemerintah baik di tingkat lokal maupun pusat. Di dalam menjalankan tugas pemerintahan demikian, kepala desa dan aparatnya tidak bisa lepas dari berbagai pedoman yang telah digariskan dari atas. Akibatnyanya prioritas bidang dan sektor pembangunan seringkali tidak bisa diputuskan sendiri oleh aparat dan warga desa.

Kondisi ini salah satunya tercermin dari keberadaan sebuah poster (terlampir) yang terpampang di tembok ruangan Balai Desa Wajik. Poster ini berisi "Jadual Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Jawa Timur" berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Juni 1992, No. 411.6/11919/013/1992. Melihat isi dari Surat Gubernur ini, kecenderungan yang sering terjadi adalah upaya keras para pemimpin formal desa untuk memenuhi target-target pembangunan yang telah ditetapkan dari atas. Hal ini terutama – mengacu pada isi Surat

Gubernur – karena pertanggungjawaban program pembangunan desa oleh kepala desa dilakukan kepada Bupati Dati II, dan bukan kepada masyarakat dalam hal ini LMD.

Berbeda dengan Kepala Desa dan aparatnya yang mendapatkan posisi tinggi di masyarakat bersumber dari wewenang legal formal, para pemimpin informal di Wajik memperoleh posisi kepemimpinannya dari kemampuan atau kelebihan pribadi mereka. Sebagaimana diungkap di muka, terdapat dua jenis pemimpin informal yakni para tokoh agama (ulama) desa dan elit informal desa. Ulama mendapatkan sumber pengaruhnya terkait dengan nilai-nilai yang dihormati oleh masyarakat Wajik seperti ketakwaan, kekeluargaan, kemampuan menguasai sumber hukum Islam, dan kemampuan mengatasi dan memecahkan masalah-masalah agama.

Sedangkan elit informal desa mendapatkan sumber pengaruh antara lain dari kepandaian, keberanian, kerja keras, kejujuran, cinta tradisi, dan penguasaan aset ekonomi serta kemampuan mereka dalam menghimpun dana pembangunan desa. Seorang subjek penelitian (Sh) yang saat penelitian berlangsung berstatus mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di Lamongan mengungkapkan sebagai berikut.

“Ketokohan di masyarakat Wajik tidak terlalu ditentukan oleh besar kecilnya sawah yang dimiliki. Di sini seseorang dipandang sebagai tokoh masyarakat bila banyak memahami sejarah dan masalah-masalah kampung. Misalnya tentang masalah batas jalan atau tanah desa, seringkali harus meminta pendapat pada sesepuh desa seperti Mbah Ipin yang mengetahui seluk beluk sejarah desa ini. Dia (Mbah Ipin:pen) sering dijadikan patokan menyelesaikan masalah penduduk desa”.

Pembangunan yang diprakarsai oleh pemimpin informal cenderung diprioritaskan pada bidang sosial budaya, terutama sektor agama dan kesejahteraan masyarakat.

Idealnya kedua tipe pemimpin tersebut mempunyai posisi yang sama di masyarakat. Tetapi seringkali terjadi di dalam struktur kekuasaan masyarakat Wajik,

pemimpin formal lebih dominan. Terutama di dalam pengambilan keputusan pembangunan, walaupun eksistensi para pemimpin informal belum jauh tergeser, namun posisi aparat kelurahan beserta aparatnya semakin menentukan di dalam masyarakat.

5.4.6 Latar Budaya Khas

5.4.6.1 Gotong Royong

Desa Wajik sebagai lokasi penelitian merupakan tipologi desa yang mendasarkan diri pada usaha tani sawah. Sekedar mendasarkan diri pada profil desa tahun 2000, maka produksi padi pada tahun 2000 sebesar 350 ton. Sesuai dengan kondisi Wajik, seperti diungkapkan oleh Koenjaraningrat (Mardikanto:1994), sebuah desa yang berdasarkan cocok tanam di sawah karena hidup menetap maka ikatan komunitas warganya terjalin dalam berbagai bentuk kegiatan gotong royong. Berkembangnya sistem gotong royong di masyarakat petani Wajik juga hendaknya dikaitkan dengan kondisi kehidupan petani yang disebut Scott sebagai ekonomi subsisten (Scott:1983).

Dari sini bisa diungkapkan adanya dua kemungkinan faktor perkembangan berbagai bentuk kegiatan kolektif petani Wajik. Pertama adalah karena kuatnya ikatan sosial warga yang disatukan oleh tempat hidup yang sama. Dan faktor kedua adalah segala upaya petani dalam menjamin stabilitas kondisi ekonomi subsisten mereka.. Dengan kata lain, persoalan-persoalan yang sama di antara petani Wajik telah mempersatukan sebagian besar kehidupan sosial dan politik mereka.

Kegiatan gotong royong atau lebih dikenal masyarakat Wajik dengan istilah "Brokoan", tidak hanya menyangkut pelaksanaan pekerjaan di bidang pertanian, tetapi juga pada kegiatan-kegiatan sosial. Pada kegiatan di bidang pertanian, kegiatan gotong

royong biasanya dilakukan saat menanam padi (*tandur*) dan menuai padi. Pada pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan tersebut, penduduk yang turut bekerja diberi makan oleh pemilik lahan. Gotong royong semacam ini saat ini sudah tidak berlaku lagi di Wajik. Para pemilik lahan yang memerlukan bantuan tenaga untuk menanam atau memanen hasil pertanian mereka harus membayar sejumlah uang, menyediakan makanan dan sebungkus rokok. Hal ini terkait dengan kesadaran penduduk bahwa sistem gotong royong semacam ini lebih banyak menguntungkan pemilik lahan daripada penduduk yang tidak punya lahan atau lahannya sempit. Seperti dituturkan seorang subjek penelitian (Kj) sebagai berikut.

"Coro brokoan kanggo nggarap sawah koyo biyen iku akeh ngontongno wong sing sugih timbangane sing melarat. Mosok wong dijaluk kerjo mek diupahi mangan, sing sugih tak iso ngirit. Nek diterusno brokoan iku gawe sing sugih tambah sugih, sing melarat tambah melarat."

(Cara gotong royong untuk mengolah sawah seperti dulu itu banyak menguntungkan orang kaya daripada orang miskin. Masak orang diminta kerja hanya diberi upah makan, yang kaya tentu bisa berhemat. Kalau diteruskan gotong royong itu membuat orang kaya bertambah kaya, orang miskin semakin miskin.)

Di Wajik seperti halnya pada desa-desa lain di Lamongan, gotong royong pada kegiatan-kegiatan sosial nampak seperti pada saat kesusahan (sakit, meninggal), melaksanakan pesta-pesta (pernikahan, khitanan), memperbaiki rumah., dan pada pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut kepentingan umum seperti pembuatan (perbaikan) jalan, jembatan dan sebagainya.

5.4.6.2 Sedekah Bumi

Sedekah Bumi merupakan sebuah ritual tradisional yang sudah sangat lama hidup di Wajik. Secara harfiah istilah Sedekah Bumi diartikan sebagai saat menyedekahi bumi.

Nilai yang terkandung dan banyak dipahami penduduk dari tradisi ini adalah sebuah upaya mensyukuri nikmat Tuhan dan berbalas budi terhadap segala apa yang telah diberikan bumi atau tanah sehingga manusia bisa menanam berbagai tanaman dan memetik hasilnya untuk hidup mereka.

Upacara Sedekah Bumi diadakan setiap tahun terutama sesudah panen padi yang pertama. Biasanya waktu pelaksanaan diputuskan bersama dalam sebuah musyawarah penduduk dimana hari pelaksanaan haruslah hari Jum'at Kliwon. Pada malam Jum'at Kliwon tersebut, sehabis magrib, sambil membawa aneka makanan penduduk berkumpul di kuburan desa untuk membaca Yasin dan Tahlil dipimpin oleh tokoh agama setempat. Sedangkan anak-anak dan para pemuda mengadakan pembacaan Yasin dan Tahlil di Masjid.

Setelah pembacaan Yasin dan Tahlil selesai, Sedekah Bumi dilanjutkan dengan *melean* (begadang) bersama menikmati pertunjukkan wayang semalam suntuk. Hampir setiap tahun Dalang Anom Subroto dari Lamongan diundang penduduk untuk memeriahkan upacara Sedekah Bumi. Pada malam Sedekah Bumi ini berbagai macam *jajan* (makanan) mengalir dari rumah-rumah penduduk untuk dinikmati bersama-sama di lapangan desa. Pada pagi hari Jum'at Kliwon, sebagai acara inti upacara Sedekah Bumi adalah ceramah Sedekah Bumi di masjid. Pada acara ini, setiap penduduk membawa *tumpeng* yang dimakan setelah modin memberikan ceramah dan memimpin do'a bersama. Mereka bersama-sama berdo'a semoga usaha cocok tanam penduduk mendapatkan hasil yang lebih baik, seluruh penduduk desa hidup dalam ketenteraman dan kesejahteraan.

BAB 6

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam penjabaran Bab 6, peneliti menelaah keberadaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Petani Wajik dengan memandang bahwa KSM Petani Wajik ini sebagai suatu organisasi sosial. Sebagaimana tujuan penelitian, disamping melakukan telaah terhadap organisasi kelompok tani itu sendiri, akan dilihat pula kaitannya dengan lingkungan tempat kelompok tani berada. Oleh sebab itu, kerangka telaan mengenai organisasi kelompok tani ini akan meliputi:

- 6.1 Keadaan KSM Petani Wajik yang mencakup; Sejarah berdirinya kelompok; Struktur organisasi kelompok; Elit dan kepemimpinan kelompok; Keterlibatan anggota kelompok; Pembagian fungsi-fungsi di dalam kelompok.
- 6.2 Hubungan kelompok tani dengan masyarakat desa.
- 6.3 Hubungan kelompok tani dengan pemerintah desa.
- 6.4 Hubungan kelompok tani dengan organisasi sosial lainnya.

6.1 Keadaan KSM Petani Wajik

6.1.1 Sejarah Berdirinya Kelompok

Proses berdirinya KSM Petani Wajik tidak bisa dilepaskan dari latar kondisi yang dihadapi petani Wajik. Seperti tergambar pada bagian sebelumnya (Bab V), sebagian besar petani Wajik adalah para petani kecil dengan skala luas lahan rata-rata kurang dari 0,3 Ha. Kecilnya skala usaha tani (lahan dan produktifitas) tersebut menyebabkan petani Wajik menghadapi dua masalah pokok. Dua masalah tersebut adalah lemahnya

permodalan dan kenyataan akan kecilnya pendapatan usaha mereka. Seperti diungkapkan subyek penelitian (Nw) sebagai berikut.

“Memang tidak semua petani miskin lahan, namun secara umum memang lebih banyak petani yang hanya punya lahan sempit dan bahkan sebagai buruh tani dibanding dengan yang mempunyai lahan luas. Untuk menanam, modalnya dari pinjam sana-sini dan waktu panen kalau dihitung-hitung antara biaya produksi dengan hasil produksi *ora sumbut* (minus; pen)”.

Terkait erat dengan masalah kecilnya lahan, produktifitas, permodalan dan pendapatan, persoalan mendasar lain adalah keterbatasan teknologi yang diterapkan. Hal ini terutama disebabkan oleh rendah tingkat pendidikan formal yang ditempuh oleh sebagian besar petani. Dari Profil Desa Wajik tahun 2000 diperoleh data bahwa angka buta aksara terbesar berada pada golongan usia di atas 25 tahun (320 Orang). Sedangkan dari 1222 orang penduduk, 867 orang di antaranya hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat. Di lain pihak, berbagai program penyebarluasan teknologi pertanian yang dilaksanakan melalui penyuluhan pertanian sering hanya dapat dinikmati manfaatnya oleh sebagian kecil warga Wajik yang menempati stratifikasi sosial atas. Sedangkan bagi para petani kecil, untuk penambahan peralatan sering tidak dapat mereka lakukan karena rendahnya pendapatan dan investasi mereka.

Masalah lain yang dihadapi petani Wajik adalah ketidakberdayaan di dalam pemasaran hasil pertanian mereka. Untuk pemasaran padi misalnya, pada bulan September 2000 para petani Wajik menerima harga gabah dari tengkulak jauh di bawah harga dasar yang telah ditentukan pemerintah. Petani Wajik terpaksa melepaskan gabah kering panen (GKP) dalam kisaran harga Rp. 700 – Rp. 850. Padahal ketentuan pemerintah untuk harga dasar GKP pada saat itu adalah Rp. 1.200 (Jawa Pos: 8 September 2000). Dibanding dengan harga pupuk, bibit serta biaya perawatannya,

dengan harga jual sebesar itu umumnya petani mengalami kerugian dalam usaha tani mereka. Kondisi seperti ini hampir dari tahun ke tahun berlangsung tanpa adanya kemampuan petani memperkuat kekuatan tawar mereka dengan tengkulak.

Sebagai satu-satunya saluran pemasaran hasil panen petani Wajik, para tengkulak ini di dalam kegiatan kerjanya sering berperan ganda. Selain mereka bertindak sebagai pedagang dengan membeli hasil produksi petani, para tengkulak di Wajik sekaligus juga berperan sebagai pemberi pinjaman uang ketika petani menghadapi masa-masa kritis, misalnya untuk membeli bibit, pupuk, sakit, hajatan, dan lain-lain. Jadi hubungan antara petani dengan tengkulak bukan lagi sekedar hubungan bisnis tetapi cenderung berubah menjadi hubungan balas budi antar dua pihak yang saling terikat dalam *patron-client*. Sementara itu, keberadaan lembaga-lembaga perdagangan dan perkreditan seperti koperasi/KUD ataupun Bank Desa rupanya tidak mampu menjangkau para petani Wajik. Kedua lembaga ini dinilai masyarakat tidak mampu memberi pelayanan sebaik dan semudah pelayanan para tengkulak kepada mereka. Mekanisme persyaratan dan agunan pinjaman bank dirasa menyulitkan dan tidak mampu dipenuhi oleh mereka.

Di tengah upaya memecahkan masalah-masalah yang kait-mengkait dan tidak berujung pangkal demikian, muncullah prakarsa di antara petani Wajik untuk berhimpun dalam sebuah kelompok tani. Prakarsa pendirian kelompok tani datang dari subyek penelitian (Rw), (As), dan (Sh) setelah ketiganya mengikuti Pelatihan Organisasi Petani yang diadakan oleh Tim Kerja Forum Petani Lamongan pada tanggal 20-21 Juli 2000. Mereka sepakat untuk segera membentuk sebuah organisasi petani di Desa Wajik yang benar-benar mencerminkan aspirasi petani Wajik dan mampu memecahkan masalah-

masalah petani secara bersama-sama. Ketika ditanyakan tentang motivasi mereka memelopori pembentukan kelompok tani, Bapak (Rw) menjelaskan sebagai berikut.

“Di Wajik ini sebenarnya sudah ada kelompok tani namanya yaitu kelompok Tani Subur. Kelompok Tani Subur ini hanya ada kegiatan waktu ada pinjaman KUT (Kredit Usaha Tani; pen) saja, padahal kita ini butuh kelompok tani yang aktif tidak hanya kalau ada kredit saja tapi aktif memperhatikan keluhan petani. Ada musyawarah-musyawarah yang membahas jalan keluar masalah petani. Pokoknya ada organisasi yang sesuai harapan petani”.

Pada tanggal 23 Juli 2000 pukul 19.30 WIB diadakan pertemuan warga desa dimana sebelumnya telah disosialisasikan bahwa pertemuan di rumah Asmadi ini dalam rangka membentuk kelompok tani. Dalam pertemuan ini tercatat 25 petani Wajik hadir dan mengajukan diri sebagai anggota kelompok. Sedangkan Pernyataan Pendirian ditandatangani di atas kertas segel oleh subyek penelitian (Rw), (As) dan (Sh). Pertemuan sekaligus pula memutuskan nama kelompok tani dengan Kelompok Swadaya Masyarakat Petani Wajik dan memilih secara aklamasi (Rw) sebagai ketua kelompok tani KSM Petani Wajik.

Mengacu pada Bab IV Pasal 6 Anggaran Dasar (AD) KSM ini, tujuan pendirian KSM Petani Wajik adalah (a) menyelesaikan masalah-masalah petani/anggota secara bersama-sama (b) meningkatkan kesejahteraan petani/anggota, (c) pengembangan pengetahuan dan keterampilan usaha tani petani/anggota, (d) meningkatkan kekuatan posisi petani/anggota dalam pemasaran hasil panen, (e) terciptanya jaringan kerja dan komunikasi antar petani Wajik dan petani pada umumnya.

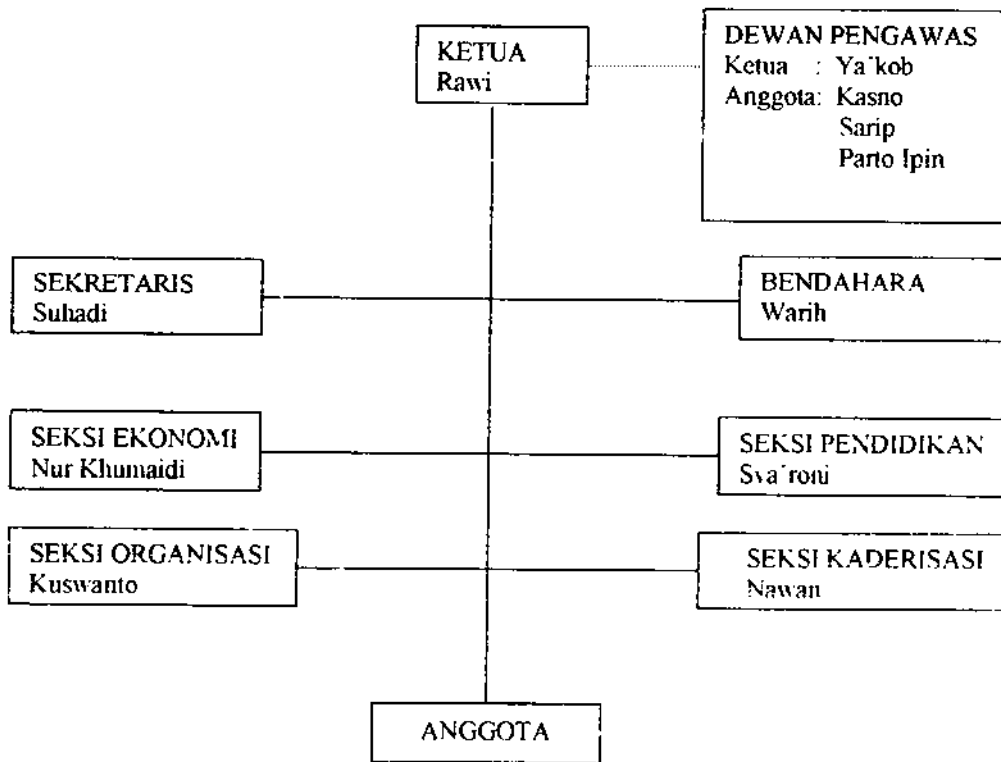
Dilihat dari latar belakang pendirian dan tujuan KSM, maka perlu dicatat tiga aspek penting yang menonjol yaitu bahwa KSM berangkat dari kesamaan kepentingan (ekonomi) antar petani wajak, KSM merupakan kehendak dari bawah atau dari petani sendiri (bukan dari pemerintah), dan KSM merupakan wujud urgensi menjawab masalah

atau tantangan tertentu dalam kehidupan petani Wajik. Lebih jauh, hal ini berkesesuaian dengan apa yang dikemukakan Sajogyo (1978) mengenai alasan-alasan pembentukan kelompok tani. Dikemukakan Sajogyo bahwa kelompok tani yang sedang berkembang di Indonesia saat ini dapat dikatakan merupakan suatu “organisasi pamrih”, karena pembentukannya dimaksudkan untuk mencapai tujuan ekonomi yaitu menaikkan kemakmuran dari kenaikan pendapatan dan produktifitas serta distribusi yang lebih merata.

6.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi di dalam sebuah kelompok tani dimaksudkan sebagai perangkat pelaksana bagi berjalannya aktifitas organisasi petani. Sebuah organisasi yang kuat haruslah memiliki struktur yang sederhana dan fleksibel bagi anggotanya. Kekuatan struktur seringkali harus disertai dengan mekanisme kerjasama berbentuk jaringan kerja (*net working*) untuk mengoptimalkan gerakan perubahan yang diinginkan. Jaringan ini dapat dijadikan sebagai media untuk penyebaran (*diseminasi*) informasi, serta pembagian peran dan kerja di tingkat wilayah kerja organisasi (Akbar:2001).

Pada intinya struktur organisasi KSM Petani Wajik berisi tiga komponen yaitu Dewan Pengawas, Dewan Pengurus dan Anggota Kelompok. Berikut adalah struktur organisasi KSM Petani Wajik. Struktur Organisasi KSM Petani Wajik dibisa lebih jelas bisa dilihat pada Gambar 6.1 di halaman berikut ini.



Gambar 6.1 Struktur Organisasi KSM Petani Wajik

Dari bagan struktur organisasi KSM Petani Wajik di atas dapat dilihat bahwa hubungan antara Pengurus dengan Dewan Pengawas bersifat koordinatif. Hal ini dimaksudkan bahwa otoritas dan wewenang Pengurus dalam hal ini ketua kelompok tidak boleh terlepas dari garis umum kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas. Adapun garis besar kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan Dewan Pengurus KSM Petani Wajik adalah (AD/ART KSM Petani Wajik);

1. Melakukan berbagai bentuk pendidikan bagi kader organisasi yang menjadi anggota.
2. Memberikan layanan informasi tentang peluang dan tantangan serta permasalahan yang dapat disikapi oleh anggota.

3. Melaksanakan usaha-usaha pemberdayaan ekonomi khususnya penyediaan modal, saprodi dan pemasaran hasil pertanian anggota.
4. Melakukan kegiatan-kegiatan kerjasama dengan organisasi tani atau organisasi lainnya yang mempunyai pandangan asas dan tujuan yang sejalan dengan KSM Petani Wajik.
5. Menjalin hubungan yang setara dengan aparaturnegara dan bersifat kritis.

Dari bagan struktur organisasi KSM Petani Wajik tersebut juga terungkap bahwa dilihat dari pola hubungan kerja serta lalu lintas wewenang dan tanggung jawab, kelompok tani ini mendasarkan diri pada prinsip organisasi garis. Hal ini bisa dilihat dari alur otoritas dan wewenang serta sistem komunikasi antar pengurus maupun anggota berjalan menurut hirarki, dimana komando organisasi berada pada satu tangan yakni ketua kelompok tani. Demikian pula dengan proses pengambilan keputusan kelompok berjalan dengan cepat karena ketua kelompok tani hanya berkonsultasi dengan dewan pengawas.

Mengenai bentuk struktur organisasi demikian, koordinator seksi organisasi (Ku) mengatakan alasan-alasan sebagai berikut.

Kelompok tani kita ini masih sangat kecil. Yang penting bagi kami adalah setiap pengurus mempunyai kemauan yang keras menjalankan tugas-tugasnya. Walaupun tanggung jawab dan kekuasaan sepertinya terpusat di ketua, tapi *khan* antara kita dan para petani di desa ini saling kenal. Pengawasan saya kira dilakukan semua anggota secara langsung. Dewan pengawas itu biasanya *resmi-resmian* (formalitas:pen) saja.

Di sini bisa diungkap bahwa (Ku) sepertinya telah memahami bahwa bentuk organisasi garis demikian mengandung sejumlah kelemahan. Mengacu pada pendapat Manullang, organisasi garis memiliki kelemahan-kelemahan antara lain; (1) Seluruh organisasi terlalu bergantung kepada satu orang sehingga kalau seseorang itu tidak

mampu, seluruh organisasi akan terancam kehancuran. (2) Adanya kecenderungan pimpinan bertindak secara otokratis dan (3) Kesempatan staf pengurus untuk berkembang terbatas (Manullang:1988).

6.1.3 Elit dan Kepemimpinan Kelompok

Untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, sebagaimana lazimnya yang berlaku pada setiap kelompok kegiatan, adanya kepemimpinan yang efektif sangat diperlukan oleh setiap kelompok tani. Dari uraian tentang struktur organisasi di atas, sekaligus sudah dapat dilihat bahwa pengurus dan dewan pengawas KSM Petani Wajik merupakan elit dari organisasi kelompok tani tersebut. Tentang kepemimpinan elit kelompok tani ini, subyek penelitian (As) sebagai salah seorang pendirinya mengatakan;

Siapapun pemimpin kelompok tani ini, dia harus memiliki kemampuan memimpin dan kemauan untuk memimpin. *Pokoknya* dia harus bisa membuat anggota mengikutinya. Sanggup memelopori kegiatan-kegiatan kelompok tani yang bermanfaat bagi anggotanya dengan pengaruhnya.

Ditinjau dari tipologi kepemimpinan elit kelompok tani ini, meminjam peristilahan Etzioni maka dapat dikatakan bahwa elit kelompok tani merupakan *elite formal*. Hal ini disebabkan karena;

1. Pengurus dan Dewan Pengawas KSM Petani Wajik memperoleh kekuasaan berdasarkan kedudukannya sebagaimana diatur dalam AD/ART.
2. Pengurus dan Dewan Pengawas KSM Petani Wajik memiliki kekuasaan yang bersumber pada kharisma pribadi, sebab baik pengurus maupun dewan pengawas adalah petani-petani yang diakui oleh petani Desa Wajik sebagai petani yang berhasil usaha taninya, dan dipandang mampu memimpin anggota KSM.

Bisa disebut misalnya proses pemilihan (Rw) sebagai ketua KSM Petani Wajik. Sebagai sarjana lulusan STIKIP Lamongan tahun 1987, (Rw) telah begitu dikenal sebagai tokoh masyarakat yang banyak dipercaya untuk menangani masalah-masalah kemasyarakatan Desa Wajik. Di samping sebagai pengelola lumbung desa di Dusun Klitih, hampir setiap tahun beliau juga dipercaya warga dalam pengadaan garam dan pupuk (urea dan TSP) untuk dibeli para petani secara kredit. (Rw) yang begitu besar perannya dalam usaha pertanian warga menempatkan dirinya dalam jajaran sosok yang berpengaruh (kharismatis) di lingkup Desa Wajik. Ketika penelitian ini mulai dilaksanakan, (Rw) memulai satu lagi perannya yaitu sebagai anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Wajik.

Ditinjau dari gaya kepemimpinan di dalam kelompok tani, masih begitu lebarnya kesenjangan kemampuan berorganisasi antara pengurus dan anggota membuat gaya kepemimpinan kelompok cenderung otokratik. Gaya kepemimpinan demikian juga dimungkinkan dari masih kuatnya budaya paternalistik di masyarakat Wajik. Segi positifnya, dalam menghadapi ketergantungan anggota kepada pengurus dan dalam situasi kritis, para pengurus KSM dapat melakukan tindakan atau keputusan tegas dan cepat. Segi negatifnya, pengembangan kapabilitas dan partisipasi anggota kelompok menjadi terbatas. Persoalan ini sangat disadari oleh pengurus KSM sebagaimana diungkapkan subyek penelitian (Sy), koordinator seksi pendidikan;

“Usaha menumbuhkembangkan peranserta daripada anggota yaitu kita tempuh lewat pelaksanaan musyawarah anggota setiap bulan. Di pertemuan itu kita berupaya merembukkan masalah bersama, semua boleh bicara”

6.1.4 Keterlibatan Anggota Kelompok

Keterlibatan anggota dalam kelompok tani salah satunya mengacu pada konsep motivasi keikutsertaan anggota di dalam sebuah organisasi. Hasil wawancara dengan sejumlah anggota KSM Petani Wajik mengungkapkan bahwa motivasi yang paling menonjol keikutsertaan mereka dalam kelompok tani terutama adalah keinginan meningkatkan kemampuan berusaha tani dan pemenuhan kebutuhan mereka.

Para petani Wajik khususnya di Dusun Klitih memandang KSM Petani Wajik mampu memberi alternatif pemecahan masalah permodalan usaha tani mereka. Daripada meminjam uang di bank dengan prosedur yang menurut mereka berbelit ataupun meminjam uang dari rentenir dengan bunga tinggi, KSM menjadi pilihan yang paling aman untuk mereka. Subyek penelitian (Sa), salah seorang anggota KSM mengatakan sebagai berikut.

"Sak derenge wonten KSM kulo utang mes (urea:pen) saking tiyang lintu. Saking tiyang niku, setengah kuintal diregeni Rp 60.000,- sawise tigang sasi utawi sawise panen kulo kudu nyaur Rp. 75.000,-. Terang mawon coro utang kados ngoten niku abot, tapi yok nopo malih lawong kebutuhan. Sawise tumut KSM, bunga utang mes niku luwih alit. Setunggal kuintale regine Rp. 120.000,-, nyaure ing tigang sasi Rp. 135.000,-. Dik Rawi (Ketua KSM:pen) niku kadosé saget madosaken utang-utangan pupuk sing sarat bungae alit."

("Sebelum ada KSM saya pinjam pupuk dari orang lain. Dari orang tersebut, setengah kuintal dihargai Rp. 60.000,-. Setelah tiga bulan atau sehabis panen saya harus melunasi Rp. 75.000,-. Terang saja cara pinjam seperti itu berat, tapi bagaimana lagi kalau memang itu kebutuhan. Setelah ikut KSM, bunga pinjaman pupuk itu lebih kecil. Satu kuintal harganya Rp. 120.000,-, pelunasannya tiga bulan Rp. 135.000,-. Dik Rawi (Ketua KSM:pen) itu sepertinya bisa mencari pinjaman pupuk yang syarat bunganya kecil.")

Subyek lain, (Ka) mengemukakan bahwa kesertaan dia dalam KSM diantaranya karena memandang KSM sebagai wadah kebersamaan petani untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang dunia pertanian.

"Kula lan khususipun lingkungan Klitih niku petani dados pentinge nggih kedah wonten organisasi kados KSM. Nggih mugi-mugi mawon KSM niku saget dibentuk secara sae, dados mangke warga tani mriki saget konsultasi sing secara sae utawi saget maju."

(Saya dan khususnya lingkungan Klitih itu petani jadi penting sekali keberadaan organisasi seperti KSM. Semoga saja KSM ini bisa dikelola secara baik, jadi nantinya warga tani di sini bisa konsultasi dengan baik atau bisa maju)

Hal ini kiranya dapat disimpulkan bahwa keterlibatan anggota dalam kelompok tani merupakan keterlibatan *calculative* atau berdasarkan perhitungan untung-rugi. Anggota KSM Petani Wajik memandang bahwa dengan keikutsertaan mereka di dalam kelompok bisa memberikan keuntungan bagi usaha tani mereka. Tentunya dalam hal ini tidak hanya keuntungan material tetapi juga keuntungan dari hasil kebersamaan mereka dalam KSM yang berorientasi pada kesejahteraan anggota sebagai tujuannya.

6.1.4.1 Struktur Kepatuhan Pamrih

Selanjutnya, aspek yang penting pula dikaji dalam keterlibatan anggota kelompok adalah kepatuhan anggota kelompok. Di sini kepatuhan selain menunjukkan satu hubungan dalam mana seseorang pelaku sosial berperilaku dalam kaitannya dengan kepemimpinan yang dianut oleh kekuasaan orang lain, juga menunjukkan pandangan seseorang anggota terhadap kekuasaan yang diterapkan (Etzioni:1961). Maka terkait dengan kepatuhan organisasi, beberapa hal yang melandasi aktifitas anggota di dalam kelompok tani di antaranya adalah struktur kepatuhan anggota dan pengakuan terhadap pengurus kelompok.

Sebagai organisasi yang memiliki tujuan ekonomi, struktur kepatuhan anggota di dalam KSM Petani Wajik cenderung bersifat pamrih. Seperti terungkap dari salah seorang subyek penelitian, (Ak) sebagai berikut.

"Rumiyen kulo tumut kelompok tani ten balai desa (HKTI:pen), kulo mboten ngraosaken hasil napo-nopo. Jamane kredit KUT mawon kulo mboten angsal. Yen pengurus KSM niku podo roto kalian anggota. Istilahe wonten yotro sak juta nggih didum rata."

("Dulu saya ikut kelompok tani (HKTI:pen), tetapi setelah saya ikut pertemuan di balai desa, saya tidak menikmati hasil sama sekali. Saat kredit KUT saja saya tidak mendapatkan. Kalau pengurus KSM itukan sama rata kepada anggota. Istilahnya ada uang satu juta ya dibagi rata")

Kepatuhan pamrih juga terungkap dari subjek lain, (No) mengungkapkan alasannya mengikuti kegiatan yang dipelopori pengurus KSM sebagai sebagai berikut.

"Menawi mboten nderek kegiatan KSM kulo sering ketinggalan informasi kados regi gaba utawi emes. Pinten bayarane preman kadang kula tanglet nang pengurus."

("Kalau tidak ikut kegiatan KSM saya sering ketinggalan informasi seperti harga gabah atau pupuk". Berapa upah buruh tani kadang saya tanya ke pengurus")

Alasan dari (No) lebih memperjelas bahwa landasan aktifitas anggota lebih didasarkan pada hasrat mendapatkan sesuatu yang berguna bagi usaha pertanian mereka. Di sini juga anggota memberikan pengakuan kepada pengurus KSM sebagai sosok yang lebih memiliki kemampuan dan keterampilan sekaligus kebijaksanaan daripada anggota.

Seperti juga yang dikatakan subyek penelitian lain, (Sb) sebagai berikut.

Wong tani niku pun soro, mugi mawon KSM saget ngangkat derajate petani. Nopomaleh pengurus KSM niku pun tiyang-tiyang pentolan ten lingkungan mriki. Pokoke nek Dik Rawi, Cak Nur lan Pak Sarip pun gerak, sedanten warga mesti gerak "

("Petani itu sengsara, semoga saja KSM mampu mengangkat derajat petani. Apalagi pengurus KSM itu sudah orang-orang terkemuka di lingkungan sini. Pokoknya kalau Dik Rawi, Cak Nur (Nur Khumaidi:pen) dan Pak Sarip gerak, semua warga pasti gerak").

Subyek lain yang memiliki pandangan yang senada dengan (Sb) adalah (Ud).

Berkenaan dengan keberadaan pengurus KSM, ia berpendapat.

“Mereka itu *kan* sudah dipilih oleh anggota untuk melaksanakan program kerja organisasi. Kita pun tidak sembarangan memilih orang”.

6.1.4.2 Partisipasi Kegiatan

Dalam pengertian sehari-hari, partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu, atau warga masyarakat) di dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksudkan di sini bukanlah bersifat pasif, tetapi secara aktif ditunjukkan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, menurut Theodorsen (1969) partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang di dalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakat, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Tumbuhnya partisipasi anggota dalam organisasi menurut Verhangen pada hakekatnya sangat ditentukan oleh adanya kesadaran anggota organisasi. Tetapi untuk tumbuhnya partisipasi sebagai tindakan yang nyata, diperlukan adanya tiga persyaratan yang menyangkut adanya kemauan, kemampuan dan kesempatan untuk berpartisipasi (Slamet:1983 dalam Mardikanto:1994). Kemauan berpartisipasi dapat muncul oleh adanya motif intrinsik (dari dalam diri sendiri) maupun ekstrinsik (karena rangsangan, dorongan atau tekanan dari luar).

Adanya kemauan untuk berpartisipasi belum tentu akan menjamin partisipasi seperti yang diharapkan jika yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk dapat berpartisipasi. Kemampuan yang hendaknya dimiliki seorang anggota organisasi untuk berpartisipasi diantaranya; kemampuan mengidentifikasi

masalah, memahami kesempatan untuk memecahkan masalah dan kemampuan memecahkan masalah. Memecahkan masalah diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tindakan pembangunan dengan pengetahuan dan keterampilan dan sumberdaya lain yang dimiliki. Kemauan dan kemampuan berpartisipasi sebenarnya belum menjamin tumbuhnya partisipasi, jika kepada anggota tidak diberikan dan ditunjukkan adanya kesempatan untuk berpartisipasi.

Temuan lapangan mengenai partisipasi anggota KSM Petani Wajik menunjukkan bagaimana cara pandang mereka terhadap partisipasi. Pemahaman mereka tentang partisipasi seringkali representasikan dalam perilaku keikutsertaan mereka dalam kegiatan-kegiatan atau usaha yang dilaksanakan oleh kelompok. Subyek penelitian yang memandang partisipasi dalam kerangka pemahaman ini di antaranya (Ir). Ketika ditanya bagaimana berpartisipasi dalam KSM, ia menjawab sebagai berikut.

"Partisipasi itu ya..., mengikuti apa saja yang menjadi kegiatan KSM. Kita rajin menghadiri *sarasean* (pertemuan bulanan:pen), ikut pengajian dan kerja bakti. Dengan ikhlas pasti akan berguna juga bagi kita.

Makna partisipasi yang agak berbeda dikemukakan oleh subyek penelitian lain yakni (Sd). Ia mengatakan sebagai berikut.

"Biyen pemerintah mesti nganjurno warga berpartisipasi kanggo pembangunan, opo iku rupo tarikan utawa tenaga. Nek kelompok tani nang kene, partisipasi yo rupa ngono maeng tapi lak katon hasile, kanggo opo utawa kanggo sopo, lak jelas."

("Dulu pemerintah pasti menganjurkan warga berpartisipasi untuk pembangunan, apakah itu berupa iuran atau tenaga. Kalau kelompok tani di sini, partisipasi ya berupa seperti itu tapi *khan* kelihatan hasilnya, untuk apa atau untuk siapa *khan* jelas.

Dari pemahaman partisipasi subyek penelitian (Sd) terungkap bahwa partisipasi dimaknai sebagai suatu pemberian masukan secara sukarela terhadap suatu kegiatan

organisasi dimana pemberi menerima imbalan atau manfaat dari hasil masukan yang diberikan. Di sini partisipasi diukur dari kemanfaatan yang didapat atau dirasakan oleh pemberi masukan (anggota organisasi) secara langsung.

Sedangkan subyek penelitian seperti (Jn), cenderung memandang partisipasi sebagai kesempatan anggota mempengaruhi segala keputusan organisasi. Ketika ditanyakan bagaimana dia berpartisipasi di dalam KSM, dikatakannya sebagai berikut;

“Dengan mengetahui semua keluhan anggota, pengurus membahasnya di dalam *sarasean*. Dalam rapat itu kita menjadi orang yang dihargai usul-usul kita. Jadi kita bisa dilibatkan di dalam memecahkan masalah kelompok tani....ya dari *sambate* anggota Saya kira paling kelihatan partisipasi kita itu kalau kita ada di *sarasean* itu tadi.

Paling tidak dari dari keterangan subyek penelitian (Jn) tersebut terungkap bahwa terjadi perubahan pola berpikir masyarakat saat ini tentang makna partisipasi di dalam pembangunan atau organisasi. Umumnya masyarakat memahami partisipasi sebagai sumbangsih tenaga kerja mereka di dalam aktifitas pembangunan yang dipelepori oleh para pakar perencanaan pembangunan (Sanit:1982).

Sedangkan penjelasan (Jn) lebih mencerminkan sebuah kebutuhan akan suatu penghargaan atas inisiatif atau gagasan yang berasal dari masyarakat bawah. Lebih dari itu, partisipasi menjadi sebuah keterlibatan anggota atau warga masyarakat dalam arti luas. Mereka selalu berusaha untuk melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan demi tercapainya tujuan akhir yang diinginkan, demi masa depan yang lebih baik bagi kehidupan mereka.

6.1.5 Pembagian Fungsi-Fungsi Di Dalam Kelompok

Uraian mengenai struktur organisasi pada bagian terdahulu secara implisit menunjukkan bahwa di dalam organisasi KSM Petani Wajik dikenal adanya pembagian tugas pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi. Dari struktur organisasi KSM Petani Wajik terungkap bahwa pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi terbagi kepada;

1. Dewan Pengawas
2. Dewan Pengurus, yang terdiri dari:
 - Ketua KSM
 - Sekretaris
 - Bendahara
 - Koordinator Seksi

Mengacu pada rumusan AD/ART dan program kerja KSM Petani Wajik maka didapatkan gambaran pembagian fungsi – fungsi organisasi sebagai berikut;

Dewan Pengawas memiliki fungsi-fungsi (ART Bab III Pasal 8):

1. Sebagai dewan legislatif organisasi
2. Menyusun garis besar kegiatan organisasi
3. Mengawasi pelaksanaan program-program kerja oleh Dewan Pengurus
4. Mengadakan Musyawarah Anggota setiap 2 tahun sekali untuk memilih Dewan Pengurus.

Dewan Pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator seksi ekonomi, Koordinator seksi organisasi, Koordinator seksi pendidikan, dan Koordinator seksi kaderisasi masing-masing memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut;

Ketua memiliki fungsi-fungsi (ART Bab VI Pasal 17):

1. Memberikan keputusan-keputusan untuk pelaksanaan program kerja.
2. Mengatur pembagian kerja antar bagian di Dewan Pengurus
3. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pengurus dibawahnya di dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.
4. Menyusun strategi pemecahan masalah anggota atau masalah organisasi KSM.
5. Menyusun laporan pertanggungjawaban di hadapan musyawarah anggota.

Sekretaris memiliki fungsi-fungsi (ART Bab VI Pasal 18):

1. Membantu ketua KSM dalam menjalankan program kerja organisasi dan tertib organisasi.
2. Mengadakan inventarisasi terhadap segala harta dan hak milik organisasi.
3. Memegang wewenang dalam bidang administrasi organisasi.
4. Bersama-sama ketua menandatangani surat-surat organisasi.
5. Mewakili tugas ketua apabila ketua berhalangan dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Pengawas.

Bendahara memiliki fungsi-fungsi (ART Bab VI Pasal 19):

1. Membantu ketua dalam mengatur pengelolaan keuangan KSM.
2. Memegang kewenangan dalam bidang keuangan KSM.
3. Mempertanggungjawabkan penggalan, pengelolaan dan penggunaan keuangan KSM.
4. Bersama ketua menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan masalah keuangan KSM.

Sedangkan fungsi-fungsi koordinator seksi masing-masing dapat diungkap dari Program Kerja KSM Petani Wajik Tahun 2000-2002 sebagai berikut,.

Koordinator Seksi Ekonomi:

1. Membentuk kelompok usaha bersama berbentuk koperasi.
2. Meningkatkan tingkat produksi pertanian anggota melalui kemudahan mendapatkan Saprodi.
3. Membuka peluang pemasaran hasil pertanian anggota.
4. Meningkatkan kemudahan anggota mendapatkan kredit permodalan.
5. Mengembangkan hubungan ekonomi dengan petani di luar KSM.

Koordinator seksi Organisasi.

1. Mengembangkan wilayah kerja KSM Petani Wajik.
2. Menciptakan berbagai pelayanan organisasi untuk memecahkan masalah-masalah anggota.
3. Mempersiapkan berbagai perlengkapan dan peralatan pertemuan anggota setiap bulan.
4. Membuat kartu tanda anggota dan kelengkapan identitas organisasi yang lain..
5. Mengembangkan hubungan organisasi yang baik dengan masyarakat, pemerintah dan organisasi lain.

Koordinator Seksi Pendidikan:

1. Menyelenggarakan penyuluhan-penyuluhan pertanian baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pemerintah atau lembaga lain.
2. Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan anggota.
3. Menentukan delegasi KSM untuk menghadiri undangan pendidikan atau pelatihan pertanian dari pihak luar.
4. Menyediakan bahan-bahan pendidikan dan informasi bagi anggota.

Koordinator seksi Kaderisasi:

1. Meningkatkan jumlah anggota KSM Petani Wajik.
2. Menyelenggarakan pendaftaran anggota setiap tahun.
3. Mengarahkan para pemuda desa untuk berpartisipasi dalam KSM
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi pemuda dalam rangka memperkuat organisasi.

Dengan kenyataan mengenai pembagian fungsi organisasi dalam KSM Petani Wajik, menunjukkan bahwa kelompok tani ini bukan lagi merupakan organisasi yang diartikan sebagai lembaga atau organisasi informal lagi, melainkan lebih sebagai organisasi formal. Hal ini lebih jelas bila mengacu pada tabel dikotomis antara lembaga atau organisasi informal dan formal sebagai berikut (Tjondronegoro, 1982).

| No | Gejala Organisasi Informal | Gejala organisasi Formal |
|-----|---|--|
| 1. | Orientasi pada kebutuhan (<i>need</i>) | Orientasi pada tujuan (<i>goal</i>) |
| 2. | Keragaan lebih berdasarkan pada peranan yang dimainkan. | Keragaan lebih berdasarkan pada tugas yang dilaksanakan. |
| 3. | Lebih bersifat upacara (<i>ceremonial</i>) | Lebih bersifat prosedural |
| 4. | Pengakuan pada waktu lama karena harus membudaya. | Pengakuan dapat berlangsung dengan cepat karena berdasarkan formalitas pembentukan (didirikannya). |
| 5. | Keterlibatan tidak mudah melepaskan diri karena merupakan pranata sosial. | Keterlibatan mudah melepaskan diri segera setelah tidak ada kecocokan tujuan. |
| 6. | Merupakan tradisi yang turun temurun | Tergantung pada kegunaan. |
| 7. | Pengakuan diperoleh dengan studi empirikal | Pengakuan cukup dengan gagasan (pengertian tentang konseptual). |
| 8. | Keseragaman perbuatan berdasarkan pada norma. | Keseragaman lebih terikat pada tujuan yang diinginkan. |
| 9. | Pengakuan terhadap "elit"nya lebih berdasarkan pada usia dan gengsi. | Pengakuan terhadap "elit"nya lebih berdasarkan pada kemampuan dan keterampilan. |
| 10. | Perlu pengawasan sosial. | Pengawasan berupa peraturan. |
| 11. | Pelaku sosial boleh diarahkan. | Pelaku lebih dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan. |

Tabel 6.1 Gejala – gejala organisasi informal dan organisasi formal

Dari Tabel 6.1, terlihat bahwa baik organisasi informal maupun organisasi formal, keduanya merupakan suatu bentuk pengelompokan dari sejumlah pelaku-pelaku sosial. Tetapi antara keduanya mempunyai beberapa perbedaan gejala yang merupakan ciri khas masing-masing. Beberapa ciri khas dari masing-masing gejala secara konseptual dapat diletakkan pada suatu kontinum, dimana organisasi informal terletak pada satu ujungnya dan organisasi formal terletak pada ujung yang lain. Dalam kenyataannya, seperti terjadi pada KSM Petani Wajik, dua gambaran yang ekstrem tersebut mungkin tidak pernah terwujud. Karena beberapa ciri di dalamnya selalu terdapat bertumpuan dalam kedua bentuk.

6.2 Hubungan Kelompok Tani Dengan Masyarakat Desa

6.2.1 Kondisi Sosio-ekonomi Petani Wajik

Sebelum membahas pola-pola hubungan antara KSM Petani Wajik dengan masyarakat Desa Wajik, penting disinggung kondisi sosio-ekonomi masyarakat petani Wajik. Secara umum karakteristik wilayah pedesaan Wajik adalah sebagai berikut; Menonjolnya aktifitas di bidang pertanian; Adanya gejala kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan antar warga; Belum memadainya sarana transportasi, terutama jalan yang menghubungkan Wajik dengan desa sekitar; Dan masih terbatasnya sarana pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Melalui metode observasi terlibat, hasil penelitian mengungkapkan bahwa aktifitas produksi pertanian masyarakat Wajik umumnya masih menampilkan ciri-ciri sebagai petani kecil (subsisten). Gejala ini terutama tergambar pada banyaknya warga yang hanya memiliki tanah pertanian kurang dari 1 Ha. Dari 415 Kepala Keluarga (KK), terdapat 16

KK yang hanya menguasai tanah kurang dari 0,1 Ha. 133 KK memiliki tanah 0,1 ha – 0,5 ha. 150 KK menguasai tanah 0,5 ha – 1 ha, sebanyak 136 KK yang menguasai tanah lebih dari 1 ha.

Aktifitas produksi pertanian didorong oleh tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Seringkali hasil panen padi maupun palawija mereka, akibat rendahnya harga jual, tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Karena itu, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya para petani Wajik banyak yang bekerja sekaligus sebagai buruh tani. Di luar itu, mereka juga mencoba bekerja di luar sektor pertanian, baik sebagai buruh bangunan (tukang batu), seperti subyek penelitian (No), (Ak), (Sm), membuka warung kelontong seperti subyek penelitian (Kj), (Nk), bengkel (Nr), ataupun berdagang sapi seperti subyek penelitian (Ko).

Ciri-ciri subsistensi mereka juga nampak pada sikap yang lebih mengutamakan usaha yang dapat menghindari kegagalan yang merusak kemampuan subsistensinya. Apabila diperkenalkan kepada mereka suatu teknologi atau cara usaha pertanian baru, mereka lebih memilih kepada peningkatan produksi secara ekstensif – penambahan luas lahan, dengan lebih banyak menggunakan input produksi yang dibuat atau diramu oleh mereka sendiri, dan sebisa mungkin menyerap tenaga kerja keluarga.

Gejala lain yang terungkap dari penelitian ini adalah adanya keengganan masyarakat setempat untuk memberikan gagasan dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan-keputusan bersama. Mereka biasanya begitu saja percaya pada segala sesuatu yang diinginkan para tokoh masyarakat. Pada beberapa kasus pembangunan desa, masyarakat cenderung mengandalkan kepada pamong desa. Ketika peneliti berada di lokasi, sebagian besar petani Wajik malah memandang bahwa peneliti

mengetahui segala sesuatu masalah pertanian dan dianggap mampu memecahkan masalah-masalah mereka.

Berkembangnya gejala demikian tidak terlepas dari telah berlangsungnya pola ketergantungan antara petani miskin kepada petani kaya yang sangat dilandasi pertimbangan nilai ekonomi. Hubungan kedua lapisan masyarakat ini nampak sebagai hubungan *patron-client*, dimana para petani kaya berkedudukan sebagai *patron* bagi para petani miskin yang merupakan *client* bagi petani kaya. Pola hubungan demikian biasanya paling nampak ketika para petani miskin ini memerlukan pinjaman dana baik untuk modal usaha, biaya perawatan atau pemupukan, maupun untuk keperluan rumah tangga. Di sini para petani kaya menyediakan diri sebagai penyedia dana dengan syarat bunga maupun konsekuensi bagi hasil yang cenderung menguntungkan pemilik dana. Jadi bisa dikatakan, hubungan kerja yang terjalin antara petani miskin dan petani kaya di Wajik bersitat hubungan *patron-client* yang terjalin karena hubungan utang-piutang.

Pola hubungan seperti itu kiranya dapat bertahan lama karena berjalan seiring dengan nilai-nilai tradisi budaya yang beredar dalam kehidupan masyarakat setempat. Pada suatu perbincangan peneliti dengan subyek penelitian (Kj) didapatkan sebuah istilah nilai hidup *nerimo ing pandum*. (Kj) mengungkapkan sebagai berikut.

"Uripku iki wis gak angel-angel. Rejeki iku lak pasrah sing gawe urip ...lawong pestene cukup yo cukup, nek pesthene gak cukup diapano waer yo gak cukup.. wong uri iku kudhu nerimo ing pandum .. iku sing apik"
 ("Hidup itu jangan sulit-sulit. Rejeki itukan terserah pada Sang Pencipta...kalau *pestene*/takdirnya kaya ya kaya, kalau takdirnya miskin bagaimanapun tetap miskin...orang hidup itu harus *nerimo ing pandhum*")

Nerimo ing pandhum dihayati sebagian penduduk Wajik dalam pengertian pasrah total kepada nasib atau *pepesthen*. Dalam keyakinan ini hidup dan kehidupan sudah digariskan atau sudah dibuat cetak birunya dan mereka hanya tinggal menjalaninya.

Di bidang mata pencahariannya misalnya, di Wajik dikenal istilah *canthing jali* atau dari peribahasa yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut.

"dhasar canthing jali, mbok ditilem ing segara isine tetep mung setetes"
 ("Dasar canting kecil, meskipun ditenggelamkan ke laut hanya bisa berisi air setetes")

Istilah atau peribahasa ini menggambarkan keyakinan fatalistis masyarakat setempat bahwa apapun usaha mereka, maka kadar nasib yang telah tertulis juga yang akan menentukan hasilnya.

6.2.2 Peran Kelompok Tani Di Tengah Masyarakat

Keberadaan KSM Petani Wajik tidak bisa dilepaskan dari kondisi masyarakat Desa Wajik secara keseluruhan. Dalam berhubungan dengan masyarakat desa Wajik dan sebagai organisasi petani di lingkungan Desa Wajik, KSM Petani Wajik telah mencanangkan peran keorganisasiannya sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 6 Anggaran Dasar (AD). Pada pasal tersebut, berkenaan dengan peran kemasyarakatannya. KSM Petani Wajik menetapkan sebagai berikut;

- (a) menyelesaikan masalah-masalah petani/anggota secara bersama-sama (b) meningkatkan kesejahteraan petani/anggota, (c) pengembangan pengetahuan dan keterampilan usaha tani petani/anggota, (d) meningkatkan kekuatan posisi petani/anggota dalam pemasaran hasil panen, (e) terciptanya jaringan kerja dan komunikasi antar petani Wajik dan petani pada umumnya.

Uraian Bab IV Pasal 6 AD KSM Petani Wajik tersebut memberikan gambaran bahwa di tengah masyarakat Wajik, KSM harus mampu melaksanakan peranannya demi tercapainya sasaran peningkatan produksi dan pendapatan petani. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa basis massa, atau 25 kepala keluarga anggota KSM berasal dari masyarakat petani yang berdomisili di Desa Wajik.

Selanjutnya hasil penelitian juga diperoleh gambaran bahwa keluarga anggota KSM Petani Wajik umumnya lebih banyak terlibat dalam perkumpulan serta kegiatan dalam masyarakat bila dibandingkan dengan keluarga yang bukan anggota KSM Petani Wajik. Gambaran semacam ini kiranya cukup beralasan melihat pada kenyataan bahwa kondisi kemiskinan yang dihadapi sebagian penduduk Wajik membatasi kesempatan mereka untuk terlibat pada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Kondisi semacam ini setidaknya cukup dipahami oleh subyek penelitian berikut. Ketika ditanyakan kenapa anggota KSM tidak lebih dari setengah jumlah kepala keluarga di desa Wajik, subyek penelitian (Pi), anggota Dewan Pengawas, mengatakan sebagai berikut.

"Kula sampun kedah mbejani penduduk mriki yok nopo pentinge lan manfaate kelompok tani kados KSM ngaten niki. Lan sedanten kulo kinten pun sumerap. Nah wedal pertemuan pembentukan rumiyin niku katha tiyang mboten saget dugi. Kulo sih maklum...tiyang tani mriki katha pendamelan, napa maleh mangsa tandur nggih.. utawi mangsa panen. Wedal mangsa niku, katha sing medal saking dusun mudos pendamelan lintu. Kahanan ekonomi sing kirang lan kesadaran sing dhereng wonten, ndamel masyarakat mriki dhereng remen berorganisasi".

("Saya telah berusaha memberitahu penduduk pentingnya dan manfaatnya kelompok tani semacam KSM ini, dan mereka saya kira sudah tahu. Nah waktu pertemuan pembentukan dulu itu banyak penduduk tidak bisa datang. Saya sih maklum ...orang tani di sini sangat banyak pekerjaan, apalagi musim tanam ya... atau musim panen. Di luar musim itu, banyak yang keluar desa mencari pekerjaan lain.. Kondisi ekonomi yang kurang dan kesadaran yang belum ada, membuat masyarakat sini belum senang berorganisasi.")

Di dalam menjalankan peran keorganisasiannya, masyarakat Wajik sebagai lingkungan kegiatan KSM Petani Wajik sekaligus menjadi basis sosial yang menunjang perkembangan KSM. Salah satu prinsip atau nilai kemasyarakatan yang terbangun di Wajik salah satunya adalah prinsip solidaritas atau kebersamaan. Dalam melaksanakan program-program kerja KSM, ternyata prinsip kebersamaan ternyata sangat menunjang. Prinsip kebersamaan ini di Wajik dikenal dengan berlakunya nilai "rukun" dan "hormat"

dalam kehidupan sehari-hari di desa tersebut. Nilai ini memungkinkan penduduk desa untuk bertoleransi terhadap ajakan, anjuran, ataupun saran-saran dari pengurus KSM untuk melaksanakan suatu program.

Masih terkait dengan basis sosial yang mendukung keberadaan KSM Petani Wajik adalah berlakunya pola kepemimpinan panutan di desa Wajik. Masyarakat Wajik masih percaya bahwa seorang pemimpin masyarakat mempunyai wibawa yang terpancar dari karismanya. Pola kepemimpinan panutan di kehidupan penduduk Wajik mungkin bisa dipahami dari penuturan salah seorang subyek penelitian berikut ini. Ketika ditanya bagaimana sosok pemimpin yang mereka inginkan demi kemajuan desa Wajik, subyek penelitian (Sl) mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

“Kalau hanya harus pinter saya kira bukan jaminan pembangunan desa ini...warga lingkungan sini butuh orang yang punya keunggulan. seperti *diajeni* ... berpengaruh, dapat mewakili dan melindungi atau mengayomi kepentingan orang banyak ya lahir ataupun batin”.

Dalam struktur kekuasaan di daerah penelitian, selain terdapat pengaruh pemerintah sebagai penguasa, terdapat pula pengaruh pemimpin informal sebagai *influential leader* yang cukup kuat mempengaruhi rakyat. Sehingga dalam masyarakat Wajik terdapat dua istilah yaitu “pemerintah” dan “warga atau rakyat”.

Di Desa Wajik, pemimpin formal yang dipandang mereka sebagai bagian “pemerintah” adalah Bapak H. Matuwi Abdullah selaku Kepala Desa. Sedangkan figur yang dihormati dan dipandang merupakan bagian dari “warga atau rakyat” di lingkungan Dusun Klitih, misalnya figur seperti subyek penelitian (Rw), (Sa), dan (Pi). Sedangkan di lingkungan Dusun Wajik, tersebut nama subyek penelitian seperti (Yk), (Nw) dan (Ko).

Mereka selain sebagai pengurus KSM Petani Wajik juga adalah tokoh – tokoh masyarakat yang cukup disegani dan menjadi panutan di Desa Wajik.

Selanjutnya, agar pembahasan pada bagian ini lebih terfokus pada penjelasan tentang gejala-gejala sosial yang menandai keterkaitan hubungan antara KSM Petani Wajik dan masyarakat Wajik, berikut ini dijabarkan hasil penelitian pada sejumlah kasus dan kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan KSM Petani Wajik.

6.2.3 Petani Wajik Menghadapi Kekurangan Air

Di sekitar musim kemarau, bulan Agustus 2000, petani Wajik diresahkan dengan masalah kekurangan air untuk tanaman padi mereka. Diskusi-diskusi kecil tentang masalah kurangnya air banyak terjadi di warung Pak (Kj) maupun Bu Marning. Para petani takut kalau persediaan air yang biasanya dipasok dari Waduk Gondang (di Kecamatan Sugio) tidak mencukupi kebutuhan padi mereka dimana dampak terburuknya adalah terjadinya gagal panen.

(Rw) selaku ketua KSM kemudian berinisiatif mengadakan musyawarah warga untuk mencari jalan keluar masalah ini. Dengan berkoordinasi dengan Kades Wajik, diperoleh ijin untuk mengadakan musyawarah di Balai Desa Wajik. Pada tanggal 28 Agustus 2000, dalam musyawarah yang dipimpin (Rw) ini selain hadir para anggota KSM Petani Wajik, juga para warga desa Wajik lain sekaligus para perangkat Desa Wajik.

Hasil Musyawarah, pihak pemerintah desa tidak dapat mencarikan jalan keluar karena petani Wajik sendiri dipandang telah melanggar kesepakatan yakni menanam padi

pada musim tanam ketiga. Pada musyawarah yang juga dihadiri oleh peneliti tersebut Bapak Matuwi, Kepala Desa Wajik, mengatakan sebagai berikut.

“Sebagaimana yang menjadi kebiasaan sejak bertahun-tahun yang lalu dan sudah menjadi kebijaksanaan Dinas Pengairan, mestinya musim tanam *kesongo* (ketiga pen) ini para petani menanam palawija. Kalau misalnya petani pada musim tanam *kesongo* ini mematuhi kesepakatan umumnya pengguna air Waduk Gondang untuk bertanam palawija maka saudara-saudara tidak akan kekurangan air”.

Di lain pihak, sebagian besar peserta musyawarah beranggapan bahwa kekurangan air ini bukan disebabkan karena mereka bertanam padi. Pak H. Utomo misalnya, dia yakin bahwa kurangnya air untuk petani Wajik ini karena terjadi penyimpangan pembagian air di daerah yang lebih dekat dengan Waduk Gondang. Masalah penyimpangan pembagian jatah air ini diungkapkan Pak H. Utomo sebagai berikut.

“Sudah bukan menjadi rahasia lagi, oknum-oknum dari Dinas Pengairan Lamongan ini mencari untung dari penjualan jatah air di daerah Sugio untuk para petani di sana. Apalagi air Waduk Gondang ini, sebelum sampai di Wajik telah banyak dicuri oleh orang-orang di daerah Gondang sana. Yang dirugikan tentu kita yang jauh dari Waduk ini”.

Setelah terjadi banyak usulan, akhirnya para peserta sepakat mengirimkan delegasi untuk mengadukan masalah air ini kepada DPRD Lamongan. Untuk itu (Rw) diminta untuk menjadi ketua delegasi. Diharapkan nantinya pihak DPRD bisa mendesak pihak Dinas Pengairan Lamongan agar memperbaiki mekanisme kerja penyaluran air Waduk Gondang agar lebih adil bagi desa-desa yang jauh dari waduk.

Pada tanggal 8 September 2000, KSM Petani Wajik diketuai (Rw) berhasil bertemu dengan Komisi E DPRD Lamongan. Dalam dengar pendapat antara pihak KSM Petani Wajik dan Komisi E yang diketuai oleh Zahid Fadlil, para petani Wajik ini mengadukan berbagai masalah usaha tani mereka, terutama masalah kurangnya

persediaan air yang mengancam kelangsungan tanaman padi mereka. Di akhir dengar pendapat, Komisi E DPRD Lamongan berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut dengan berkoordinasi dengan Dinas Pengairan Lamongan.

Pelaksanaan dengar pendapat bersama DPRD Lamongan ini setidaknya menggambarkan sebuah pola penyikapan suatu masalah rakyat yang berpola *bottom-up* atau bersumber dari arus bawah ke atas. Hal ini tentunya dimungkin dari keberadaan KSM Petani Wajik sebagai organisasi sosial di tengah masyarakat Wajik. Melalui mekanisme partisipatoris yang terjadi dalam aktifitas keorganisasian KSM, berkembang sebuah situasi dimana anggota dan masyarakat Wajik memiliki ruang dan kesempatan menyuarakan masalah dan kebutuhan mereka.

Keberadaan KSM Petani Wajik sebagai wadah pemecahan masalah dan aspirasi masyarakat tentunya tidak hanya diukur dari kemampuan memfasilitasi masyarakatnya menghadap jajaran pemerintahan. Namun keberhasilan organisasi ini juga diukur dari keberhasilannya mengembangkan kekuatan masyarakat (baik individu maupun kolektif) untuk hidup dalam keswadayaan. Seperti misalnya dikatakan subjek penelitian (As) berikut ini.

“Bagi kami KSM ini dikatakan berhasil menjadi organisasinya masyarakat Wajik dan mampu menjadi pelayan masyarakat dalam kegiatan-kegiatannya, apabila KSM ini bisa menjadi pelopor sikap kemandirian warga. Artinya masyarakat harus dibelajari untuk tidak selalu tergantung pada bantuan pemerintah. Dan itu kita awali di KSM ini.

Lebih jauh, keberhasilan warga Desa Wajik melalui wadah KSM Petani Wajik melakukan dengar pendapat bersama DPRD Lamongan ini juga bisa memperjelas peranan KSM sebagai organisasi sosial desa yang mampu menjadi pengembang relasi rakyat dan pemerintah yang lebih setara. Di dalam proses pemecahan masalah pengairan

usaha tani warga Wajik ini telah terjadi sebuah upaya pengorganisasian kekuatan masyarakat bawah melalui mekanisme partisipatif untuk mewujudkan kemandirian (*self-reliance*) masyarakat desa.

Mengacu pada kasus di atas, KSM Petani Wajik selain sebagai wadah pengembangan kemandirian masyarakat desa, juga sangat berkepentingan sebagai saluran partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan-keputusan pemerintah yang menyangkut kehidupan masyarakat Wajik. Sebagaimana dijelaskan Guzman (dalam Rola:1981) sebagai berikut.

"Self-reliance means that the rural poor will develop themselves with less and less dependence on external assistance, particularly from the government. As a matter of strategy, the concept of self-reliance encourages the development of skills of the rural poor to design and implement their own development plans. To effect such participation, the rural poor should be organized in meaningful mechanisms which will provide them a leverage for presenting their needs and for negotiating with government or implementators on programs which affect them".

("Kemandirian berarti bahwa masyarakat miskin di desa berkemauan mengembangkan dirinya agar tidak bergantung pada bantuan luar, terutama dari pemerintah. Dalam strateginya, konsep kemandirian mendorong adanya pengembangan keterampilan masyarakat desa untuk mendesain dan melaksanakan rencana pembangunan mereka sendiri. Untuk melahirkan partisipasi semacam itu, masyarakat desa hendaknya diorganisir dalam suatu mekanisme kerja yang mampu menjadi suatu wadah aspirasi menyuarakan kebutuhan-kebutuhan mereka dan wadah negoisasi dengan pemerintah dan para pelaksana program-program yang mempengaruhi hidup mereka").

6.2.4 Pengadaan Pinjaman Pupuk Bagi Petani

Salah satu program kerja seksi ekonomi KSM Petani Wajik adalah pengadaan pupuk urea untuk petani Wajik. Program ini dirintis sejak bulan Desember tahun 2000 oleh KSM Petani Wajik dengan menyediakan pupuk urea sebesar 2 ton yang dipinjamkan kepada petani Wajik dalam jangka waktu 3 bulan. Modal awal berupa uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,- didapatkan KSM Petani Wajik dari pinjaman sejumlah

pengurus KSM Petani Waji yakni (Ko), (Rw), dan (Sr). Modal juga berasal dari swadaya 23 anggotanya dimana masing-masing dikenakan simpanan pokok sebagai swadaya kelompok sebesar Rp. 10.000, -, sehingga terkumpul modal kegiatan sebesar Rp 2.530.000,-.

Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, pada tanggal 12 Desember 2000 para anggota KSM Petani Wajik terlebih dahulu memusyawarahkan aturan-aturan pelaksanaan di rumah Bapak Rawi. Hasil musyawarah anggota KSM merumuskan dan menyepakati hal-hal sebagai berikut (dari buku notulensi rapat yang disusun Sekretaris KSM).

I. Latar Belakang Kegiatan Peminjaman Pupuk:

- a. Pemenuhan kebutuhan modal usaha tani.
- b. Memenuhi kebutuhan anggota.
- c. Penanggulangan rentenir dan Bank yang mengenakan bunga tinggi.
- d. Pengembangan kesadaran masyarakat untuk usaha bersama.

II. Tujuan Kegiatan

- a. Peningkatan penghasilan anggota
- b. Melatih untuk berusaha bersama kepada anggota
- c. Mengatasi masalah usaha tani yang kena kenaikan pupuk akibat krisis ekonomi.
- d. Mengurangi praktek Bank titil dan rentenir.

III. Aturan Kegiatan

- a. Semua petani Wajik berhak mendapatkan pinjaman, kecuali untuk pengguliran pinjaman kesatu sampai ketiga prioritas diberikan kepada anggota KSM.
- b. Besarnya pinjaman untuk setiap peminjam disamaratakan dan sesuai kesepakatan musyawarah anggota KSM setiap tiga bulan.

- c. Setiap peminjam dikenakan biaya jasa pinjaman atau infaq, sebesar 4% dari besar pinjaman setiap bulannya. Apabila anggota menghendaki perubahan, maka besar jasa pinjaman atau infaq ini bisa dirubah sesuai kesepakatan.
- d. Pinjaman berupa pupuk urea dan pengembalian pinjaman paling lambat pada 5 hari sebelum tanggal jatuh tempo pinjaman dalam bentuk uang tunai.
- e. Apabila terdapat salah seorang peminjam yang tidak bisa mengembalikan pinjaman maka sanksi dikenakan secara *tanggung renteng*, dimana semua peminjam menanggung kewajiban pengembalian hutang peminjam tadi.

Pengguliran pertama pada tanggal 5 Januari 2001, sesuai kesepakatan masing-masing petani berhak mendapatkan pinjaman satu kuintal pupuk urea atau senilai Rp. 115.000,-. Maka pada saat itu, untuk pengguliran pinjaman pada triwulan pertama yang diprioritaskan bagi anggota KSM, terdapat 20 anggota KSM yang bisa mengambil pinjaman pupuk urea ini.

Ketika penelitian berlangsung, kegiatan peminjaman pupuk urea ini telah memasuki triwulan keempat yakni bulan Oktober sampai Desember 2001. Pada triwulan keempat ini peminjam sudah bukan hanya terbatas pada anggota KSM tetapi juga para petani Wajik pada umumnya. Sebagai sebuah gambaran tentang perkembangan kegiatan ini, berikut ini disajikan laporan keuangan kegiatan peminjaman pupuk oleh KSM Petani Wajik selama Tahun 2001 yang dibuat oleh koordinator seksi ekonomi, subyek penelitian (Nk).

| N O | JENIS TRANSAKSI | TAHUN 2001 | | | |
|--------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | JANUARI | APRIL | JULI | OKTOBER |
| I | PENERIMAAN | | | | |
| | 1. Swadaya kelompok | Rp. 230.000 | 173.500 | Rp. 393.000 | Rp. 612.500 |
| | 2. Angsuran pokok | --- | Rp. 2.300.000 | Rp. 2.300.000 | Rp. 2.300.000 |
| | 3. Jasa Pinjaman | --- | Rp. 276.000 | Rp. 276.000 | Rp. 276.000 |
| | 4. Pinjaman Donatur | Rp. 2.300.000 | --- | --- | --- |
| | JUMLAH | Rp. 2.530.000 | Rp. 2.749.500 | Rp. 2.969.000 | Rp. 3.188.500 |
| II | PENGELUARAN | | | | |
| | 1. Pinjaman ke anggota | Rp. 2.300.000 | Rp. 2.300.000 | Rp. 2.300.000 | Rp. 2.300.000 |
| | 2. Biaya administrasi | 11.500 | Rp. 11.500 | Rp. 11.500 | Rp. 11.500 |
| | 3. Biaya transportasi | 25.000 | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 |
| | 4. Jasa pekerja | 20.000 | Rp. 20.000 | Rp. 20.000 | Rp. 20.000 |
| | JUMLAH | Rp. 2.356.500 | Rp. 2.356.500 | Rp. 2.356.500 | Rp. 2.356.500 |
| | SALDO | Rp. 173.500 | Rp. 393.000 | Rp. 612.500 | Rp. 832.000 |

Tabel 6.2 Laporan Keuangan Kegiatan Peminjaman Pupuk KSM Petani Wajik Th. 2001

Laporan keuangan kegiatan peminjaman pupuk KSM Petani Wajik ini dilaporkan kepada anggota di setiap pertemuan menjelang pengguliran pinjaman. Sedangkan untuk masyarakat Wajik, biasanya laporan keuangan ini ditempel di warung (Kj) dan Bu Marning. Dari laporan keuangan sekaligus memberikan menjelaskan bahwa setiap tiga bulan sekali KSM Petani Wajik mendapatkan penghasilan bersih sebesar Rp. 219.500,-. Dilihat dari besarnya nominal uang yang dihasilkan dari kegiatan ini memang masih relatif kecil. Hal ini diakui oleh subyek penelitian (Nk) dengan mengatakan sebagai berikut.

“Hasil dari pengadaan pupuk ini masih kecil. Tujuan kita pengurus ini bukan disitu ... mencari untung. Tapi bagaimana KSM ini awal-awal bisa berperan di kegiatan tani warga lingkungan di sini. Kalau dihitung malah pengurus KSM ini banyak korbannya loh mas ... tapi ya itu semuanya harus diawali dari yang kecil-kecil begini. *Insya Allah terose* (katanya;pen) Pak (Rw) tahun 2002 nanti kita bisa minta pada LSM untuk mendapatkan tambahan modal”.

Hal ini kiranya sejalan dengan arah pengembangan perekonomian pedesaan melalui pembinaan koperasi-koperasi sebagai pusat pelayanan ekonomi pedesaan. Soewardi (1976, hal. 130, dalam Mardikanto:1994) menawarkan agar kelompok-kelompok petani dapat dijadikan organisasi prakoperasi. Selaras juga dengan pendapat ini adalah prasaran yang dikemukakan Hadisapoetro (1978, hal. 57 dalam Mardikanto:1994) yakni untuk melakukan pengintergrasian kelompok tani ke dalam kegiatan-kegiatan koperasi-koperasi unit desa (KUD).

Kegiatan pengadaan pupuk oleh KSM Petani Wajik ini kiranya juga menjawab harapan sejumlah kalangan untuk menjadikan kelompok tani sebagai suatu organisasi pamrih yang bermotif ekonomi. Berbeda dengan KUD yang umumnya telah cenderung melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi berskala besar dimana menjadikan KUD semakin jauh dari jangkauan petani kecil (Ismawan:1981), kecilnya skala ekonomi dalam kegiatan pengadaan pupuk oleh KSM Petani Wajik ini memungkinkan semua lapisan petani, khususnya petani kecil Wajik, berkesempatan menjangkau kemanfaatannya.

6.2.5 Pengelolaan Lumbung Desa

Hubungan antara KSM Petani Wajik dan masyarakat Wajik juga ditandai dengan keberadaan Lumbung Kemakmuran Desa Wajik. Pengelolaan lumbung ini dulunya dikelola oleh aparat desa setempat. Namun sejak berdirinya KSM Petani Wajik, pengelolaan lumbung desa ini diserahkan kepada pengurus KSM Petani Wajik. Hal ini tidak lepas dari keinginan warga desa untuk lebih memfungsikan lumbung desa sebagai salah satu alat penopang ekonomi masyarakat, khususnya ketika mereka menghadapi

musim paceklik. Fungsi lumbung demikian tergambar seperti yang dituturkan subjek penelitian (Wr) berikut ini.

"Manfaat lumbung ini kelihatan kalau *labuhan* (waktu peralihan dari musim kemarau ke musim hujan) dimana padi orang-orang Wajik ini sudah habis. Waktu itulah biasanya lumbung dibuka untuk penarikan gabah untuk warga. *Khan* setiap kepala keluarga di sini setiap panen diwajibkan menyeter. *Mongso* (Musim) *labuhan* itu mereka dapat menarik kembali gabahnya".

Selain untuk mengatasi musim paceklik, pentingnya lumbung desa ini sangat disadari oleh warga desa Wajik dari sisi semangat gotong royong. Adanya nilai kegotongroyongan yang dipahami oleh masyarakat Wajik dalam pengelolaan lumbung desa terutama pada perwujudan lumbung desa sebagai wadah kebersamaan masyarakat mengatasi masalah-masalah ekonomi mereka. Sebagaimana dikemukakan subyek penelitian (Pi) yang sekaligus merupakan sesepuh masyarakat Wajik berikut ini.

"*Adat utawa tradisi warga dusun iku akeh sing wis dilaleno. Contohné gotong royong iku adat sing luhur, wijude yo.. salah sijine ono lumbung desa. Waktu panen wong tani ngumpulno pari nang lumbung. Mongso paceklik, wong-wong iku lak iso njokok sabutuhe kanggo ngatasi paceklik*".
 ("Adat atau tradisi warga desa itu banyak yang sudah dilupakan. Contohnya gotong royong itu adat yang luhur, perwujudannya ya.. salah satunya ada lumbung desa. Waktu panen petani mengumpulkan padi di lumbung. Musim paceklik, orang-orang itu *khan* bisa mengambil sesuai kebutuhan untuk mengatasi paceklik").

Sejak dikelola oleh pengurus KSM Petani Wajik, pengelolaan lumbung desa ini sangat membantu warga desa Wajik dalam menjaga kelangsungan pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Setidaknya hal ini tercermin dari subyek penelitian yang bernama (Mi) sebagai berikut.

"*Menawi kedah dikelola Balai Desa, lumbung desa niki mboten teratur bikake. Sering warga niku nedi riyen kesah Balai Desa supados dibuka...niku mawon dhereng tamtu diparingi. Nggih kulo kinten masalahe niku tenaga ten Balai Desa niku terbatas. Setahun sepisan buka ... wah*

padahal kebutuhane tiyang tani mriki niku sering waktu tandur bibit niku mboten wonten yatra. Menawi diurus KSM niku teratur bukake, secawan sasi sepisan, khusus pas waktu tandur niko”.

(“Jika masih dikelola Balai Desa, lumbung desa ini tidak teratur bukanya. Seringkali warga itu minta dulu ke Balai Desa agar dibuka...itu saja belum tentu diberi. Ya saya kira masalahnya itu tenaga di Balai Desa itu terbatas. Setahun sekali buka... wah padahal kebutuhan orang tani di sini itu sering waktu menanam bibit tidak ada uang. Kalau diurus KSM, itu teratur bukanya, khususnya tepat waktu tanam.

Sedangkan tata cara pengelolaan lumbung desa ini secara jelas dapat tergambar dari penjelasan subyek penelitian (Rw) berikut ini.

“Setelah panen padi warga sini diharuskan memasukkan gabahnya. Tidak setiap orang tapi dihitung per KK (kepala keluarga). Setiap KK itu diwajibkan memasukkan gabah ke lumbung sesuai luas garapannya. Setiap *Cengkal 100* (0,7 Ha) harus memasukkan 10 Kg. Jadi seperti saya ini, karena luas garapan saya 1 Ha maka saya wajib menyetor gabah seberat 70 Kg. Setelah satu tahun atau biasanya pada musim *labuhan*, lumbung ini dibuka dan untuk setiap pengambilan itu dikenakan pengurangan 15% dari bobot semula. Pengurangan itu ya selain untuk uang kas lumbung dipakai juga untuk membayar insentif RT, pengurus HIPPA, dan PPKBD”.

6.3 Hubungan Kelompok Tani Dengan Pemerintahan Desa

Di Kabupaten Lamongan, susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2001 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Kedua perangkat hukum penyelenggaraan pemerintahan desa di atas tidak lepas dari semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Selanjutnya, berdasarkan perangkat hukum yang telah ada, kepala desa merupakan alat pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa

dimana berkedudukan sejajar dengan Badan Perwakilan Desa (BPD). Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya kepala desa mempunyai fungsi antara lain;

- a. Melaksanakan kegiatan dalam rangka urusan penyelenggaraan rumah tangga desanya sendiri.
- b. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya.
- c. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban desa.

Fungsi-fungsi kepala desa tersebut, di dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD. Pertanggungjawaban ini dilakukan kepala desa dengan jalan menyampaikan laporan pertanggungjawaban di hadapan BPD setiap tahun sekali, terutama di akhir tahun anggaran.

6.3.1 Kondisi Pemerintahan Desa Wajik

Sedangkan kondisi penyelenggaraan pemerintahan desa Wajik, sebagaimana secara singkat telah disinggung pada Bab V, saat penelitian ini berlangsung sedang terjadi proses pembenahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Upaya pembenahan tata kerja pemerintahan desa Wajik ini terungkap dari apa yang dikatakan Bapak Matuwi selaku kepala desa Wajik berikut ini.

“Adanya peraturan-peraturan baru dari pemerintah kabupaten membuat kita di jajaran pemerintah desa Wajik ini harus secepatnya menyesuaikan diri. Saat ini harus ada BPD ... bulan Juni (2001) yang lalu kita memilih BPD, dan dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan pemilihan kaur-kaur desa yang masih kosong. Saya kira segala sesuatu nanti tinggal terserah pada warga bagaimana baiknya. Sebagai kades saya berusaha untuk ikut apa yang telah digariskan dari peraturan yang ada ”

Adanya upaya pembenahan penyelenggaraan pemerintahan desa di Wajik juga telah diakui subyek penelitian (Ko). Sebagai pemuka masyarakat yang banyak bersentuhan dengan masalah warga dan kini menjadi anggota BPD, (Ko) melihat pembenahan di tata pemerintahan Wajik dengan membandingkan kondisi pemerintahan desa dulu dengan kondisi saat ini. Dalam hal ini (Ko) menjelaskan sebagai berikut.

"*Petinggi* (Kades) dulu itu pusatnya segala keputusan. Apalagi LKMD tidak berjalan sebagai wadah aspirasi warga. Tidak bisa dipungkiri karena LKMD sendiri itukan banyak didominasi orang-orangnya *Petinggi*. Seringkali hasil rapat desa tidak mencerminkan apa yang diinginkan warga. Anggota LKMD dulu itu sepertinya kalau berbeda pendapat dengan *Petinggi* sepertinya *sungkan* karena *Petinggi* itu dipandang sebagi atasan. *Petinggi* sendiri sering beralih menerapkan apa yang diperintahkan Pak Camat sebagai instruksi atasan". Kalau BPD sekarang ini tidak menjadi sekedar pendengar seperti LKMD itu."

Ketika peneliti bertanya, bagaimana memutuskan program-program pembangunan desa sekarang ini, (Ko) menjawab sebagai berikut.

"Untuk mencapai keputusan mengenai soal-soal pembangunan desa sekarang ini telah terbentuk BPD. Maka segala keputusan yang menyangkut pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah desa dibahas *Petinggi* dengan anggota BPD. Misalnya dulu ada rapat membahas APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Desa), pemanfaatan DPD/K (Dana Pembangunan Desa./Kelurahan). Kita juga pernah memusyawarahkan bersama perangkat desa tentang pelelangan tanah bengkok desa. Untuk pengambilan keputusan desa *khan* sudah diatur bahwa antara kepala desa dan BPD itu sejajar. Jadi tidak lagi kita harus selalu menuruti instruksi Pak Camat".

Apabila ditelaah lebih dalam, jawaban dari subjek penelitian (Ko) menyiratkan satu ketidakpuasan masyarakat terhadap persoalan pengambilan keputusan yang terlalu didominasi oleh pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah. Dalam hal ini bila mengacu pada mekanisme pengambilan keputusan yang partisipatif maka diperoleh gambaran bahwa persoalan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa seringkali berakut pada struktur pemerintahan desa itu sendiri. Aspek personalitas dan orientasi pemikiran

Kades banyak mempengaruhi mekanisme dan hasil pengambilan keputusan. Meskipun mekanisme pengambilan keputusan desa telah dipandang partisipatif dengan adanya pelibatan aspirasi LKMD, tetapi ada kerentanan bahwa keputusan yang telah dicapai tidak dilaksanakan apabila ada kehendak yang berbeda dari Kades maupun Camat setempat.

Berkenaan dengan partisipasi masyarakat, pandangan yang agak berbeda dikemukakan subyek penelitian lain (Yk) yang juga anggota BPD Wajik ketika. Ketika ditanya bagaimana pandangannya tentang kebijakan pembangunan desa, (Yk) menjawab sebagai berikut

“Pembangunan desa itu kan mestinya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tapi pembangunan itu banyak hanya dari pemerintah saja. Ngomong pembangunan tentu pikiran warga sini saya kira ...sesuatu yang diberi pemerintah. Menurut saya terbentuknya BPD, lalu ada KSM adalah alat warga dalam berpartisipasi. Biar warga tahu partisipasi mereka dalam pembangunan. BPD dan KSM harus benar-benar berperan dalam pembangunan desa.”

Dari subjek penelitian (Yk) terungkap adanya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yang partisipatif. Secara konseptual, apa yang diidealkan (Yk) terhadap kebijakan pembangunan desa yakni diterapkannya suatu pembangunan yang demokratis. Perwujudan partisipasi dalam pemerintahan desa, dipandang (Yk) bukan hanya dalam bentuk kekutsertaan warga di dalam musyawarah desa. Tetapi partisipasi lebih dimaknai sebagai keterlibatan warga dalam merencanakan keputusan desa, melaksanakan keputusan itu, dan menilai hasil-hasil pelaksanaan keputusan. Sehingga apabila dalam suatu kebijakan pembangunan desa, semua warga desa akan menaruh komitmen bagi keberhasilan pembangunan itu, bukan hanya pemerintah.

Untuk terjadinya partisipasi, kebutuhan akan sebuah organisasi sosial desa yang kuat juga terungkap dari pernyataan (Yk) di atas. Hal ini selaras dengan penjelasan Rola (1984) bahwa seringkali tidak terjadinya partisipasi masyarakat desa disebabkan oleh kelemahan dari organisasi masyarakat setempat. Diyakini oleh Rola bahwa keberadaan organisasi masyarakat yang kuat memungkinkan lapisan masyarakat bawah memiliki kekuatan penekan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan-keputusan pembangunan. Namun sampai saat ini, masih menurut Rola, harus diakui bahwa kendala umum pengembangan partisipasi masyarakat selain struktur pemerintahan desa yang kurang partisipatif, kendala lainnya adalah lemahnya organisasi di tingkat masyarakat bawah.

6.3.2 Peranan Kelompok Tani Dalam Pengambilan Keputusan Desa

Substansi dari peranan Kelompok tani dalam hal ini KSM Petani Wajik dalam pengambilan keputusan pembangunan desa berada pada kekuatan tawar (*bargaining power*) kelompok dalam proses pembangunan. Artinya, bagaimana kelompok tani ini memiliki kekuatan pengaruh dan hak untuk terlibat secara aktif dalam setiap tahap pembangunan. Baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi pembangunan desa. Ketika proyek-proyek pembangunan desa yang seringkali di dalam pelaksanaannya membutuhkan banyak pengorbanan dari pihak rakyat, maka rakyat juga harus memiliki hak penuh untuk menolak proyek-proyek yang ada bila misalnya, menurut mereka proyek-proyek tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pada bagian ini akan diungkapkan bagaimana hubungan antara KSM Petani Wajik dan Pemerintah Desa Wajik, baik pola hubungan keseharian maupun pola

hubungan kelembagaan kelompok dengan Pemerintah Desa Wajik yang menandai peranannya di dalam pengambilan keputusan Desa Wajik. Untuk kejelasan pembahasan di bagian ini juga diungkap persoalan atau keadaan lingkungan desa yang melingkupi gejala-gejala hubungan antara dua lembaga ini.

Hubungan kelembagaan ini setidaknya diawali semenjak proses pembentukan KSM. Hal ini terutama tergambar dari keadaan di masa-masa kemunculan inisiatif warga untuk mendirikan KSM. Para pelopor pembentukan KSM Petani Wajik seperti (As), (Sh) dan (Rw) di saat mensosialisasikan gagasan mereka mendapati bahwa pihak pemerintah desa tidak sepenuhnya mendukung ide pendirian KSM ini.

Gambaran demikian bisa terungkap dari penuturan subyek penelitian (As) berikut ini. Ditanyakan apakah ada bantuan atau dukungan pemerintah desa pada pembentukan KSM, (As) menjawab sebagai berikut.

“...Dukungan dari Balai Desa (pemerintahan desa) ketika kita memelopori pendirian KSM saya rasa tidak seperti yang diharapkan. *Petinggi* (Kades) sendiri pada waktu itu kita ajak membicarakan kemungkinan pembentukan KSM, mengatakan katanya lebih baik menggunakan kelompok tani yang sudah ada. Padahal menurut kita dan warga di sini sudah tahu HKTI yang ketuanya Pak Warji sekedar ada tapi tidak ada kegiatannya. Pak Warji itukan pamong desa”.

Saat peneliti kembali bertanya apakah pemerintah desa menentang pendirian KSM Petani Wajik, (As) menjawab sebagai berikut.

“Saya kira tidak menentang, *Petinggi* dan pamong desa juga menghadiri undangan kita kok. Saat rapat pembentukan dia juga menanyakan kenapa kita tidak mengadakan rapat di balai desa. Tapi ya itu tadi, di masyarakat dia juga ngomong bahwa KSM ini tidak punya tujuan jelas dan katanya ditunggangi orang untuk tujuan tertentu.

Dalam perkembangan perjalanan KSM Petani Wajik kemudian, sebagaimana salah satu butir garis besar kegiatan yang dicanangkan dalam AD/ART yakni “Menjalin

hubungan yang setara dengan aparat pemerintah dan bersifat kritis”, KSM Petani Wajik semakin mendapatkan pengakuan dari pemerintah desa. Khususnya ketika warga Wajik yang menjadi anggota KSM, menghendaki agar KSM memiliki wakilnya di Badan Perwakilan Desa (BPD). Subjek penelitian (Sr) yang duduk di Dewan Pengawas misalnya, ketika ditanyakan alasan tuntutan anggota KSM ini menjawab sebagai berikut.

“Mboten wonten salahe, ten aturan pembentukan BPD niku anggotane sagel saking utusan organisasi-organisasi masyarakat. Kados KSM nikilak pengurus lan anggotae napa male kegiatane pun wonten, pantes mawon menawi muntut wonten wakil ten BPD.”

(“Tidak ada salahnya, di aturan pembentukan BPD itu anggotanya bisa berasal dari utusan organisasi-organisasi masyarakat. Seperti KSM inikan pengurus dan anggotanya apalagi kegiatannyapun sudah ada, pantas saja kalau menuntut ada wakilnya di BPD.”)

Hasil dari aspirasi anggota KSM ini menempatkan subyek penelitian (Rw) sebagai anggota BPD Desa Wajik. Namun perlu dicatat bahwa keterwakilan KSM Petani Wajik juga tidak hanya diwakili oleh (Rw) saja. Karena selain Pak Rawi, beberapa anggota KSM juga terpilih menjadi anggota BPD lewat jalur mekanisme pemilihan langsung. Seperti misalnya (Ko) terpilih dalam pemilihan anggota BPD RT V dan (Ak) berhasil memenangkan pemilihan anggota BPD di wilayah RT II.

Ditinjau dari aras pemikiran pembangunan partisipatif, fenomena proses aktualisasi keberadaan KSM Petani Wajik di tengah masyarakat ini, menampakkan sebuah aspek penting yakni adanya kebutuhan akan kesempatan berpartisipasi dari warga desa. Di lain sisi, pemerintah desa Wajik belum memiliki kemauan politik (*political will*) untuk memberikan kesempatan secara penuh kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Padahal, menurut Raharjo (1994), untuk terjadinya berpartisipasi maka masyarakat desa hendaknya diberikan antara lain sejumlah kesempatan sebagai berikut.

1. Kesempatan untuk berorganisasi, termasuk untuk memperoleh dan menggunakan peraturan, perizinan, dan prosedur kegiatan yang harus dilaksanakan.
2. Kesempatan untuk mengembangkan kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, menggerakkan, dan mengembangkan, serta memelihara partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Kesempatan untuk memperoleh informasi pembangunan.
4. Kesempatan untuk memanfaatkan dan memobilisasi sumber daya untuk pembangunan.
5. Kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan teknologi tepatguna (termasuk bahan, peralatan, dan perlengkapan penunjangnya).

Selanjutnya pola hubungan antara KSM Petani Wajik dengan pemerintah desa apabila dikhususkan pada peranan KSM dalam proses pembangunan desa, bisa digambarkan dalam dua proses pembangunan fisik desa berikut ini.

6.3.2.1 Pemanfaatan DPD/K Tahun 2001

Dana Pembangunan Desa/Kelurahan atau DPD/K merupakan alokasi dana dari pemerintah untuk pembangunan desa. Pada bulan Juni Tahun 2001, Desa Wajik mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 10 juta. Dalam jangka waktu pemanfaatan dana selama 12 bulan DPD/K ini harus digunakan untuk program pembangunan desa, khususnya dalam pengembangan administrasi dan penyelenggaraan pembangunan desa.

Selain itu, aturan umum pelaksanaan DPD/K didapatkan peneliti setidaknya dari penuturan Pak Matuwi, Kades Wajik sebagai berikut.

“Dana ini digunakan untuk tiga macam pembangunan di desa. Empat puluh persen untuk menunjang pengembangan administrasi desa. Misalnya untuk

pengadaan sarana kerja BPD, kantor desa, konsultasi dengan kecamatan, kegiatan rapat-rapat musbang desa, dan penyusunan APBD, selain itu juga untuk honorarium PJOK dan PJAK dalam bantuan ini. Dua puluh persen untuk pembinaan kepemudaan dan remaja, Dan empat puluh persen untuk pembangunan sarana fisik.”

Sebelum pemanfaatan dana dilaksanakan Pemerintah Desa Wajik mengundang anggota BPD Wajik, LPM Wajik, Pengurus KSM Petani Wajik, dan tokoh-tokoh masyarakat Wajik. Dari KSM Petani Wajik, selain yang hadir selaku anggota BPD, hadir memenuhi undangan Pemerintah Desa Wajik adalah subyek penelitian (Ku), (Nk), dan (Sy).

Dalam rapat membahas usulan rencana kegiatan DPD/K ini, KSM Petani Wajik mengusulkan pembangunan jalan kampung di Dusun Klitih. Sebagaimana diungkapkan subjek penelitian (Ku) sebagai berikut.

“Kebutuhan yang paling mendesak adalah pengurukan jalan Klitih ..malah kalau bisa itu dibuatkan pondasi parit. Inikan mau musim hujan biasanya jalan di kampung itu banjir.”

Di lain pihak, pemerintah desa lebih cenderung mengalokasikan dana DPD/K ini untuk membangun gapura (gerbang) masuk Desa Wajik. Namun karena selain usulan ini diungkapkan KSM, kalangan tokoh masyarakat yang berdomisili di Dusun Klitih juga mendukung usulan ini, sehingga untuk alokasi dana DPD/K ini sebesar Rp. 4 Juta diputuskan untuk memperbaiki jalan Dusun Klitih. Apalagi para tokoh masyarakat dari Klitih menjamin bahwa untuk kebutuhan tenaga kerja akan digali dari hasil (*brokoan*) kerja bakti warga dusun Klitih.

Hasil lain yang dicapai rapat perencanaan program DPD/K ini adalah terbentuk Dewan Pengawas Kegiatan DPD/K. Pengawas ini bertugas melakukan evaluasi kerja pelaksanaan pembangunan desa yang menggunakan dana DPD/K. Selain berisi anggota

BPD, Dewan Pengawas juga berisi satu perwakilan KSM Petani Wajik, dan 2 orang tokoh masyarakat masing-masing dari Dusun Klitih dan Dusun Wajik. Sedangkan pimpinan proyek pembangunan jalan Klitih ini peserta menyepakati subyek penelitian (Rw). Pertimbangan dipilihnya (Rw) oleh para peserta tercermin dari pendapat salah seorang peserta, subyek penelitian (Nr) berikut ini.

“(Rw) itu panutan masyarakat Klitih, kalau dia ketuanya warga dijamin bisa diajak bekerja. Tapi yang penting, dia punya pengalaman apalagi dikenal *apikan* (orang baik).

Setidaknya mencermati peristiwa pembangunan di Desa Wajik ini terungkap bahwa DPD/K sebagai bentuk bantuan pemerintah untuk pembangunan desa dalam pelaksanaannya memadukan kegiatan pemerintah dengan partisipasi swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat di desa Wajik meskipun bukan dalam bentuk material pembangunan, namun semangat kegotongroyongan (*brokoan*) telah merupakan potensi pembangunan yang sangat penting. Keberhasilan pembangunan, khususnya di desa Wajik tidak hanya digantungkan pada peranan pemerintah saja, tetapi juga dari partisipasi masyarakat Wajik. Partisipasi masyarakat khususnya pada komitmen masyarakat untuk mengendalikan proses pembangunan yang terkait erat dengan kesejahteraan hidup mereka.

Sementara itu, pengaruh tokoh masyarakat, KSM Petani Wajik maupun BPD di dalam pengambilan keputusan pembangunan desa dapat berjalan baik. Kenyataan semacam ini menurut Iberamsjah (1988) dimungkinkan lebih karena pola hubungan pengaruh antara pemerintah desa dalam hal ini; kepala desa, dengan elite informal desa dalam hal ini; tokoh masyarakat, pengurus KSM Petani Wajik maupun anggota BPD, dalam pola hubungan pengaruh yang seimbang. Demikian juga di dalam pengendalian

sosial masyarakat oleh para elite informal desa, dalam kondisi seperti ini akan bisa berjalan dengan baik. Sehingga kemungkinan penyelewengan dan penyimpangan pemerintah desa di dalam pembangunan dapat dihambat atau dikurangi.

6.3.2.2 Lelang Tanah Bengkok

Sebagaimana terungkap dalam struktur organisasi pemerintahan Desa Wajik, Kaur. Pembangunan dan Kaur. Keuangan saat penelitian ini berlangsung mengalami kekosongan. Untuk memecahkan masalah kekosongan aparat desa ini Kades Wajik juga mengundang anggota BPD Wajik, LPM Wajik, Pengurus KSM Petani Wajik, dan tokoh-tokoh masyarakat Wajik. Musyawarah desa pada tanggal 4 Oktober 2001 di Balai Desa ini memutuskan agar pemerintah desa Wajik segera mengadakan pemilihan desa untuk mengisi kekosongan Kaur. Pembangunan. Sedangkan Kaur keuangan, karena pemerintah desa belum begitu membutuhkan pengisian jabatannya, bengkok Kaur keuangan bisa dilelang.

Setelah lelang dilaksanakan, dari bengkok Kaur. Keuangan ini berhasil diperoleh dana Rp. 10 Juta. Masalah pemanfaatan dana hasil lelang tersebut oleh pemerintah desa kembali diputuskan dalam musyawarah desa. Dari KSM Petani Wajik, hadir memenuhi undangan musyawarah Desa Wajik pada tanggal 12 Oktober 2001 yakni (Sa), (Sm), dan (Sh).

Dalam hal ini KSM Petani Wajik memiliki gagasan penggunaan dana tersebut seperti terungkap dari subjek penelitian (Sh) berikut ini.

“Karena sudah sejak lama generasi muda menghendaki lapangan sepak bola yang menetap di Wajik, KSM dalam rapat kemarin mengusulkan agar uang lelang bengkok itu digunakan membeli tanah lapangan.”

Pada dasarnya, usulan KSM ini tidak jauh berbeda dengan pendirian pemerintah desa yaitu menggunakan dana yang ada untuk membeli lapangan untuk kegiatan-kegiatan desa. Pemerintah desa juga memahami usulan KSM ini karena alokasi DPD/K juga tidak banyak diperuntukkan untuk pemuda.

Namun di lain pihak, sebagian besar peserta musyawarah desa lebih memandang pembangunan jalan yang menghubungkan Wajik dan Klitih lebih mendesak. Hal ini salah satunya terungkap dari usulan Pak Abdul Rahman, ketua RT II Dusun Wajik berikut ini.

"Senajan wonten lapangan sepak bola, menawi jalan antarane Wajik dugi Klitih mboten didandosi kulo kinten kok kirang sae. Kangge kesa lapangan ten kidule desa, sing dikarepake lare-lare nem nikulak liwat dalan mriku. Pertama luwih sae dibangun dalane riyen mantun niku mikir lapangan."

("Meskipun ada lapangan sepak bola, kalau jalan antara Wajik ke Klitih tidak diperbaiki saya kira kok kurang baik. Untuk pergi ke lapangan di sebelah selatan desa, yang diinginkan anak-anak muda itu kan lewat jalan itu. Pertama, lebih baik dibangun jalannya dulu setelah itu memikirkan lapangan").

Musyawarah desa yang berakhir sampai pukul 23.00 WIB ini pada akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama berbentuk keputusan desa. Perbedaan pendapat antara peserta musyawarah yang menghendaki penggunaan dana lelang bengkok sebesar Rp. 10 juta untuk pembangunan lapangan sepak bola dengan mereka yang menghendaki pembangunan jalan Wajik ke Klitih mampu disatukan. Semua pihak yang terlibat musyawarah desa ini sepakat untuk membangun jalan desa terlebih dahulu. Untuk pimpinan proyek, peserta memilih Pak Mudhofar yang merupakan ketua LPM Wajik, dan pengawas pembangunan diserahkan kepada BPD Wajik.

Dalam musyawarah ini, peserta juga mensepakati sumber daya pembangunan yang bisa diperoleh dari swadaya masyarakat Wajik. Terutama kebutuhan akan tenaga kerja, disepakati bahwa kebutuhan tenaga kerja pembangunan jalan desa ini dibebankan

kepada masing-masing dusun. Panjang jalan desa ini adalah kurang lebih 1,1 Km, untuk itu diputuskan bahwa Warga Dusun Wajik dan Klitih masing-masing melakukan pengurukan jalan sepanjang 600 M dan 500 M.

Bisa dikatakan, dampak mekanisme pembangunan demikian seringkali berujung pada terwujudnya masyarakat yang lebih bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan dan pemanfaatannya. Warga akan makin menyadari penting saling belajar bersama dalam suatu musyawarah desa. Dengan mengutip Rola (1981), ketika suatu program pembangunan desa ditangani oleh sekelompok masyarakat, dan bukan ditangani individu tertentu saja, maka penekanannya adalah upaya penyadaran masyarakat atas kekuatan solidaritas sosial dalam kerja-kerja kolektif dan kolaboratif. Hal ini sekaligus mengarahkan komunitas pada kesadaran bahwa dengan jumlah mereka yang banyak itu apabila diorganisir akan bisa menjadi kekuatan tersendiri.

Kerja bersama juga akan mencegah adanya situasi pembangunan dimana satu orang mendominasi peranan masyarakat (*one-man role*). Bila situasi demikian berkembang, kecenderungan umum yang seringkali muncul adalah masuknya keputusan dan kepentingan pribadi pemimpin atau individu dominan di masyarakat ke dalam proses pembangunan desa. Di sini bias dalam implementasi dan pemanfaatan hasil pembangunan sulit dihindari (Leviste.1981). Akibatnya, masyarakat tidak akan banyak memperoleh manfaat dari hasil-hasil pembangunan. Karena bagian terbesar dari hasil pembangunan hanya dinikmati oleh individu-individu tertentu di masyarakat.

6.4 Hubungan Kelompok Tani Dengan Organisasi Sosial Lain

Hasil penelitian tentang hubungan KSM Petani Wajik dengan organisasi sosial lainnya, salah satunya mengungkapkan aspek kesadaran akan pentingnya jaringan kerja. Pada tingkatan formal peraturan organisasi, kesadaran pentingnya jaringan kerja jelas dicantumkan dalam AD Bab VII Pasal 10 tentang Kegiatan-kegiatan KSM Petani Wajik yaitu pada butir ke-4 sebagai berikut.

“Melakukan kegiatan-kegiatan kerjasama dengan organisasi tani dan atau organisasi lainnya yang mempunyai pandangan asas dan tujuan yang sejalan dengan KSM Petani Wajik ”

Dan pada Profil KSM Petani Wajik terutama di bagian tujuan pendirian KSM, butir (e) tertulis sebagai berikut.

“Terciptanya jaringan kerja dan komunikasi antar petani wajik dan petani pada umumnya”.

Dari pernyataan tertulis tersebut terlihat bahwa secara institusional, KSM Petani Wajik telah menyadari pentingnya bekerjasama dengan organisasi lain untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan pada tingkatan pengurus organisasi, seperti dijelaskan subjek penelitian (Rw) ketika ditanyakan apakah ada hubungan KSM dengan organisasi lainnya, sebagai ketua KSM (Rw) menjelaskan sebagai berikut.

“Kegiatan-kegiatan kita di desa ini ada yang dilaksanakan tanpa bantuan organisasi lain, tapi ada juga yang dilaksanakan dengan kerjasama dengan organisasi lain. Kelancaran dan kesuksesan kegiatan biasanya tergantung juga pada eratnnya KSM berhubungan dengan kelompok-kelompok seperti Jam’iyah Yasinan, Remas atau kalau dari luar itu seperti dengan SPKL (Serikat Petani Kabupaten Lamongan:pen)”

Subjek lain (Nk), memahami pentingnya hubungan KSM Petani Wajik dengan organisasi lain lebih pada manfaat yang bisa dicapai dari kerjasama yang dijalin dengan dengan organisasi lain. Dia menyatakan sebagai berikut.

“Saya berpendapat kalau kita mempunyai banyak hubungan dengan organisasi lain adalah untuk memperkuat KSM kita sendiri. Adanya kerjasama bentuknya bermacam-macam, kita bisa bertukar informasi harga gabah. Kalau kita tahu informasi tentang harga kita bisa menjual gabah kita dengan harga tinggi.”

Keberadaan Jam'iyah Yasinan tidak bisa dilepaskan dengan KSM Petani Wajik. Pertemuan antar anggota KSM setiap malam Jum'at secara rutin terjadi di dalam kelompok Jam'iyah ini. Dari Jam'iyah inilah pertama kali tercetus itikad untuk mendirikan KSM. Meskipun tidak semua peserta Jam'iyah menjadi anggota KSM, namun seringkali sosialisasi kegiatan KSDM dilakukan pengurus lewat forum ini. Biasanya pengurus KSM diberikan waktu di akhir pengajian untuk memberi pengumuman kepada anggotanya tentang berbagai hal yang berkenaan dengan KSM Petani Wajik.

Sedangkan hubungan dengan Remas Al Muttaqien, yang diketuai Subjek penelitian (Ku), terutama ketika KSM Petani Wajik mendapatkan undangan pelatihan keorganisasian dari LSM. Seperti misalnya pada bulan Juni Tahun 2001, KSM Petani Wajik mendapatkan undangan pelatihan kader petani dari Yayasan Madani Jombang. Untuk memenuhi undangan itu (Ku) mengutus dua anggota Remas Al Muttaqien yaitu Siti Mutmainah dan Sugianto. Selain itu, di dalam kegiatan keagamaan Remas Al Muttaqien kadang juga melibatkan KSM Petani Wajik. Hal ini terutama terlihat ketika pada pelaksanaan Peringatan Nuzulul Qur'an 1421 H/2001 dimana terjadi kesepakatan bahwa KSM Petani Wajik bersedia menyediakan biaya untuk mendatangkan penceramah dalam kegiatan tersebut.

KSM Petani Wajik juga memiliki kaitan yang erat dengan Serikat Petani Kabupaten Lamongan (SPKL). Segera setelah didirikan, KSM ini telah mendaftarkan diri

menjadi salah satu kelompok tani binaan SPKL. Pada periode pembinaan 2000-2001, SPKL menugaskan Ahmad Zaini, Mukharom dan Mulyono dari divisi advokasinya untuk melakukan pendampingan langsung pada KSM Petani Wajik. Ketiga relawan dari SPKL ini seminggu sekali berada di tengah masyarakat Wajik. Terutama pada hari sabtu dan minggu mereka menginap di rumahnya Asmadi.

Sedangkan mengenai tugas-tugas pendampingan mereka, Mukharom menjelaskan sebagai berikut.

“Untuk membantu usaha-usaha KSM untuk membentuk kesadaran kritis anggotanya kami seringkali menjadi fasilitator musyawarah-musyawarah mereka. Kadang pula kita harus terjun membantu memecahkan masalah-masalah kongkrit di masyarakat Wajik. Contohnya misalnya waktu kemarin kita mendampingi KSM melakukan dengar pendapat dengan DPRD Lamongan. Atau waktu ada program sertifikasi massal dari BPN Lamongan. Karena masyarakat masih takut dengan prosedur pelepasan hak atas tanah mereka kepada negara, kami membantu mereka mencari keterangan tentang prosedur itu.”

Sedangkan periode 2001-2002, pendampingan SPKL dilakukan secara tidak langsung karena dari masyarakat Wajik sendiri telah ada Kader Komunitas Lokal (KKL). KKL masyarakat Wajik saat ini adalah Asmadi, Siti Mutmainnah dan Sugiyanto. Selain telah mendapatkan pendidikan pendampingan petani dari SPKL, ketiganya juga beberapa kali menghadiri pelatihan organisasi tani lokal (OTL) dari Federasi Serikat Petani Jawa Timur (FSPJT) dan LSM-LSM yang menjadi mitra kerja SPKL.

Selanjutnya, hasil penelitian tentang hubungan KSM Petani Wajik dengan organisasi sosial lainnya juga mengungkapkan persepsi atau cara pandang anggota KSM terhadap organisasi sosial lain di Desa Wajik. Kebanyakan subjek penelitian memberikan pandangannya berdasarkan peranan organisasi yang ada di desa Wajik terhadap proses pembangunan. Temuan lapangan tentang persepsi ini ternyata menunjukkan adanya dua

kategori jawaban. Pertama, jawaban yang berisi pandangan positif terhadap peranan organisasi dalam pembangunan. Kedua, jawaban yang berisi pandangan negatif terhadap peranan organisasi dalam pembangunan. Organisasi-organisasi lain di Desa Wajik yang terungkap dalam jawaban subjek penelitian adalah BPD Wajik, dan Ranting NU Wajik.

Subyek penelitian seperti (Jn) dan (No), ketika ditanyakan tentang peranan BPD di dalam pembangunan desa ternyata memandang BPD memiliki peranan yang positif.

Subyek penelitian (Jn) mengungkapkan sebagai berikut.

"BPD saget dados penyusun rancangan pembangunan. Adanya BPD itu ya..., supados saget menyalurkan napa sing dikarepaken wong Wajik saking pemerintah."

("BPD bisa jadi penyusun rancangan pembangunan. Adanya BPD itu ya..., supaya bisa menyalurkan apa yang dikehendaki warga Wajik dari pemerintah.")

Sedangkan Subyek lain (No) berpendapat sebagai berikut.

"Perane BPD iku terutama lembaga desa sing iso mbantu proyek-proyek pembangunan desa. Masio BPD iku anggotae akeh teko tokoh masyarakat, tapi pilihane wingi lak dipilih masyarakat kabeh. Soko iku BPD kudu dadi wakil masyarakat nek ono masalah pembangunan."

("Perannya BPD itu terutama lembaga desa yang bisa membantu proyek-proyek pembangunan desa. Meskipun anggotanya banyak dari tokoh masyarakat, tapi pemilihannya dulu kan dipilih masyarakat semua. Dari itu BPD harus menjadi wakil masyarakat kalau ada masalah pembangunan").

Sementara itu subyek penelitian (Wr) lebih banyak mengungkap beberapa kelemahan peranan BPD dalam pembangunan. (Wr) adalah seorang guru sekolah dasar dan pedagang hasil bumi. Tentang peranan BPD dalam pembangunan dia menjelaskan sebagai berikut.

"Kalau ada penyimpangan proyek masih seperti LKMD dulu...BPD di sini masih diam saja. Ya...kira-kira sdmnya masih lemah. Mestinya kan mereka memiliki peranan yang sangat penting dalam kebijakan pembangunan"



Pandangan subyek penelitian terhadap keberadaan BPD yang masih bervariasi ini tidak lepas dari umur BPD yang masih muda. BPD Wajik yang terbentuk pada bulan Mei 2001 ini ketika penelitian ini berlangsung ternyata lebih banyak melaksanakan rapat-rapat perumusan peraturan desa. Keterlibatan mereka di dalam kebijakan-kebijakan pembangunan desa banyak dilihat masyarakat hanya pada forum-forum rapat desa.

Pandangan yang masih memandang BPD tidak berbeda dengan LKMD, mengutip pendapat Aritonang (1994), merupakan persoalan yang berkaitan dengan ketidakberdayaan organisasi desa sebagai akibat proses *depowerment* Orde Baru terhadap keberadaan institusi-institusi pedesaan. LKMD di masa Orde Baru menjadi alat kontrol dan pengendali negara terhadap dinamika kehidupan masyarakat desa. Hanya pemerintah desa saja yang kemudian dominan melakukan pendekatan langsung (praktis) kepada masyarakat.

Sementara saat ini, kenyataannya BPD sebagai suatu organisasi sebenarnya bersifat lokal, dalam arti tidak mempunyai struktur organisasi vertikal seperti: pusat, cabang, ranting; tetapi semata-mata hanya ada di desa dan antara BPD satu desa dengan BPD desa yang lainnya tidak ada hubungan organisatorik. Yang ada hanyalah hubungan kerjasama dalam rangka program bersama ataupun tukar menukar pengalaman. Sedangkan secara jelas, tuntutan masyarakat dari keberadaan BPD adalah alat penyambung antara pemerintah dengan masyarakat. Maka tugas BPD adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat dan alat komunikasi masyarakat-pemerintah di dalam keseluruhan proses pembangunan.

Organisasi sosial di desa Wajik yang terungkap dari jawaban subyek penelitian lain (Ir) adalah adalah Ranting NU Wajik. Ditanyakan organisasi manakah yang bisa menjadi pendukung pembangunan Wajik, (Ir) menjawab sebagai berikut.

“Menurut saya, saya percaya Ranting NU bisa diajak kerjasama. Di NU banyak orang teladan ... bisa menjadi penerangan masyarakat. Anggotanya banyak, pengurusnya tahu masalah masyarakat.”

Di lain sisi, jawaban subyek penelitian (Ud) melihat kekurangan Ranting NU Wajik dari sudut pandang bidang kerjanya. (Ud) menyatakan sebagai berikut.

“Menawi ditingali saking babakan masalah agama...peranipun NU Wajik nggih pun sae. Namung bagasan pembangunan dusun mriki ...kulo dereng saget ungali sumbangsihipun. Penguruse mawon kejaba ketuane kulo kedah mboten tepang.”

(“Kalau dilihat dari bidang masalah agama...perannya NU Wajik ya sudah baik. Namun bidang pembangunan desa sini...saya belum bisa melihat sumbangsihnya. Pengurusnya saja kecuali ketuanya saya masih belum kenal.”

Kenyataan bahwa Ranting NU Wajik di mata sejumlah subyek penelitian pada tataran kegiatan dinilai belum berperan dalam pembangunan, tidak lepas dari pemahaman sebagian warga yang masih memahami pembangunan sebatas pada tataran perbaikan fisik desa. Pemahaman semacam ini sangat wajar akibat pola pembangunan Orde Baru yang terlalu menekankan pada bidang ekonomi. Di desa-desa, akar nilai budaya agraris diganti dengan nilai baru budaya industri yang lebih diwarnai budaya matrialisme dan konsumerisme (Firman:1999).

Kenyataan ini juga merupakan bukti dari berlangsungnya pendekatan Orde Baru terhadap organisasi-organisasi sosial non-negara yang bersifat otoriter; pembubaran, pengontrolan, ataupun kooptasi (Liddle:1994). NU di tengah situasi demikian lebih memilih menukar sikap politik partisan dengan hak untuk mengelola persoalan-persoalan intern organisasinya saja, dan menjalankan peningkatan taraf hidup para anggotanya.

BAB 7

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

7.1 Kesimpulan

Pembangunan merupakan upaya perubahan yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai kondisi dan situasi masyarakat yang lebih baik. Keberhasilan pembangunan menuntut partisipasi dari semua warga negara, dan hasilnya harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara merata. Namun kenyataannya, tidak semua masyarakat khususnya petani di pedesaan dapat berpartisipasi di dalam pembangunan, apalagi menikmati hasil-hasil pembangunan sebagaimana mestinya. Konsekuensinya, saat ini tantangan pembangunan yang paling serius adalah penanggulangan kemiskinan massal di pedesaan.

Hal ini salah satunya terkait dengan kurangnya kelembagaan petani yang representatif dan artikulatif di dalam memperjuangkan kepentingan petani di dalam dinamika pembangunan desa. Di masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan pembangunan kelembagaan desa dalam Undang-Undang Pemerintahan Desa tahun 1979 hanya menunjukkan semakin kuatnya kontrol pemerintah yang berakibat menghambat partisipasi masyarakat petani di desa. Untuk itu dibutuhkan sebuah organisasi petani yang mampu melakukan perlindungan hak-hak mereka, sekaligus mampu menjadi saluran partisipasi mereka dalam pembangunan.

Meskipun diakui bahwa sampai sekarang masih jarang ditemui organisasi petani yang demikian, namun hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kelompok tani yang bernama KSM Petani Wajik sedang berkembang menjadi saluran partisipasi petani dalam pembangunan. Kelompok tani ini berada di Desa Wajik Kecamatan Lamongan

Kabupaten Lamongan. Desa Wajik termasuk wilayah barat kecamatan Lamongan dimana berada di tengah areal pertanian yang memisahkannya dari desa dan kelurahan sekitar. Letaknya kurang strategis, selain berada jauh dari jalan utama ataupun pusat kecamatan, jarak 6 kilometer antara Wajik dan Pusat Kota hanya dihubungkan oleh sebuah jalan batu kapur. Kondisi transportasi yang tidak memadai ini diperparah oleh kondisi sarana komunikasi dan kesehatan yang masih sulit dijangkau oleh warga sekitar. Bagaimanapun Wajik merupakan sebuah desa dengan ciri-ciri kehidupan desa yang tradisional, bersahaja dan jauh dari kelengkapan fasilitas pembangunan.

Kenyataan lingkungan dan kehidupan desa semacam ini menggerakkan sejumlah masyarakat Wajik untuk mewujudkan alat memperjuangkan kesejahteraannya berupa KSM Petani Wajik. Bisa dikatakan, dasar berdirinya Kelompok tani ini adalah adanya kesamaan kepentingan, khususnya ekonomi, antar petani Wajik. Jadi beralasan sekali bila Kelompok tani ini dibangun di atas inisiatif petani sendiri dan bukan dari pemerintah setempat. Dari kesamaan kepentingan demikian, kelompok tani ini sedang berkembang menjadi sebuah organisasi pamrih, untuk mencapai tujuan ekonomi yaitu menaikkan kemakmuran dari kenaikan pendapatan dan produktifitas serta distribusi yang lebih merata.

Sejak didirikan, meskipun aktifitas-aktifitas kelompok masih banyak diprakarsai oleh pengurus KSM Petani Wajik, namun kegiatan-kegiatan kelompok tetap didasarkan pada program kerja yang ada. Program kerja KSM Petani Wajik ini dirumuskan secara garis besar dalam sebuah musyawarah anggota yang dipimpin oleh Dewan Pengawas. Kenyataan pada aspek operasional organisasi terjadi dominasi pengurus KSM Petani Wajik, namun hal ini lebih merupakan akibat dari masa-masa awal penegakkan tujuan

organisasi. Pada aspek lain, efektifitas hasil kegiatan KSM Petani Wajik meskipun dengan pola penyelenggaraan kelompok semacam itu sudah mulai dirasakan oleh anggota.

Namun demikian, karena mekanisme aktifitas anggota maupun pengurus telah diatur di dalam AD/ART dan Program kerja KSM Petani Wajik, maka proses pengembangan organisasi tidak banyak menemui kendala. Kecuali masalah mentalitas *pepesthen* atau *nerimo* dan kesibukan petani Wajik memenuhi kebutuhan sehari-hari, proses pembinaan partisipasi berlangsung secara rutin di berbagai kegiatan KSM Petani Wajik, seperti *sarasean* (pertemuan bulanan), rapat koordinasi pengurus, pengajian rutin, peminjaman pupuk, pengelolaan lumbung desa, pelatihan atau penyuluhan pertanian, dan sebagainya.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa proses pendirian KSM Petani Wajik yang benar-benar dari masyarakat tersebut, menumbuhkan kesadaran sosial di antara anggota KSM Petani Wajik. Mereka menjadi sadar bahwa selama mereka tidak menghimpun diri dalam sebuah organisasi, maka peningkatan kesejahteraan mereka sangat sulit diwujudkan.

Selain itu, terjadi perubahan cara pandang mereka terhadap makna partisipasi dalam pembangunan. Partisipasi bagi anggota KSM Petani Wajik tidak sekedar menyumbangkan material atau tenaga untuk pembangunan desa. Lebih dari itu, mereka sadar bahwa berpartisipasi berarti ikut melibatkan diri baik secara pemikiran, komitmen, dan tenaga di dalam keseluruhan proses pembangunan. Dari pembuatan keputusan (perencanaan), pelaksanaan, maupun pengawasan dan evaluasinya. Anggota Dalam hal ini KSM Petani Wajik telah mendorong pada diri petani anggotanya kebutuhan akan

penghargaan atas inisiatif dan gagasan mereka demi keberhasilan proses pembangunan masyarakat desa Wajik.

Potensi sosial untuk pembangunan di dalam penyelenggaraan KSM Petani Wajik juga tercermin dari kegiatan usaha ekonomi kelompok. Seperti kegiatan peminjaman pupuk, memiliki dua dimensi kemanfaatan yakni sosial dan ekonomi. Secara sosial, antara lain terungkap dari adanya kerelaan sejumlah pengurus yang memiliki kelebihan dana dan dalam kategori petani kaya meminjamkan dananya untuk modal kegiatan.

Selain itu, sebagaimana aturan peminjaman, apabila terdapat anggota atau peminjam yang menunggak maka tunggakan ini dibebankan kepada semua anggota (*tanggung renteng*). Hal ini menampakkan bagaimana KSM Petani Wajik begitu menekankan etika solidaritas sosial sebagai landasan pengembangan masyarakat Wajik.

Sedangkan pada tataran kemanfaatan ekonomi, kegiatan peminjaman pupuk mampu menghindarkan anggota KSM Petani Wajik dari jeratan rentenir. Hal ini juga sejalan juga upaya penyelenggaraan pusat pelayanan ekonomi yang mandiri di tengah masyarakat. Pusat pelayanan ekonomi yang terjangkau oleh para petani kecil dimana pada akhirnya terjadi pemerataan akses terhadap sumber daya-sumber daya pembangunan.

Pada intinya, partisipasi KSM Petani Wajik dalam pembangunan desa tidak hanya dilakukan pada pembangunan-pembangunan yang telah diprogramkan pemerintah saja. Namun dalam proses penyelenggaraan KSM Petani Wajik, baik atas swadaya kelompok maupun bekerjasama dengan pemerintah desa selalu menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhirnya.

Pada pelaksanaan pembangunan yang telah diprogramkan pemerintah, partisipasi KSM Petani Wajik dilakukan secara lengkap dari tahapan pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Hal ini tidak terlepas dari hubungan baik yang terjalin antara KSM Petani Wajik dengan pemerintah desa setempat. Pada satu sisi, KSM Petani Wajik melihat bahwa hambatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan seringkali berasal dari struktur pemerintahan desa. Untuk itu KSM Petani Wajik berupaya menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah desa untuk mampu memperbaiki kondisi pemerintahan desa yang demikian.

Pada sisi yang lain, pemerintah desa Wajik juga telah melihat adanya desakan kuat dari masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Di samping sebagai dampak era otonomi daerah, pemerintah desa telah mulai bahwa aspirasi masyarakat merupakan pertimbangan penting di dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini partisipasi kelompok tani di dalam pembangunan desa dipengaruhi oleh pola hubungan kesetaraan yang dikembangkan kelompok tani dengan pemerintah desa.

Pola hubungan pengaruh antara pemerintah desa dengan pengurus KSM Petani Wajik terjadi dalam pola hubungan pengaruh yang seimbang. Sehingga dengan partisipasi yang dilakukan KSM Petani Wajik dalam keseluruhan tahap pembangunan, maka kemungkinan penyimpangan pemerintah desa di dalam pembangunan dapat diantisipasi.

7.2 Implikasi

Secara teoritis penelitian ini memunculkan tesis bahwa saluran partisipasi masyarakat di dalam pembangunan bisa berwujud sebuah organisasi petani yang berskala kecil seperti sebuah kelompok tani. Kelompok tani yang benar-benar berdiri

berlandaskan kebutuhan anggota merupakan wadah efektif bagi artikulasi kepentingan dan pengembangan kesadaran sosial petani untuk mampu berpartisipasi di dalam pembangunan.

Dalam konteks pembangunan masyarakat desa, maka kelompok tani merupakan potensi sosial yang perlu dikembangkan dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan pembangunan di tingkat desa. Hal ini dikarena prospek keberhasilan pembangunan desa antara lain ditentukan oleh jalinan kerjasama antara pemerintah desa dengan kelompok tani yang ada.

Kerjasama pemerintah desa dan kelompok tani dalam pembangunan desa akan sangat efektif apabila hubungan kedua belah pihak benar-benar dilandasi prinsip kesetaraan pemerintah – rakyat. Berkenaan dengan itu, hendaknya terlebih dahulu diciptakan konsensus umum tentang mekanisme partisipasi masyarakat di dalam pembangunan desa. Sekaligus di sini perlunya diberikan makna yang lebih besar terhadap peran kelompok tani di dalam proses pengembangan masyarakat, sehingga tidak hanya menjadi pelayan program-program bantuan pemerintah saja.

Untuk tujuan penelitian selanjutnya, masih perlu diteliti lebih dalam lagi tentang peranan kelompok tani sebagai saluran partisipasi petani dalam pembangunan desa, khususnya berkenaan dengan kesadaran berorganisasi, pendidikan keswadayaan, dan semangat kewirausahaan petani dalam kelompok tani.

Perlu dipikirkan untuk mengadakan penelitian lanjutan tentang penyelenggaraan kelompok tani yang paling mendekati efektifitas dukungan terhadap proses pembangunan masyarakat desa.

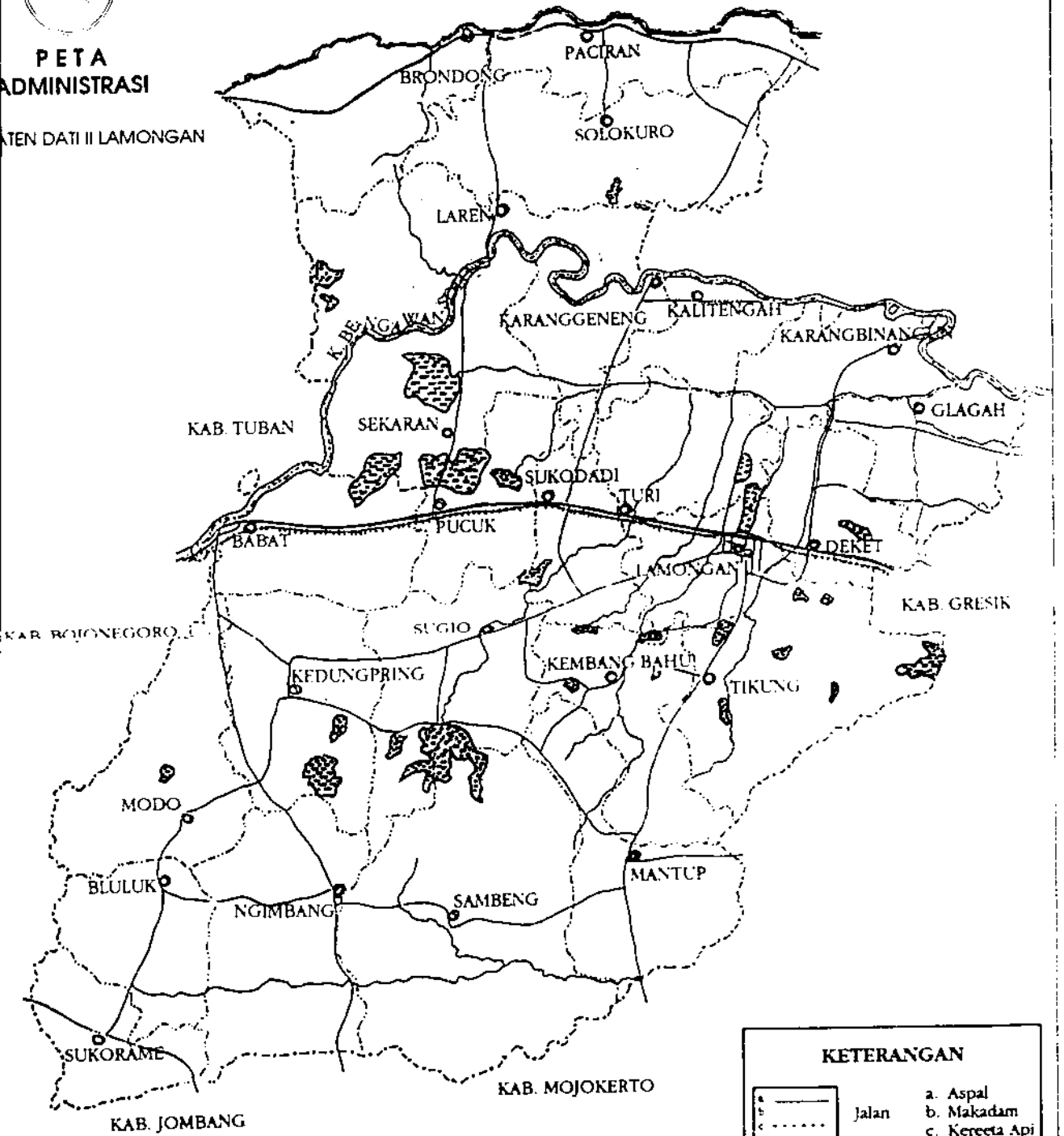
DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, Robert, *Memahami Desa Secara Partisipatif*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Dillon, H.S., *Pertanian Membangun Bangsa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1999.
- Dekker, Nyoman, *Sejarah Pergolakan Indonesia Dalam Abad XIX*, Malang: Penerbit IKIP Malang, 1993.
- Fauzi, Noer, *Petani Dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, Yogyakarta: INSIST, 1999.
- Fredericks, L.J., *Concepts and Approachs to Rural Development*, Kuala Lumpur: ACDA, 1978.
- Goldthorpe, J.E., *Sosiologi Dunia Ketiga: Kesenjangan dan Pembangunan*, Jakarta:Gramedia, 1992.
- Husin, Zulkifli, *Pembangunan Irigasi Sederhana dan Efeknya terhadap Distribusi Pendapatan Petani: Studi Kasus di Aceh*, Jakarta: Prisma LP3ES, 1979.
- Sajogyo, et al, *Studi Sosiologi Pedesaan: Ringkasan Tesis dan Disertasi 1975-1994*, Bogor: Puspa Swara, 1996.
- Kano, Hiroyoshi, *Sejarah Ekonomi Masyarakat Pedesaan Jawa*, dalam Noer Fawzi dan Juliantoro, *Menyatakan Keadilan Agraria*, Bandung: KPA, 2000.
- Kartodirdjo, Sartono dan Suryo, Djoko, *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1991.
- Konsorsium Pembaruan Agraria, *Kaum Tani di Bawah Penindasan Feodalisme dan Imperialisme*, Bandung: KPA, 1998.
- Lipton, Michael, *Why Poor Stay Poor*, dalam Harris, John, *Rural Development: Theories of Peasant and Agrarian Change*, London: Hutchinson University Library, 1982.
- Mardikanto, Totok, *Bunga Rampai Pembangunan Pertanian*, Surakarta: UNESA Pers, 1994.
- Mubyarto, *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1997.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
- Murphy, Dennis, *Membangun Organisasi Rakyat*, Siborongborong: KSPPM, 1989.



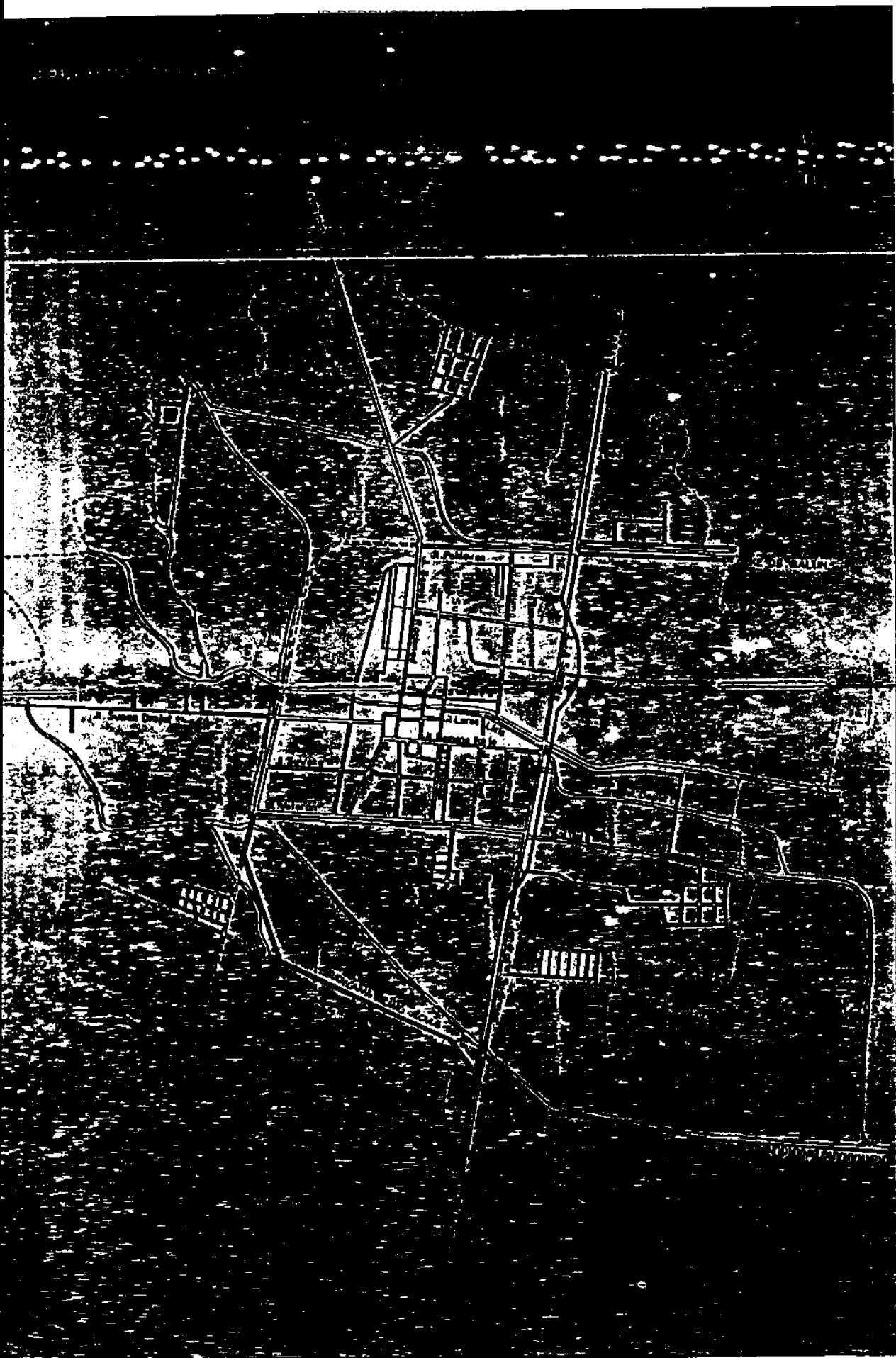
PETA ADMINISTRASI

DAIRY DATI II LAMONGAN

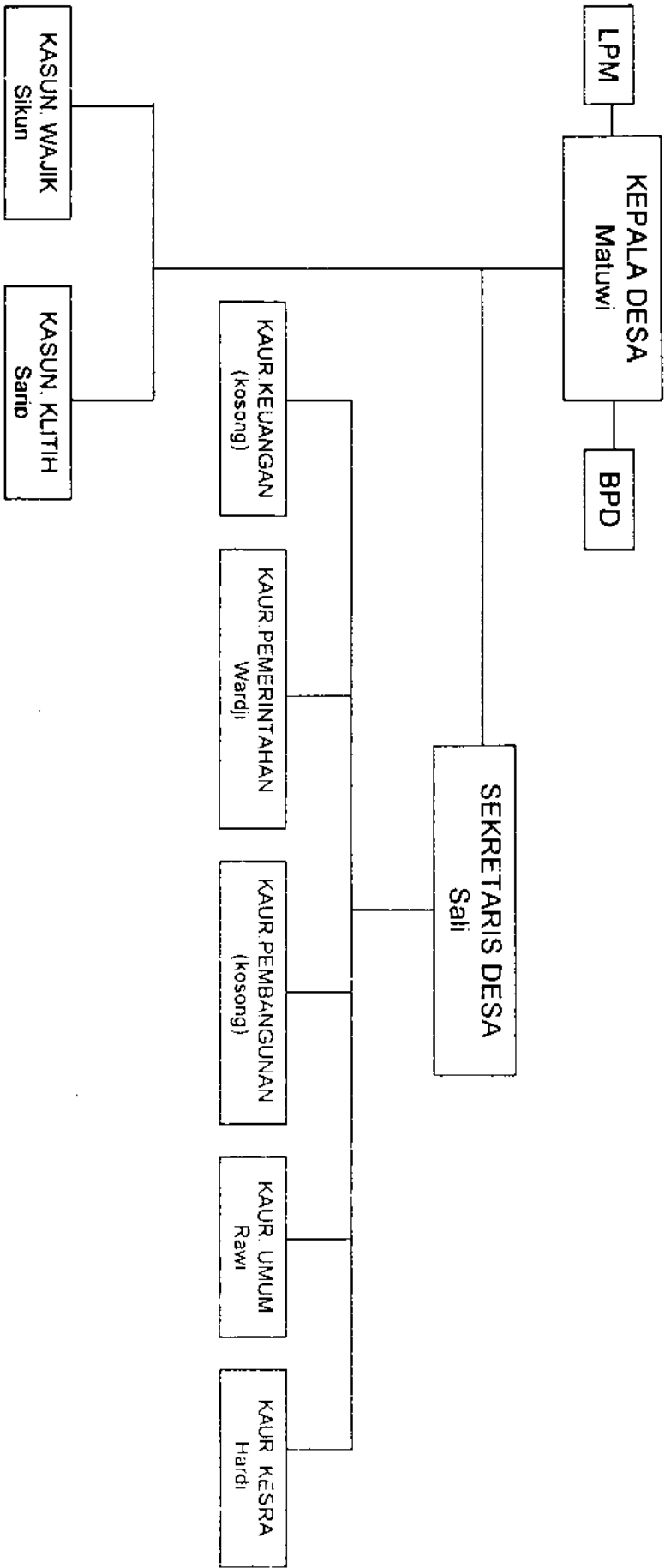


KETERANGAN

| | |
|--|------------------|
| | a. Aspal |
| | b. Makadam |
| | c. Kereeta Api |
| | a. Kabupaten |
| | b. Kecamatan |
| | a. Kabupaten |
| | b. Kecamatan |
| | Sungai |
| | Danau/Waduk/Rawa |



STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAHAN DESA WAJIK
KECAMATAN LAMONGAN
TAHUN 2001

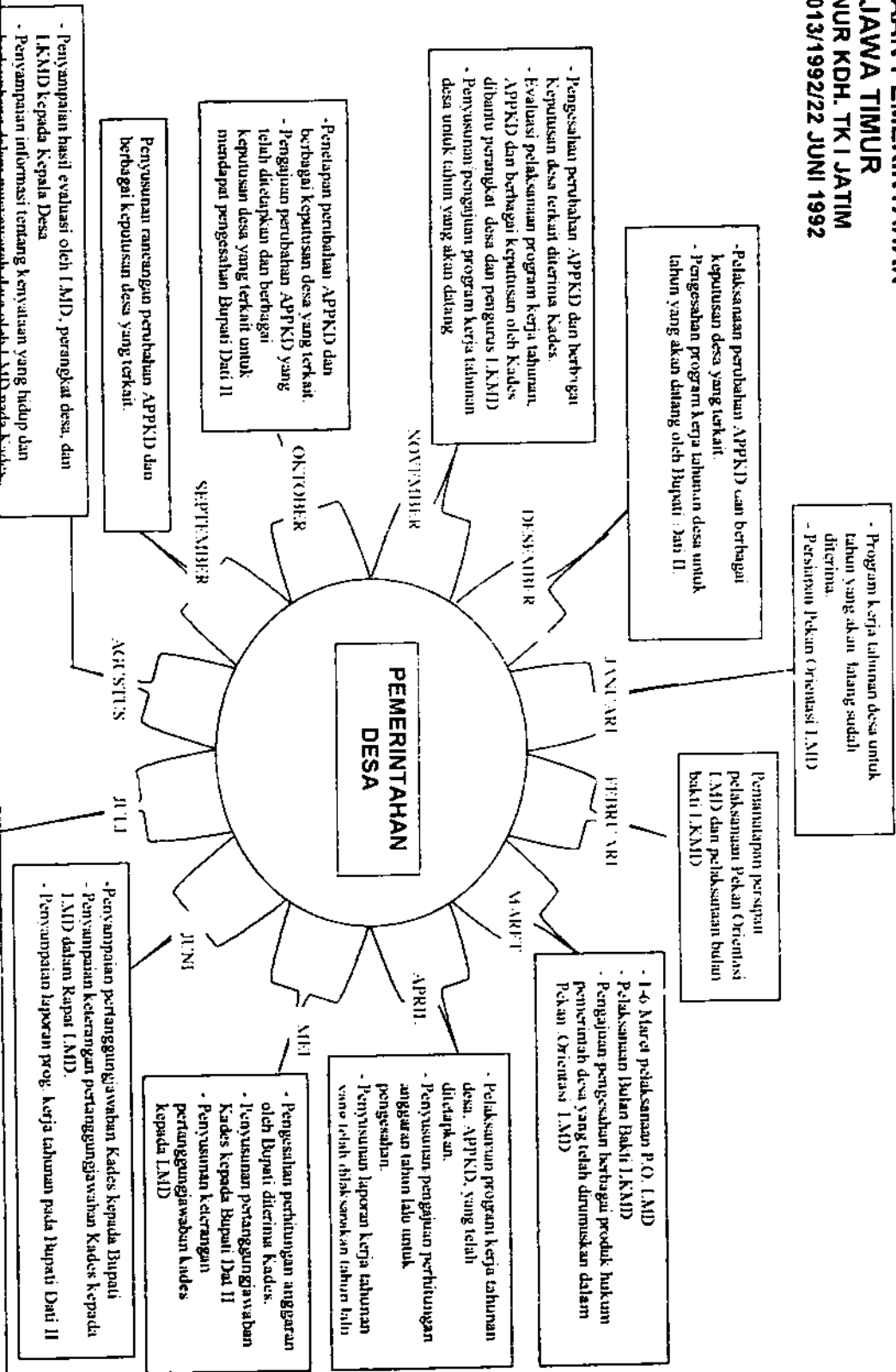


JADWAL MEKANISME TAHUNAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DESA DI JAWA TIMUR

SURAT GUBERNUR KDH. TK I JATIM

NO. 411.6/11919/013/1992/22 JUNI 1992



Jumat Pahing 8 September 2000

Petani Dua Desa Mengadu Dewan

...a-gara
...loknya Harga
...bah di Pasaran.
...ini Membuat
...ani hanya
...mupuk Rugi
...ap Kali Tanam

LAMONGAN- Anjloknya harga gabah, membuat para petani melupakan. Mengantisipasi hal ini, petani yang menaungi diri TKFPL (Tim Kerja Forum Petani Lamongan) yang memiliki 2 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Petani di dua desa, Wajik dan Dinoyo, ngeluarin DPRD Lamongan, kemarin. Kita ke sini hanya ingin mendengar dewan. Ya, semua kan tahu jika harga gabah itu semakin terpuruk. Bagaimana solusinya? Itu yang kita mau, agar DPRD juga dapat berikan jalan keluar bagi kita para petani ini," ujar Madekhan Ali, koordinator TKFPL, kemarin kepada Radar.

Sampai saat ini menurut Madekhan, harga gabah dipasaran jauh di bawah dari harga standar. Uniknya petani Wajik dan Dinoyo, gamereka hanya dibeli dikitarangka Rp 850,-. Ini tentu pukulan berantun bagi para petani. Pasalnya, pada musim panen lalu, harga gabah juga timenolong petani.

banding dengan harga pubibit serta perawatannya. Bajasaja tidak sebanding. Bahaibisa dibilang merugi. "Jelasat nggak nyucuk. Hasil rangi modal ya banyak ketimbang untungnya," us Madekhan.

lain itu, TKFPL juga menyopermasalahan pengairan usnya di desa Wajik. Pasala-ir yang didatangkan dariok Gondang Sugio ditenganyak yang 'menghilang'. gga kebutuhan air yang di-



Petani dua desa di Lamongan kemarin mempermasalahkan jatuhnya harga gabah.

perkiraan mencukupi, kenyataannya masih kurang. "Siapa pencurinya, kita juga minta dewan untuk menindaklanjutinya," terang pria berkaca mata itu.

Sedang masalah terakhir yang ingin disampaikan saat hearing tersebut, mengenai sertifikasi tanah. Dalam kasus sertifikasi tanah itu, Madekhan menengarai adanya itikad pelayanan yang kurang dari BPN (Badan Pertanahan Negara). Sehingga yang terjadi di lapangan tidak ada pemilikan pada petani kecil. "Itu yang kita lihat di lapangan," ujarnya.

Menanggapi tuntutan para petani desa Wajik dan Dinoyo tersebut, KH Zahid Ahmadi Fadlil, Ketua Komisi B DPRD Lamongan, menyatakan sebagai wakil rakyat, komisinya akan menampung segala aspirasi rakyat.

Selanjutnya, hasil laporan yang disusun komisi akan diminatkan rekomendasi dari pimpinan DPR setempat. "Ya nanti kita rekomendasikan ke Ketua, kan ketua jua yang menerima dan se-

kahgus membuka hearing itu," ujar Kiai Fadlil.

Mengenai tindakan konkret, Kiai Fadlil mengaku harus mempelajari satu persatu keinginan petani tersebut. Misalnya, untuk pengairan, jelas itu bukan tugas dari komisi B, melainkan tugas komisi D, sehingga nantinya komisi D yang turun ke lapangan. "Ya kita minta ke komisi D nanti agar menindak lanjut keluhan ini. Minimal, Dinas Pengairan yang terkait dalam hal ini juga harus mengerti dan mau menelusuri," ungkapnya.

Khusus soal gabah, Kiai Fadlil menyatakan sudah berdialog dengan Dolog. Hanya saja, Dolog sampai saat ini terbentur pada pembelian terbatas. Ini juga disebabkan penyaluran beras Dolog juga terbatas. Disesuaikan dengan persediaan gudangnya.

"Karena kita juga nggak dapat memaksa, makanya kita harus laporkan sampai ke tingkat pusat, agar harga gabah dinaikkan," tambah Kiai Fadlil. (yan)



Jatuhnya harga gabah dan melambungnya harga pupuk membuat petani Lamongan sambat.

Petani Lamongan Sambat

Buntut Jatuhnya Harga Gabah dan Melambungnya Harga Pupuk

LAMONGAN- Petani di Lamongan menjerit. Pasalnya, sampai musim tanam tahun ini, harga gabah belum beranjak sesuai harga yang ditentukan pemerintah. Padahal, imbas dari kenaikan BBM, harga pupuk sudah mengalami kenaikan. Sehingga, sejumlah petani khawatir tidak dapat menanam pada musim ini.

"Harga gabah basah milik petani tetap saja berada di kisaran Rp 800 hingga Rp 850 per kilogram. Untuk kering giling mentok di angka Rp 1.000 per kilogramnya. Sementara, harga pupuk urea Rp 1.200 per kg" ujar Ketua FKPL (Forum Kelompok Petani Lamongan), Madekhan Ali.

Anjloknya harga gabah tersebut, lanjut Madekhan, tidak terlepas dari peran Dolog selama ini. Menurut Madekhan, Dolog yang diharapkan sebagai stabilisator harga, tidak dapat memerankan tugasnya. Dolog Lamongan dinilai Madekhan jarang turun langsung ke lapangan, melainkan le-

bih senang menunggu 'setoran' para tengkulak. Sehingga, soal harga pun akhirnya dipermainkan.

Meski ada rencana kenaikan harga gabah per 1 April mendatang, kata Madekhan, pesimis hal itu akan mengangkat kesejahteraan petani. Dasar acuan-nya, hingga saat ini saja harga gabah petani masih di bawah standar.

Seharusnya, kata Madekhan, Pemkab Lamongan cepat tanggap akan permasalahan petani. Namun sayangnya, lanjut Madekhan, sampai kini tidak ada respon dari Pemkab. "Ternyata bupati kita lebih senang menggelar ekspo pembangunan yang *notabene* justru memperlihatkan betapa kesenjangan antara kelas menengah dan rakyat kecil yang sedang berjuang mempertahankan hidupnya," tambah pria mempunyai 2 kelompok dampingan petani di Wajik dan Dinoyo itu.

Selain itu, lanjut Madekhan, dana bantuan KKP (Kredit Ketahanan Pangan) sebagai pengganti KUT yang diharapkan petani, juga belum turun. Padahal, petani sudah melakukan penanaman padi. Kalau pun nanti turun, Madekhan khawatir mekanisme yang digunakan nanti bertele-tele. "Dulu, jika ingin dapat KUT

kan banyak syaratnya, termasuk harus mendapatkan rekomendasi PPL dan melalui koperasi. Itu *nggak* efektif bagi petani. Seharusnya, lembaga pengkoordinir itu setingkat RT atau RW saja, sehingga tidak berbelit-belit," ungkapnya.

Menyoal harga pupuk yang kian melambung, Madekhan justru mempertanyakan fungsi PPL. Seharusnya, kata Madekhan, PPL dapat memberikan solusi terbaik, jika petani tidak mampu lagi membeli pupuk.

Sementara masalah lain yang menjadi ancaman petani di 2 wilayahnya menurut Madekhan keberadaan waduk Sritrondel. Pasalnya, pendangkalan kali tersebut sampai kini belum dilaksanakan. (yan)

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN LAMONGAN
DESA WAJIK

Wajik : 6 Juni 2001

: 005/ /410.300.12/2001

: Penting

: U N D A N G A N

Kepada

Yth. Sdr. KETUA KSM PETANI

WAJIK

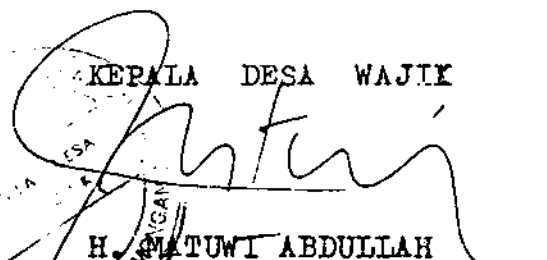
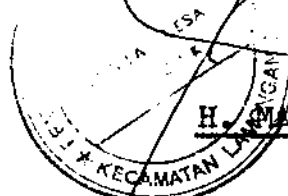
DI -

W A J I K

Mengharap dengan hormat atas kehadiran saudara
besuk pada :

H a r i : R a b u
Tanggal : 6 Juni 2001
J a m : 19.30. Wib.
Tempat : Balai Desa Wajik
Keperluan : Membahas Daftar Usulan Rencana Kegiatan
DPD/K. Th. 2001

Demikian atas kehadirannya disampaikan banyak
terima kasih.

KEPALA DESA WAJIK

H. M. TUWI ABDULLAH


IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN LAMONGAN
DESA WAJIK

Wajik, 4 Oktober 2001

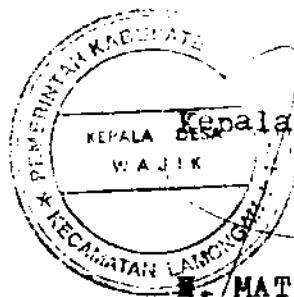
or : 005/50/410.300.12/2001
at : Penting
iran :
bal : UNDANGAN.

Kepada
Yth. Sdr. KETUA KSM
PETANI WAJIK
di-
WAJIK.

Menghaturkan dengan hormat atas kehadiran Saudara besok
pada :

Hari : S A B T U.
Tanggal : 6 Oktober 2001.
Jam : 19.00 WIB.
Tempat : Balai Desa Wajik.
Kegiatan : 1. Membahas Program Kerja yang sekaligus
dituangkan dalam APBD tahun 2001.
2. Membahas Belakangan Tanah bengkok Kaur
Keuangan yang kosong.
3. Membahas Peraturan Desa Tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintah Desa.

Atas kehadirannya disampaikan banyak terima kasih.



M. MATUWI ABDULLAH.